

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

---



**OPTIMALISASI PERTAHANAN NEGARA DALAM  
MENGANTISIPASI ESKALASI KONFLIK DI LAUT CHINA  
SELATAN GUNA MENJAGA KEPENTINGAN NASIONAL**

Oleh :  
**PURWANTO ADI NUGROHO**  
**KOLONEL PNB. NRP. 521832**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)  
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXVI  
LEMHANNAS RI  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI Lemhannas RI Tahun 2024 berhasil menyelesaikan Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul: **“Opmalisasi Pertahanan Negara dalam Mengantisipasi Eskalasi Konflik di Laut China Selatan guna Menjaga Kepentingan Nasional”**.

Judul Taskap tersebut merupakan hasil tindak lanjut penulis terhadap tema Taskap yang telah ditentukan oleh Lemhannas setelah mendapatkan arahan dari Tutor. Penentuan Tutor didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor Kep 23 Tahun 2024 tanggal 30 Januari 2024 tentang Pengangkatan Tutor Pembimbing PPRA LXVI.

Pada kesempatan ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Lemhannas RI dan Markas Besar TNI Angkatan Udara yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti PPRA LXVI di Lemhannas RI tahun 2024. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Tutor Laksamana Muda TNI (Purn) Prasetya Nugraha, S.T.,M.Sc. yang selama ini dengan penuh dedikasi dan kesabaran telah membimbing penulis dalam penyusunan Taskap, serta Tim Penguji yang telah banyak memberi masukan dan catatan untuk penyempurnaan naskah. Penulis juga berterima kasih kepada istri, dan anak-anak penulis yang telah senantiasa memberikan dorongan semangat dan dukungan doa.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis terbuka dengan masukan, kritik, maupun saran guna penyempurnaan naskah ini. Besar harapan penulis, Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangsih pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan

dan perhatian terhadap tema Geopolitik Global.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih.

Jakarta, 19 Agustus 2024

Penulis,



Purwanto Adi Nugroho  
Kolonel Pnb. NRP. 521832



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

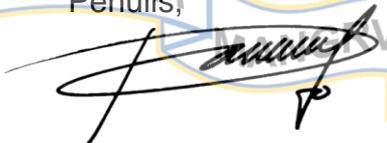
1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Purwanto Adi Nugroho.  
Pangkat : Kolonel Penerbang  
Jabatan : Perwira Menengah Sopsau  
Instansi : Sopsau  
Alamat : Mabasau Cilangkap

Sebagai Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI Tahun 2024 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau keseluruhan tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia untuk dibatalkan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Jakarta, 19 Agustus 2024  
Penulis,  


Purwanto Adi Nugroho  
Kolonel Pnb NRP. 521832

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIC INDONESIA

---

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	4
3. Maksud dan Tujuan.....	5
4. Ruang Lingkup dan Sistematika.....	5
5. Metode dan Pendekatan.....	7
6. Pengertian.....	7
<b>BAB II LANDASAN PEMIKIRAN</b>	
7. Umum.....	11
8. Peraturan Perundang-Undangan.....	12
9. Data dan Fakta.....	15
10. Kerangka Teoritis.....	24
11. Lingkungan Strategis.....	26
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
12. Umum.....	32
13. Posisi Strategis Indonesia dalam Konflik di LCS dan Skenario Terburuk yang Mungkin Terjadi akibat Eskalasi Konflik di LCS....	33
14. Kondisi Pertahanan Indonesia Dihadapkan Kepada Eskalasi Konflik di LCS.....	44
15. Langkah-langkah Konkret yang Dapat Diambil Sebagai Strategi untuk Mengoptimalkan Pertahanan Negara dalam Mengantisipasi Eskalasi Konflik di LCS.....	57

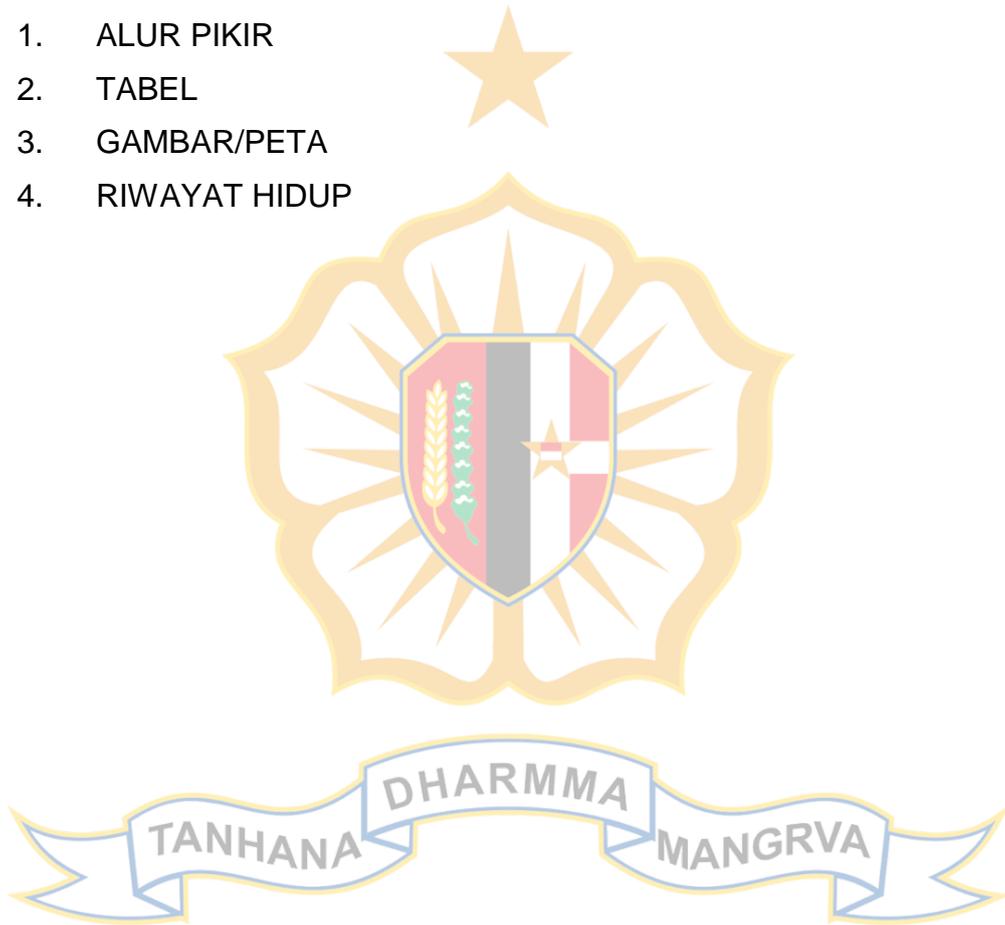
**BAB IV PENUTUP**

16. Simpulan.....	74
17. Rekomendasi.....	75

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN:**

1. ALUR PIKIR
2. TABEL
3. GAMBAR/PETA
4. RIWAYAT HIDUP



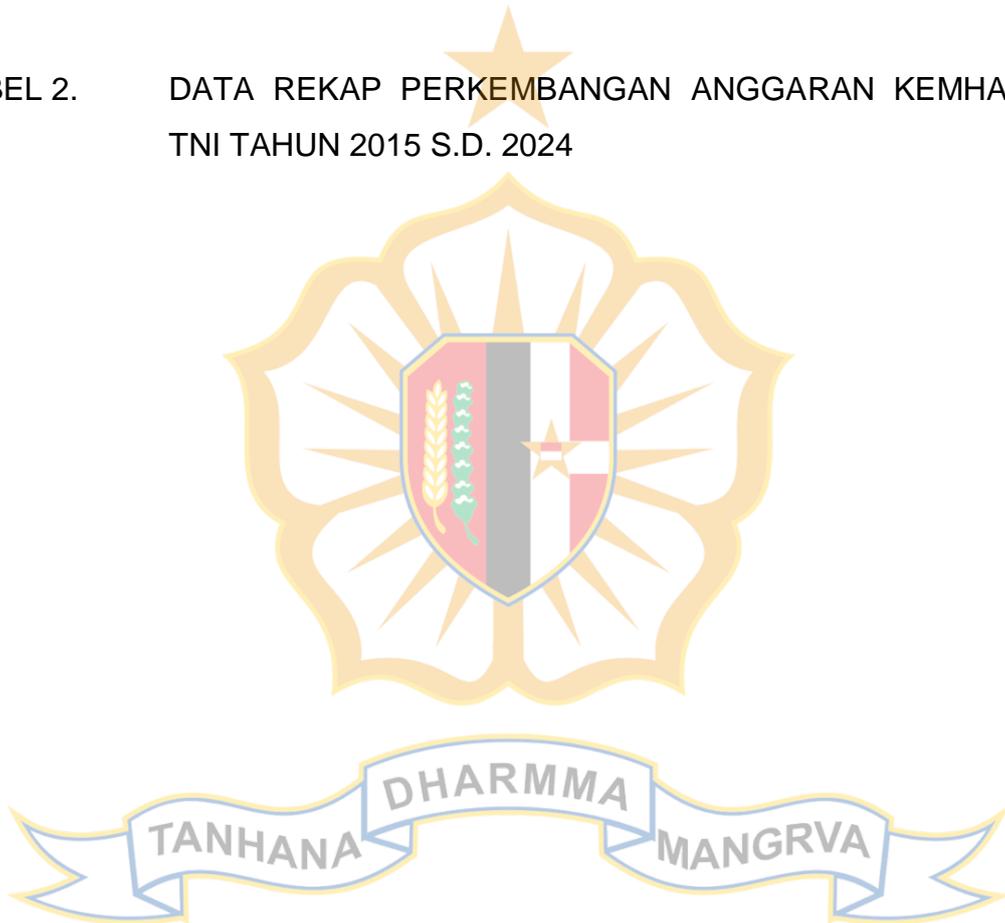
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

---

**DAFTAR TABEL**

TABEL 1. DATA-DATA KEJADIAN DI LCS YANG MENUNJUKKAN KONFLIK TERBATAS ANTARA CHINA DENGAN *CLAIMANT STATES*, AS, DAN AUSTRALIA

TABEL 2. DATA REKAP PERKEMBANGAN ANGGARAN KEMHAN DAN TNI TAHUN 2015 S.D. 2024



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

---

**DAFTAR GAMBAR**

- GAMBAR 1: PETA *TEN DASH LINE* ATAU 10 (SEPULUH) GARIS PUTUS-PUTUS
- GAMBAR 2: *FREEDOM OF OPERATIONS* DI LCS OLEH AS
- GAMBAR 3: PERKIRAAN ANGGARAN PERTAHANAN CHINA TAHUN 2013 S.D. 2024
- GAMBAR 4: PERBANDINGAN ANGGARAN PERTAHANAN CHINA DIBANDINGKAN DENGAN BEBERAPA NEGARA DI KAWASAN
- GAMBAR 5: ANGGARAN PERTAHANAN INDONESIA DARI TAHUN 2000 – 2022
- GAMBAR 6: ANGGARAN PERTAHANAN INDONESIA DARI TAHUN 2005 – 2024
- GAMBAR 7: PETA SITUASI DI INDO-PASIFIK
- GAMBAR 8: PETA OVERLAY GARIS KLAIM 9 *DOTTED* CHINA DENGAN GARIS KLAIM ZEE DAN LANDAS KONTINEN INDONESIA DI LCS
- GAMBAR 9: PETA KEKUATAN MILITER (PERSONEL) DI KAWASAN ASIA
- GAMBAR 10: KONTROL WILAYAH OLEH CLAIMANT STATES DI LCS (KEPULAUAN SPRATLY)
- GAMBAR 11: KEKUATAN MILITER (PERSONEL) AS DI ASIA, AUSTRALIA, GUAM, HAWAI, DAN ALASKA
- GAMBAR 12: KONSEP OPTIMALISASI PERTAHANAN DI PULAU NATUNA
- GAMBAR 13: KONSEP OPTIMALISASI PERTAHANAN DI *CHOKEPOINTS* DAN ALKI
- GAMBAR 14: KONSEP OPTIMALISASI PERTAHANAN ADIZ DI INDONESIA SECARA TERBATAS
- GAMBAR 15: PENERAPAN ADIZ DI LAUT CHINA TIMUR

GAMBAR 16: PENERAPAN A2/AD OLEH RUSIA DI KRIMEA

GAMBAR 17: KONSEP PENERAPAN A2/AD DI INDONESIA SECARA TERBATAS



## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang.

Kawasan Laut Cina Selatan tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga perairan yang penting karena merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Pengaruh letak dan peran strategis Laut Cina Selatan (LCS) telah menimbulkan permasalahan sengketa wilayah dalam bentuk saling klaim oleh beberapa negara di sekitarnya (*claimant state*) dengan menetapkan batas wilayah di sebagian atau seluruh wilayah LCS. Negara-negara seperti China, Vietnam, Taiwan, Filipina, Malaysia, dan Brunei masing-masing memberikan alasan berbeda untuk membenarkan klaim mereka di wilayah tersebut. Terkait klaim hak teritorial China di LCS melalui *ten dash line* atau “10 garis putus-putus” (lihat Lampiran 4), China aktif melakukan berbagai aktivitas di LCS antara lain penggelaran kapal penjaga pantai (*coast guard*) untuk mengawal dan melindungi kapal-kapal nelayan mereka yang beraktifitas di LCS, serta reklamasi pulau-pulau buatan, demi menjaga klaim yang diakui sebagai bagian wilayah milik mereka.

Klaim China ini telah ditolak oleh negara-negara yang juga mengklaim wilayah tersebut, dan pada tahun 2016, sebuah tribunal internasional<sup>1</sup> memutuskan bahwa klaim China tidak memiliki dasar hukum. Meskipun demikian, China tetap menegaskan klaimnya atas LCS dan dituduh menggunakan kekuatan militer maupun non militer untuk mengintimidasi negara-negara lain di perairan tersebut. Sementara itu, Amerika Serikat (AS) terang-terangan menolak klaim China dan semakin terlibat dalam sengketa LCS. AS menegaskan sikap mereka dalam bentuk *freedom of navigation operation* (FONOP)<sup>2</sup> yaitu operasi untuk menjamin kebebasan berlayar dan bernavigasi di LCS, juga seolah memperingatkan China bahwa mereka tidak akan mentolerir upaya untuk membatasi kebebasan berlayar atau

---

<sup>1</sup> <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/whatever-happened-south-china-sea-ruling>

<sup>2</sup> <https://www.navy.mil/Press-Office/News-Stories/Article/3578783/us-navy-destroyer-conducts-freedom-of-navigation-operation-in-the-south-china-s/>

penerbangan di wilayah yang dianggap merupakan perairan internasional.<sup>3</sup>  
(Lihat Lampiran 5)

Pada akhir tahun 2019, nelayan-nelayan China dengan dukungan dari Pemerintahnya, sengaja memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di wilayah Laut Natuna Utara, karena dianggap sebagai bagian dari area *traditional fishing ground* mereka. Indonesia menganggap bahwa klaim sepihak China tersebut bersifat unilateral karena hanya didasarkan pada landasan sejarah, yang tidak diakui hukum laut internasional, yaitu *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982<sup>4</sup>. Untuk itu, guna mencegah dan menangkal segala aktivitas yang berpotensi mengganggu, mengancam, dan membahayakan wilayah kedaulatan NKRI, diperlukan kehadiran nyata TNI sebagai Komponen Utama pertahanan negara yang berkewajiban untuk menyelenggarakan pertahanan negara dalam bentuk penggelaran kekuatan TNI.

Sengketa LCS adalah isu yang kompleks dan belum ada solusi konkret untuk memecahkannya. Adanya sengketa klaim wilayah dari berbagai negara, serta pentingnya perairan tersebut secara geopolitik, menempatkannya sebagai titik rawan potensi terjadinya konflik terbuka di regional. Pasca Perang Dunia II, AS merupakan satu-satunya kekuatan militer dominan di wilayah Indo-Pasifik. Sementara itu, China dalam beberapa dekade terakhir dengan kekuatan ekonomi dan militernya telah tumbuh menjadi kekuatan besar (*super power*)<sup>5</sup> yang berambisi untuk menjadi kekuatan hegemoni baru di regional maupun global.

Konflik di LCS akan berdampak negatif bagi Indonesia yang berbatasan langsung dengan LCS yaitu terancamnya stabilitas dan keamanan wilayah Indonesia, terganggunya jalur perdagangan, pelayaran, dan penerbangan Indonesia, terhambatnya kerja sama ekonomi di kawasan, serta meningkatnya risiko terjadinya *spillover*<sup>6</sup> konflik ke dalam wilayah Indonesia. Indonesia tidak ingin terlibat dalam konflik bersenjata di LCS, namun konflik

<sup>3</sup> <https://www.gisreportsonline.com/r/u-s-navy/>

<sup>4</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-unclos--dasar-hukum-internasional-untuk-kedaulatan-indonesia-di-natuna-lt5e16f5b67589c/>

<sup>5</sup> <https://www.csis.org/analysis/chinas-emergence-superpower>

<sup>6</sup> <https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/479>

tersebut dapat mengancam keamanan dan kepentingan nasional Indonesia jika terjadi eskalasi yang terus meningkat.

Menyikapi perkembangan lingkungan strategis baik, global, regional dan nasional yang sedemikian cepat, kompleks dan dinamis, bangsa Indonesia harus tetap menjaga eksistensinya. Hal ini tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, alinea ke-4 yakni, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dinyatakan bahwa pertahanan negara merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional. Lebih lanjut dinyatakan bahwa pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.<sup>7</sup>

Pimpinan TNI pada tahun 2018 telah mengambil kebijakan untuk membangun sistem pertahanan negara di Natuna<sup>8</sup>, yaitu dengan membentuk Satuan TNI Terintegrasi (STT). Natuna lokasinya sangat strategis karena berbatasan langsung dengan LCS sehingga berperan sebagai garda terdepan pertahanan negara diharapkan STT tersebut mampu merespon dan bertindak secara cepat dalam menghadapi ancaman yang datang dari luar. Sebagai bentuk dukungan kebijakan di atas, TNI Angkatan Udara melalui Satuan Radarnya telah menggelar 2 radar canggih yang berkemampuan aktif dan pasif di bawah, serta membentuk Skadron Udara tanpa awak berkemampuan intai (*surveillance*) maupun tempur (*combat*) yang dilengkapi rudal udara ke darat. Dari TNI Angkatan Laut, selain ada Pangkalan TNI Angkatan Laut Ranai dan Fasilitas Pelabuhan (Faslabuh), juga terdapat Kompi Komposit Marinir. Adapun TNI Angkatan Darat telah menggelar alutsista kendaraan tempur peluncur roket Astros II MK6 di Batalyon Komposit mereka di Natuna. Menyadari dinamika ancaman dan kemungkinan terburuk yang dapat terjadi di kawasan LCS, dihadapkan

---

<sup>7</sup> Presiden RI I, Ir. Soekarno. 1965.

<sup>8</sup> Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1312/XII/2018 Tanggal 10 Desember 2018 Tentang Pembangunan Prioritas Pulau Terluar Tertentu dan Daerah yang Bersifat Strategis.

dengan kekuatan, kemampuan, serta penggelaran alutsista TNI saat ini di Natuna, maka perlu adanya kebijakan dan strategi lebih lanjut demi mewujudkan postur pertahanan negara yang kuat dan modern.

Sebagai komponen utama pertahanan negara, kekuatan TNI merupakan faktor utama dalam pertahanan negara, yang memerlukan kebijakan dalam pengembangan strategi dan pembangunan kekuatan TNI. Pada kenyataannya, salah satu kebijakan kekuatan TNI dalam bentuk *Minimum Essential Force* (MEF) TNI atau Kekuatan Pokok TNI, masih jauh dari target. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Kekuatan Pokok atau MEF ditargetkan sudah mencapai 100%. Hingga awal tahun 2023, MEF TNI Angkatan Udara (AU) baru mencapai 51,51%, TNI Angkatan Darat (AD) 76,23%, dan TNI Angkatan Laut 59,69%. Secara keseluruhan pada 2021, Kekuatan Pokok TNI baru mencapai sebesar 62,31%<sup>9</sup>. Dengan kondisi keterbatasan alokasi anggaran belanja pertahanan ini, salah satu dampaknya adalah ketiga Matra TNI menghadapi kesulitan dalam membangun dan mewujudkan postur pertahanan negara yang ideal.

Mencermati situasi geopolitik regional di LCS yang berpotensi terjadinya konflik militer secara terbuka dan dalam mengantisipasi eskalasi konflik di LCS, maka perlu adanya langkah-langkah strategis. Salah satu upaya/strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan pertahanan negara.

## 2. Rumusan Masalah.

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu: **“Bagaimana mengoptimalkan pertahanan negara dalam mengantisipasi eskalasi konflik di Laut China Selatan guna menjaga kepentingan nasional?”**. Dalam hal ini, penting dilakukan kajian yang menyeluruh karena Laut China Selatan (LCS) merupakan area strategis yang menjadi sorotan dunia internasional.

<sup>9</sup> <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/17/mef-dinilai-sulit-terpenuhi-militer-butuh-strategi-baru>

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan kajian yang diajukan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana posisi strategis Indonesia dalam konflik di LCS ? Berikutnya, apa saja skenario terburuk yang mungkin terjadi akibat eskalasi konflik tersebut ?
- b. Bagaimana kondisi pertahanan Indonesia dihadapkan kepada eskalasi konflik di LCS ?
- c. Apa langkah-langkah konkret yang dapat diambil Indonesia sebagai strategi untuk mengoptimalkan pertahanan negara guna menjaga kepentingan Nasionalnya ?

### 3. Maksud dan Tujuan.

- a. **Maksud.** Maksud penyusunan Taskap ini adalah untuk mendapatkan gambaran sekaligus memberi masukan terkait upaya optimalisasi pertahanan negara dalam mengantisipasi eskalasi konflik di LCS guna menjaga kepentingan Nasional.
- b. **Tujuan.** Tujuan dari penulisan Taskap ini adalah untuk memberi sumbangan pemikiran dan rekomendasi kepada pemangku kepentingan yang terkait, sebagai upaya optimalisasi pertahanan negara dalam mengantisipasi eskalasi konflik di LCS guna menjaga kepentingan Nasional.

### 4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

- a. **Ruang Lingkup.** Ruang lingkup dalam naskah ini dibatasi pada identifikasi dan analisis eskalasi konflik di LCS serta bagaimana upaya mengoptimalkan pertahanan negara, khususnya terkait Komponen Utama, melalui konsep *softpower*, *hardpower* dan *smartpower*.
- b. **Sistematika.** Mengacu pada petunjuk teknis format penyusunan kertas karya ilmiah perseorangan (Taskap), maka sistematika dalam penulisan naskah Taskap ini adalah sebagai berikut :

#### 1) **BAB I PENDAHULUAN.**

Meliputi latar belakang dan fakta-fakta terkait judul Taskap, rumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan

sistematika, metode dan pendekatan, serta pengertian atau definisi yang digunakan dalam kajian ini.

2) **BAB II LANDASAN PEMIKIRAN.**

Berisi landasan pemikiran yang mempengaruhi pertanyaan-pertanyaan kajian dan pencapaian simpulan yang akan digunakan dalam analisis, seperti perundang-undangan, data/fakta yang ada, kerangka teoritis yang akan digunakan diantaranya: **Teori Perspektif Liberalisme dan Realisme**, teori **Sinergi Strategis**, teori **Prioritas Strategis**, teori **Optimalisasi**, dan teori **Pencegahan (Deterrence)**. Adapun metode analisis yang digunakan adalah PESTLE (*Political/Politik, Economic/Ekonomi, Social/Sosial, Technological/Teknologi, Law/Hukum, dan Environment/Lingkungan*). Selain itu, Bab ini juga berisi bahasan lingkungan strategis yang menjelaskan kondisi geopolitik kawasan, meliputi kondisi geografis, demografis, sumber kekayaan alam, politik, perekonomian, dan pertahanan keamanan.

3) **BAB III PEMBAHASAN.**

Bab ini berisi identifikasi dan analisis terhadap skenario-skenario yang mungkin terjadi di LCS. Pembahasan berikutnya berupa identifikasi dan analisis terhadap kondisi pertahanan negara Indonesia yang dinilai menjadi sumber masalah, dihadapkan dengan dinamika dan potensi konflik di LCS saat ini. Dari pembahasan tersebut, berdasarkan teori-teori yang ada kemudian disampaikan beberapa alternatif strategi baik *softpower*, *hardpower*, maupun *smartpower* yang bisa dilakukan sebagai langkah kongkret untuk mengoptimalkan pertahanan negara dalam mengantisipasi eskalasi konflik di LCS.

4) **BAB IV PENUTUP.**

Berisi simpulan beserta rekomendasi yang disampaikan kepada Pemerintah untuk dapat mengoptimalkan pertahanan negara dalam mengantisipasi eskalasi konflik di LCS guna menjaga kepentingan nasional.

## 5. Metode dan Pendekatan.

- a. **Metode.** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk menyajikan uraian secara sistematis, cermat, dan faktual.<sup>10</sup> Adapun sumber data yang digunakan dalam penyusunan Taskap ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari hasil pengumpulan yang dilakukan oleh pihak lain di luar peneliti<sup>11</sup>. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Mabes Angkatan, publikasi jurnal, laporan, dan sumber lainnya.
- b. **Pendekatan.** Dalam penyusunan Taskap ini, digunakan pendekatan perspektif kepentingan nasional, dengan analisis ilmu multidisiplin sesuai dengan kerangka teoritis yang telah ditetapkan.

## 6. Pengertian.

Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terkait istilah-istilah yang digunakan dalam penyusunan Taskap ini, maka perlu diberikan penjelasan beberapa pengertian antara lain:

- a. **Ancaman.** Adalah setiap tindakan dan aktivitas, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar negeri, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, integritas wilayah NKRI, serta keselamatan seluruh rakyat Indonesia<sup>12</sup>.
- b. **Air Defense Identification Zone (ADIZ).** Adalah ruang udara yang ditentukan dimensi dan di mana pesawat udara diharuskan untuk mengikuti prosedur identifikasi khusus dan/atau pelaporan tambahan di luar prosedur yang berkaitan dengan penyediaan layanan lalu lintas udara (ATS)<sup>13</sup>. Secara umum, ADIZ adalah suatu zona udara yang dideklarasikan oleh negara untuk meningkatkan keamanan nasional melalui prosedur identifikasi dan pengendalian pesawat udara yang masuk atau melintasi wilayah udara negara tersebut.

<sup>10</sup> Creswell JW. 2014. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Singapore (SG): Sage Publication

<sup>11</sup> Sanusi A. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Jakarta (ID): Salemba Empat

<sup>12</sup> Dephan RI, "Doktrin Hanneg", (Jakarta, 2007), hal 19

<sup>13</sup> ICAO. Annex 4.

- c. **Anti-Access/Area Denial (AA/AD).** Adalah strategi yang digunakan untuk mengontrol akses ke dan dalam wilayah suatu negara, dengan tujuan untuk mencegah musuh/pihak yang tidak dikehendaki dari luar memasuki atau beroperasi dalam wilayah tersebut.
- d. **Capability Based Planning.** Adalah perencanaan pembangunan kekuatan untuk mencapai tingkat kekuatan tertentu yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan tugas dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran dan aset negara yang dimiliki<sup>14</sup>.
- e. **Code of Conduct (CoC) of Parties on the South China Sea.** Adalah serangkaian pedoman dan prinsip yang bertujuan untuk mempromosikan penyelesaian sengketa di LCS melalui cara-cara damai, dialog, negosiasi, dan kerjasama di wilayah tersebut.
- f. **Claimant State.** Adalah negara yang mengklaim kepemilikan atau kedaulatan atas suatu wilayah yang dipersengketakan, khususnya dalam konteks sengketa teritorial. Klaim dimaksud seringkali didasarkan pada alasan historis, geografis, atau hukum internasional seperti UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*)<sup>15</sup>.
- g. **Contingency Planning.** Adalah rencana cadangan atau rencana alternatif yang disiapkan untuk mengantisipasi terjadinya perubahan atau kondisi tak terduga.
- h. **Eskalasi.** Adalah proses peningkatan atau perburukan situasi konflik atau ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat yang merujuk pada meningkatnya intensitas konflik, pertikaian, atau bahkan kekerasan antar negara.
- i. **Flashpoint.** Adalah situasi, lokasi, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk memicu kekerasan atau konflik lebih lanjut.
- j. **Hard power.** Adalah kemampuan suatu negara atau entitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain melalui kekuatan militer, tekanan ekonomi, atau ancaman kekerasan.

<sup>14</sup> Permenhan RI No 19 Tahun 2012, "Kebijakan Penyelarasan MEF Komponen Utama"

<sup>15</sup> <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1668175/FULLTEXT01.pdf>

k. **Kepentingan Nasional.** Adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan.

l. **Konflik.** Adalah situasi ketika dua atau lebih pihak memiliki ketidaksepakatan, berlawanan, atau pertentangan dalam kepentingan, nilai, atau tujuan tertentu.

m. **Optimalisasi.** Adalah proses atau tindakan untuk membuat atau mencapai hasil yang paling efisien atau efektif dalam suatu situasintertentu. Hal ini melibatkan penggunaan sumber daya yang ada secara maksimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

n. **Pertahanan negara.** Adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

o. **Soft power.** Adalah kemampuan atau pengaruh yang dimiliki seseorang, kelompok, atau negara untuk mencapai tujuan politik atau tujuan lainnya melalui kebijakan luar negeri, diplomasi yang efektif, atau nilai-nilai yang dihormati secara universal, daripada melalui kekuatan militer atau tekanan ekonomi

p. **Strategi Pertahanan Negara.** Adalah strategi negara untuk mencegah, menangkal dan mengatasi ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara dalam berbagai bentuk dan perwujudannya.

q. **Palagan.** Adalah area atau tempat di mana terjadi peristiwa atau perkembangan militer penting, yang bisa meliputi ruang udara, ruang angkasa, daratan, atau lautan di mana operasi peperangan berlangsung

r. **Sistem Pertahanan Negara.** Adalah sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan Sumber Daya Nasional (SDN) lainnya, serta disiapkan secara awal oleh pemerintah dan dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menjaga kedaulatan negara, integritas wilayah, dan keamanan seluruh rakyat dari berbagai ancaman.

- s. **Spillover (Effect of Conflict).**<sup>16</sup> Adalah dampak atau pengaruh yang ditimbulkan oleh konflik di satu area atau domain terhadap area atau domain lainnya yang sebenarnya tidak terkait langsung.
- t. **Situational Awareness (SA).** Adalah persepsi seseorang terhadap elemen lingkungan dan peristiwa yang terjadi dengan acuan ruang dan waktu, disertai dengan pemahaman maknanya dan perkiraan statusnya di masa depan. SA sangat penting dalam pengambilan keputusan karena memungkinkan orang untuk memahami situasi yang sedang terjadi dan memproyeksikan perkembangan situasi di masa depan.
- u. **Ten-Dash Line.** Adalah peta terbaru yang dikeluarkan pemerintah China pada tahun 2023 secara unilateral sebagai bentuk penegasan klaim maritim wilayah LCS.<sup>17</sup>
- v. **Threat Based Planning.** Adalah pendekatan perencanaan yang berfokus pada mengidentifikasi dan mengatasi ancaman atau ancaman potensial yang mungkin dihadapi oleh suatu organisasi atau entitas.
- w. **United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.** Adalah hukum laut yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan laut dan sumber daya laut secara adil dan berkelanjutan. UNCLOS mengatur hak dan kewajiban negara-negara yang berbatasan dengan laut, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan lain-lain.
- x. **Workshop.** Adalah pertemuan atau kegiatan di mana sekelompok orang terlibat dalam diskusi intensif dan aktivitas praktis tentang topik atau proyek tertentu.

---

<sup>16</sup> <https://pluang.com/blog/glossary/spillover-effect-adalah>

<sup>17</sup> <https://japan-forward.com/chinas-new-ten-dash-line-map-infuriates-asian-neighbors/>

## BAB II LANDASAN PEMIKIRAN

### 7. Umum.

Perkembangan lingkungan strategis global, regional, dan nasional saat ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kondisi pertahanan negara. Di tingkat regional, Indonesia dihadapkan pada kebijakan AS yang menganggap kawasan Asia Pasifik khususnya LCS sebagai kawasan internasional yang penting untuk dijaga dan dipertahankan netralitasnya. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, dari aspek politik dan keamanan, AS telah menggalang aliansi militer dengan negara-negara di kawasan maupun sekutunya di Eropa. Di sisi lain, munculnya China sebagai kekuatan baru di bidang ekonomi dan militer, seolah hendak menggerus hegemoni kekuatan AS di kawasan. Selain itu, permasalahan tumpang tindih klaim di LCS oleh negara-negara *claimant states* menjadi salah satu akar permasalahan yang seolah tiada ujung pangkal penyelesaiannya, menjadikan isu eskalasi konflik di LCS suatu hal yang patut untuk dicermati dan disikapi oleh Indonesia.

Di sisi lain, kondisi pertahanan negara Indonesia saat ini menghadapi keterbatasan. Padahal dalam konteks eskalasi konflik di LCS, dibutuhkan pertahanan negara yang kuat dan dinamis. Meskipun bukan termasuk *claimant states*, namun posisi geografis Indonesia yang strategis baik di perairan Natuna Utara, maupun di jalur ALKI yang terhubung ke LCS, memiliki tingkat kerawanan yang tinggi dan berpotensi terlibat dalam konflik di LCS secara tidak langsung.

Dalam rangka menjaga kepentingan nasional dan mengantisipasi dampak eskalasi konflik LCS, penting untuk memiliki landasan pemikiran yang kuat. Landasan pemikiran tersebut didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Paradigma Nasional, yaitu Pancasila sebagai landasan idiil, UUD NRI 1945 sebagai landasan konstitusional, Wawasan Nusantara sebagai landasan visionil, dan Ketahanan Nasional sebagai landasan konseptual. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang berlaku juga perlu menjadi dasar dalam optimalisasi pertahanan negara. Untuk

menganalisis permasalahan ini, digunakan beberapa teori dan hasil studi kepustakaan yang saling terkait dan diuraikan secara rinci dalam pembahasan bab ini.

## **8. Peraturan Perundang-Undangan.**

### **a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.**

Dalam pasal 1 ayat (2), dijelaskan bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan SDN lainnya. Sistem ini harus dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan dilaksanakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan seluruh bangsa dari berbagai ancaman.

### **b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).**

Dalam pasal 1, ayat 5 menjelaskan, bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Pada pasal 1, ayat 6 menjelaskan bahwa Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan SDN lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman. Sedangkan pada pasal 7, ayat 1 menjelaskan tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

**c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.**

Dalam Pasal 3 UU tersebut dijelaskan bahwa RPJPN merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Tujuan tersebut meliputi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. RPJPN dirumuskan dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional. Dalam perencanaan pembangunan nasional Indonesia, penting untuk memperhatikan kondisi pertahanan negara di perbatasan, terutama dalam mengantisipasi dampak eskalasi konflik di LCS. Hal ini dikarenakan pembangunan nasional harus merata di berbagai bidang dengan skala prioritas dan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

**d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).**

Konvensi PBB ini merupakan langkah penting dalam mengakui Indonesia sebagai Negara Kepulauan. Sebagai Negara Kepulauan, Indonesia terdiri dari satu atau lebih kepulauan yang membentuk kesatuan geografi, ekonomi, dan politik yang hakiki. Pengakuan internasional ini mendorong Indonesia untuk menyediakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sebagai jalur pelayaran yang dapat digunakan oleh pengguna laut melintasi wilayah Indonesia. Kawasan LCS (Laut Natuna) menjadi salah satu jalur strategis yang harus dijaga stabilitasnya untuk memastikan keamanan regional dan kepentingan nasional Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban alur pelayaran internasional demi kelancaran perdagangan internasional. Jika terjadi konflik di kawasan LCS, akan berdampak pada keamanan regional di wilayah tersebut.

**e. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.**

Undang-undang ini mengatur bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah yang terdiri dari daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, dasar laut, tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Meskipun ada kawasan perbatasan yang tidak berpenghuni, namun banyak juga yang dihuni oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan layanan dan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah perbatasan, termasuk infrastruktur pendidikan. Penataan ruang dilakukan dengan tujuan menciptakan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, berdasarkan prinsip Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Hal ini mencakup harmonisasi antara lingkungan alam dan buatan, penggunaan sumber daya alam dan buatan yang terpadu dengan memperhatikan sumber daya manusia, serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

**f. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024.**

Kebijakan Umum Pertahanan Negara merupakan salah satu fungsi pertahanan negara yang dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan Rakyat Semesta, bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan segenap bangsa dari berbagai bentuk ancaman. Pada dasarnya, pertahanan negara Republik Indonesia adalah segala upaya pertahanan yang bersifat menyeluruh yang didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan internal. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan wilayah laut yang sangat luas serta penduduk yang sangat beragam, menghadapi ancaman baik dari segi militer maupun nir-militer. Oleh karena itu, diperlukan kekuatan pertahanan yang dapat menghadapi kedua jenis ancaman tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menghadapi ancaman yang mungkin muncul, sangat

penting untuk memiliki sistem pertahanan negara yang handal dan memiliki daya tangkal yang tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI secara berkelanjutan.

## 9. Data/Fakta.

Beberapa data/fakta terkait dinamika LCS saat ini adalah sebagai berikut :

### a. Anggaran Pertahanan China.

Selama dekade terakhir, belanja pertahanan China telah meningkat secara signifikan, mencapai hampir 2 (dua) kali lipat dari jumlah awalnya. Peningkatan ini telah berdampak besar terhadap keseimbangan kekuatan militer secara global, terutama di sekitar China. Pada tahun 2013, anggaran pertahanan China sebesar \$116,3 miliar. Namun, pada tahun 2024 meningkat pesat menjadi \$230,6 miliar (lihat Lampiran 6). Bandingkan dengan anggaran belanja pertahanan Indonesia tahun 2024 yang hanya sebesar \$25 miliar<sup>18</sup> atau Singapura yang sebesar \$11-15 miliar. Pada tahun 2021, China telah menghabiskan lebih banyak untuk pertahanan daripada gabungan anggaran belanja 17 negara Indo-Pasifik (lihat Lampiran 7). Peningkatan belanja pertahanan China ini sejalan dengan upaya modernisasi yang telah dilakukan selama lebih dari dua dekade. Modernisasi militer China dimulai setelah krisis Selat Taiwan pada tahun 1995-1996, yang mengungkapkan kelemahan dalam kemampuan China untuk melawan intervensi asing dalam sengketa kedaulatan.<sup>19</sup>

Selain itu, peningkatan belanja pertahanan China juga merupakan respons terhadap kebijakan domestik yang sebelumnya membuat anggaran pertahanan China stagnan. Peningkatan anggaran belanja pertahanan China ini telah didukung oleh beberapa program pengadaan yang berprofil tinggi, reformasi militer, serta perubahan doktrin dan strategi dalam Tentara Pembebasan Rakyat. Perubahan ini

<sup>18</sup> <https://news.detik.com/berita/d-7068918/pemerintah-diminta-tunda-kenaikan-anggaran-di-kemenhan-untuk-2024>

<sup>19</sup> <https://www.britannica.com/event/Taiwan-Strait-crises>

telah memungkinkan China untuk memainkan peran yang lebih besar dalam keamanan regional dan global. Beberapa upaya yang dilakukan China, seperti partisipasinya dalam operasi penjaga perdamaian PBB, upaya anti-pembajakan, serta bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, telah diakui sebagai kontribusi yang positif dalam tata kelola global. Namun, di sisi lain, upaya China untuk memajukan kepentingan keamanannya terkait Taiwan, Laut China Timur, dan LCS, telah meningkatkan ketegangan hubungannya dengan aktor regional lainnya.<sup>20</sup>

**b. Anggaran Pertahanan Indonesia.**

Sejak 1 (satu) dekade lalu, anggaran pertahanan Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan secara bertahap (lihat Lampiran 8 Gambar 5)<sup>21</sup>. Pada awal periode tersebut, anggaran pertahanan cenderung stabil. Namun, dengan meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Asia Tenggara terkait klaim maritim dan keamanan laut, pemerintah Indonesia mulai memberikan prioritas yang lebih besar pada sektor pertahanan. Periode 2013-2022 ditandai dengan peningkatan anggaran yang cukup konsisten, mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperkuat kemampuan pertahanan negara. Bahkan pada tahun 2022, pasca pandemi Covid, terjadi peningkatan yang lebih dramatis dalam anggaran pertahanan (lihat Lampiran 8 Gambar 6)<sup>22</sup>. Hal ini sejalan dengan perubahan strategis dalam kebijakan pertahanan Indonesia yang semakin menekankan modernisasi alutsista (alat utama sistem persenjataan) dan peningkatan kapabilitas militer. Pada tahun-tahun terakhir periode tersebut, anggaran pertahanan Indonesia mencapai rekor tertinggi dalam sejarah.

<sup>20</sup> <https://chinapower.csis.org/military-spending/>

<sup>21</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/05/hut-ke-78-tni-berapa-anggaran-militer-ri-selama-23-tahun-terakhir>

<sup>22</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/04/ini-perbandingan-anggaran-pertahanan-era-sby-dan-jokowi>

Anggaran belanja pertahanan Indonesia saat ini menunjukkan beberapa fakta dan data yang penting sebagai berikut.<sup>23,24</sup>

1) **Anggaran Kementerian Pertahanan 2024.**

a) Anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk tahun 2024 mencapai Rp 139 triliun, yang merupakan peningkatan dari Rp 134 triliun pada tahun 2023.

b) Anggaran Kemenhan periode 2020-2024 mencapai Rp 692,92 triliun, yang merupakan anggaran terbesar di antara kementerian lainnya.

2) **Pembelian Alutsista.**

a) Anggaran Kemenhan tidak hanya digunakan untuk pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista) bekas, tetapi juga untuk kesejahteraan prajurit, riset, dan pengembangan sumber daya manusia.

b) Pada tahun 2024, anggaran untuk modernisasi alutsista, non-alutsista, dan sarpras pertahanan mencapai Rp 43 triliun, yang merupakan penurunan sekitar Rp 8,4 triliun atau 16,3% jika dibandingkan dengan proyeksi realisasi anggaran pada 2023<sup>25</sup>.

3) **Pengeluaran Tahunan.**

a) Pada 2020, anggaran Kemenhan mencapai Rp 136,9 triliun, yang kemudian menyusut menjadi Rp 125,9 triliun. Namun, pada 2022, anggaran tersebut kembali meningkat menjadi Rp 150,4 triliun.

b) Pada 2023, anggaran Kemenhan turun menjadi Rp 134,32 triliun, dengan Rp 70,9 triliun digunakan untuk belanja<sup>26</sup>.

4) **Program Modernisasi.**

Pemerintah telah memberikan perhatian besar pada sektor pertahanan sejak 2019, dengan peningkatan alokasi anggaran

<sup>23</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1819408/ramai-dibahas-saat-debat-ini-rincian-anggaran-kementerian-pertahanan-dari-2020-2024>

<sup>24</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240108065321-4-503598/heboh-anggaran-kemenhan-rp700-t-pernah-dipangkas-saat-covid>

<sup>25</sup> <https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-pemilu/2792950/ini-fakta-lengkap-anggaran-alutsista-indonesia-dari-tahun-ke-tahun>

<sup>26</sup> Ibid

untuk pertahanan menjadi pokok pembahasan dalam konteks pemulihan ekonomi Indonesia<sup>27</sup>.

Dengan adanya peningkatan ini, menandai tekad yang kuat Indonesia untuk membangun pertahanan yang lebih tangguh dan responsif terhadap tantangan keamanan modern, serta berusaha untuk memperkuat posisinya sebagai kekuatan regional yang stabil dan memainkan peran yang lebih aktif dalam menjaga stabilitas di kawasan Asia Tenggara.

**c. Aliansi Australia-United Kingdom-United States (AUKUS).**

Aliansi AUKUS merupakan sebuah kemitraan keamanan trilateral yang didirikan pada tahun 2021 dengan fokus utama untuk membantu Australia dalam memperoleh kapal selam bertenaga nuklir serta berkolaborasi dalam bidang mekanisme *cyber* canggih, kecerdasan buatan dan otonomi, teknologi kuantum, kemampuan di bawah laut, hipersonik dan kontra-hipersonik, peperangan elektronik, inovasi, dan berbagi informasi. Tujuan dari pembentukan kemitraan ini adalah untuk memperkuat keamanan dan kepentingan strategis dari ketiga negara, terutama di wilayah Indo-Pasifik, di mana pengaruh dan militerisasi China terus berkembang.

Kemitraan trilateral ini, yang dibangun berdasarkan kerjasama keamanan mereka selama beberapa dekade, terdiri dari dua pilar. Fokus utama dari Pilar I AUKUS adalah untuk mendapatkan kapal selam bertenaga nuklir bersenjata konvensional Australia, sedangkan Pilar II menekankan pada kerjasama dalam kemampuan canggih yang melibatkan pertukaran teknologi dan informasi. Dengan adanya teknologi propulsi nuklir yang akan dibagikan oleh AS, Australia akan menjadi satu-satunya negara selain Inggris yang memiliki kapal selam dengan teknologi tersebut. Kapal selam bertenaga nuklir memiliki banyak keunggulan seperti jangkauan, ketahanan, dan kemampuan menyelip yang sangat dibutuhkan mengingat perubahan geopolitik dan dinamika pertahanan di kawasan Indo-Pasifik (lihat Gambar 6). Dalam tujuh tahun ke depan, Australia akan memprioritaskan

---

<sup>27</sup> Ibid

penguatan tenaga kerja angkatan laut dan infrastruktur untuk membangun kemampuan kapal selam bertenaga nuklir yang mandiri/*sovereign nuclear-powered* (SSN). Kapal selam SSN-AUKUS, yang menggabungkan desain Inggris dengan teknologi AS, diharapkan akan mulai beroperasi pada akhir tahun 2030-an dan diproduksi secara domestik di Australia pada awal tahun 2040-an. Selain itu, pada tahun 2027, AS dan Inggris akan men-*deploy* kapal selam bertenaga nuklir mereka sendiri di wilayah tersebut sebagai bagian dari “*Submarine Rotational Force-West*”.<sup>28</sup>

**d. *Joint Military Exercise di LCS.***

Dalam beberapa tahun terakhir, AS dan beberapa negara sekutunya di kawasan Indo-Pasifik telah menyelenggarakan latihan militer bersama di LCS, sebagai berikut :

1) Pada tahun 2023, setidaknya 3 (tiga) latihan maupun aktifitas militer yang melibatkan AS, yaitu :

a) Latihan "Balikatan 23", di mana AS dan Filipina melaksanakan latihan bersama untuk berlatih taktik, teknik, dan prosedur berbagai operasi militer. Latihan ini dilakukan di lokasi yang strategis menghadap LCS dan Taiwan, menunjukkan komitmen bersama terhadap keamanan regional dan bekerja sama dalam berbagai skenario pertahanan, termasuk pelatihan perang siber dan perang informasi.<sup>29</sup>

b) Latihan "Exercise Noble Caribou" yang melibatkan negara-negara seperti AS, Jepang, dan Australia diadakan di LCS. Tujuan latihan ini adalah untuk meningkatkan kerja sama taktis dan operasional di antara angkatan laut negara-negara peserta, seraya menegaskan pentingnya kebebasan navigasi dan penerbangan sesuai hukum internasional.<sup>30</sup>

c) AS juga menggelar latihan bersama dengan Australia dan Jepang di Filipina, yang meliputi kegiatan seperti patroli bersama

<sup>28</sup> <https://www.cfr.org/in-brief/aukus-explained-how-will-trilateral-pact-shape-indo-pacific-security>

<sup>29</sup> <https://www.rappler.com/philippines/united-states-hold-military-drills-islands-facing-south-china-sea-taiwan/>

<sup>30</sup> <https://www.rfa.org/english/news/southchinasea/scs-naval-exercise-10252023033045.html>

dan latihan taktis, menunjukkan kolaborasi yang kuat antar sekutu dalam menjaga stabilitas regional.<sup>31</sup>

2) Pada tanggal 7 April 2024, Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan Filipina telah melakukan latihan angkatan laut bersama pertama mereka, termasuk pelatihan anti-kapal selam, di LCS.<sup>32</sup> Sebagai response, China pada waktu dan area yang sama melakukan patroli militer di LCS.<sup>33</sup>

#### e. Insiden di LCS.

Laut Cina Selatan telah menjadi lokasi sejumlah *incident/accident* maritime maupun udara yang signifikan melibatkan berbagai tipe perahu nelayan, kapal militer, kapal penjaga pantai, maupun pesawat militer.<sup>34</sup>(Lihat Lampiran 2). Konflik dimaksud dalam bentuk saling bertabrakan kapal, saling serang menggunakan kanon air, penangkapan nelayan/pelaut, perlakuan kasar/tidak bersahabat, dan lain-lain.<sup>35</sup> Insiden terbaru terjadi pada tanggal 18 Juni 2024 yaitu *coastguard* China bertabrakan dengan perahu Angkatan Laut Filipina yang akan mensuplai logistik di Pos Sierra madre yang dijaga oleh personel Marinir Filipina. Pos Sierra madre sendiri sesungguhnya adalah bekas kapal yang dikaramkan selanjutnya difungsikan sebagai pos di laut, berada di Terumbu Thomas Kedua, yang telah lama dianggap sebagai *flashpoint* yang dapat memicu konflik lebih besar antara AS dan China. Gedung Putih mengecam aksi China tersebut, dan menuduh China dengan sengaja menabrakkan kapalnya. Tuduhan yang tentu saja disangkal oleh China dan menuduh sebaliknya. Akibat peristiwa itu salah satu pelaut Filipina mengalami luka serius<sup>36</sup>.

<sup>31</sup> <https://news.usni.org/2023/08/27/u-s-australia-japan-drill-with-the-philippines-in-south-china-sea-china-flies-military-drone-near-taiwan>

<sup>32</sup> <https://www.military.com/daily-news/2024/04/06/us-japan-australia-and-philippines-stage-military-drills-disputed-south-china-sea.html>

<sup>33</sup> <https://www.aljazeera.com/news/2024/4/7/china-holds-combat-patrol-in-south-china-sea-amid-us-led-war-games>

<sup>34</sup> <https://csis-ilab.github.io/cpower-viz/csis-china-sea/>

<sup>35</sup> <https://www.aljazeera.com/news/2023/10/18/us-accuses-chinas-air-force-of-risky-behaviour-in-skies-above-pacific>, <https://www.theguardian.com/australia-news/2022/jun/07/a-dangerous-act-how-a-chinese-fighter-jet-intercepted-an-raaf-aircraft-and-what-happens-next>

<sup>36</sup> <https://www.cbsnews.com/news/south-china-sea-philippines-us-condemns-china-warns-violent-confrontation/>

Amerika Serikat dan Filipina memiliki perjanjian pertahanan bersama yang mengharuskan kedua negara saling membantu dalam konflik besar<sup>37</sup>. Sehari berselang insiden, juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller mengatakan bahwa Wakil Menteri Luar Negeri AS Kurt Campbell berbicara melalui telepon dengan rekan dari Filipina dan keduanya menegaskan bahwa perjanjian tersebut "berlaku untuk serangan bersenjata terhadap angkatan bersenjata Filipina, kapal publik, atau pesawat terbang, termasuk yang dimiliki oleh penjaga pantai mereka, di mana saja di Laut Cina Selatan." Oleh sebab itu, serangan terhadap kapal tersebut dapat dianggap oleh Filipina sebagai tindakan perang.

**f. Pembangunan Pulau-pulau Buatan di Wilayah Sengketa.**

Dimulai tahun 2021, Vietnam terus melaksanakan program besar untuk reklamasi (pengerukan dan penimbunan lahan) di Kepulauan Spratly. Berdasarkan laporan the Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI) pada Desember 2022, Vietnam telah menciptakan tambahan 330 acre lahan, sehingga totalnya selama periode pembangunan saat ini menjadi 750 acre. Sebagai perbandingan, Vietnam hanya telah menciptakan 120 acre lahan di Spratly antara tahun 2012 dan 2022. Semua ini setara dengan sekitar sepertiga dari lebih dari 3.200 acre lahan yang dibuat oleh China dari tahun 2013 hingga 2016, namun ini jauh lebih banyak dibandingkan perluasan pulau yang dilakukan oleh *claimant state* lainnya selain China.<sup>38</sup>

Sejak November 2023, Vietnam telah menambahkan 692 acre (280 hektar) tanah baru di Kepulauan Spratly. Sehingga total tanah yang direklamasi oleh Vietnam menjadi sekitar 2.360 acre, suatu peningkatan signifikan dari hanya 329 acre yang tercatat tiga tahun lalu. Pos terbesar Vietnam, Barque Canada Reef, hampir dua kali lipat ukurannya dalam enam bulan terakhir, tumbuh dari 238 menjadi 412 acre. Pulau tersebut sekarang memiliki panjang 4.318 meter, membuatnya mampu menampung landasan pacu sepanjang 3.000 m,

<sup>37</sup> <https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3383607/fact-sheet-us-philippines-bilateral-defense-guidelines/>

<sup>38</sup> <https://amti.csis.org/vietnam-ramps-up-spratly-island-dredging/>

mirip dengan yang ditemukan di pos terbesar China - Fiery Cross, Mischief, dan Subi Reefs. Perluasan ini merupakan bagian dari strategi lebih luas untuk meningkatkan kemampuan militer dan logistik Vietnam di wilayah tersebut.<sup>39</sup> Upaya Vietnam sejauh ini tetap terfokus terutama pada reklamasi, dengan pembangunan infrastruktur yang belum dimulai secara serius di sebagian besar fitur (pulau/gugusan karang).

Upaya reklamasi lahan yang luas oleh China antara 2013 dan 2015 menyebabkan penciptaan 4.650 hektar lahan baru. Meskipun mengumumkan penghentian pekerjaan reklamasi pada tahun 2015, China terus membangun infrastruktur, termasuk landasan udara dan pelabuhan militer.

**g. Satuan TNI Terintegrasi.**

Kepulauan Natuna memiliki posisi strategis sebagai beranda paling depan Indonesia menuju Laut Natuna, yang berbatasan dengan LCS. Kondisi ini membuat pulau-pulau di Kepulauan Natuna menjadi sangat penting dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia di perairan tersebut. Satuan TNI Terintegrasi (STT) Natuna adalah sebuah satuan pertahanan yang terletak di pulau Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Satuan ini merupakan hasil dari integrasi tiga matra TNI (Tentara Nasional Indonesia), yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU), dengan tujuan memperkuat penjagaan kedaulatan wilayah Indonesia, terutama di perbatasan laut yang strategis. STT Natuna diresmikan pada tanggal 18 Desember 2018 oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Peresmian ini merupakan langkah finalisasi dari program perencanaan strategis jangka menengah TNI, yang bertujuan untuk membangun kekuatan TNI yang mampu memberikan daya tangkal (*deterrence effect*) terhadap ancaman di perbatasan LCS.

Satuan TNI Terintegrasi Natuna berfungsi sebagai satuan penangkal utama di perbatasan sekaligus dapat bertindak sebagai

---

<sup>39</sup> <https://www.firstpost.com/explainers/how-vietnam-is-growing-bigger-by-building-islands-in-south-china-sea-13781327.html>

Pangkalan Aju Operasi TNI (*FOB/Forward Operation Base*) bila dibutuhkan. STT di pulau terluar dan daerah strategis harus memiliki lapangan terbang, rumah sakit terintegrasi, fasilitas perbaikan, dan atau memiliki fasilitas logistik lainnya, dan dapat digunakan bersama dengan satuan lainnya. Sebagai FOB/Pangkalan Aju, STT Natuna berfungsi memberikan dukungan operasional kepada satuan TNI yang beroperasi di LCS, sehingga satuan operasional yang berada di garis depan memiliki sustainability/kedayatahan yang lebih panjang dalam melaksanakan operasi.<sup>40</sup> STT Natuna memiliki peran penting dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia di perairan laut yang strategis. Dengan adanya satuan ini, TNI dapat memberikan respon cepat dan terpadu terhadap ancaman yang mungkin datang dari berbagai arah, termasuk dari laut.

Pembangunan STT Natuna merupakan bagian dari upaya TNI untuk memperkuat kekuatan pertahanan di perbatasan. Proses pembangunan ini melibatkan perencanaan yang meluas, dari Mabes TNI hingga Mabes Angkatan. Satuan ini akan terus berkembang sesuai dengan peningkatan eskalasi ancaman, dengan tujuan akhir menjadi organisasi permanen dan terintegrasi dalam satu komando, dilengkapi dengan sistem kendali operasi berbasis kemampuan *network centric warfare*. Dengan adanya STT Natuna, TNI dapat lebih efektif melindungi wilayah ini dari ancaman yang mungkin datang dari berbagai arah.

Keberadaan Satuan TNI Terintegrasi (STT) di Natuna, sebagai wujud kebijakan pembangunan prioritas pulau terluar tertentu dan daerah bersifat strategis, sejak dibentuk tahun 2018, pada kenyataannya hingga saat ini hanya terdiri dari 1 batalyon komposit TNI AD dan 1 kompi Marinir, yang minim baik dari segi pengawakan personel maupun alutsista yang digelar.

---

<sup>40</sup> Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1312/XII/2018 Tanggal 10 Desember 2018 Tentang Pembangunan Prioritas Pulau Terluar Tertentu dan Daerah yang Bersifat Strategis

## 10. Kerangka Teoretis.

### a. Teori Perspektif Liberalisme dan Realisme dalam Ilmu Hubungan Internasional oleh Immanuel Kant..

Immanuel Kant merupakan pemikir etika yang memperkenalkan konsep perdamaian internasional melalui negosiasi dan hukum internasional. Teori perspektif liberalisme dan realismenya merupakan dua pendekatan utama dalam kajian hubungan internasional. Liberalisme menekankan pada pentingnya aktor-aktor non-negara, seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan masyarakat sipil, dalam mempengaruhi dinamika global. Aliran ini memandang kerja sama internasional dan interdependensi ekonomi sebagai sarana untuk mencapai perdamaian dan kemakmuran bersama. Di sisi lain, realisme melihat politik internasional sebagai arena persaingan kekuatan di antara negara-negara yang berusaha memaksimalkan kepentingan nasional mereka. Pendekatan ini menekankan pada pentingnya kekuatan militer, keseimbangan kekuatan, dan sifat egoistis negara dalam mencapai tujuannya. Meskipun berbeda, kedua perspektif ini menyediakan kerangka teoretis yang berguna untuk memahami kompleksitas hubungan internasional dan perilaku aktor-aktor global.

### b. Teori Sinergi Strategis oleh Peter Senge.

Peter Senge dalam bukunya, *The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization* (1990) mengemukakan suatu konsep yang menekankan pentingnya kerja sama dan sinergi antar individu maupun unit dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Teori Sinergi Strategis merupakan sebuah konsep dalam manajemen strategik yang berfokus pada penciptaan nilai tambah melalui kolaborasi dan integrasi di antara berbagai organisasi atau unit. Teori ini didasarkan pada pemahaman bahwa ketika dua atau lebih entitas yang saling terkait bergabung, mereka dapat menghasilkan sinergi yang melebihi jumlah kontribusi individual mereka. Melalui penggabungan sumber daya, kompetensi inti, dan kemampuan yang berbeda, organisasi dapat mencapai efisiensi operasional dan

peningkatan daya saing yang tidak dapat diperoleh jika beroperasi secara terpisah. Teori Sinergi Strategis mendorong organisasi untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang kolaborasi yang strategis, baik melalui aliansi, joint venture, akuisisi, maupun bentuk kemitraan lainnya.

**c. Teori Prioritas Strategis oleh Michael Porter.**

Porter memperkenalkan konsep prioritas strategis dalam bukunya *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors* (1980). Konsep ini menekankan pentingnya memilih satu atau dua prioritas strategis yang dapat memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan bagi perusahaan. Dalam implementasinya, menekankan pentingnya fokus pada beberapa area kunci yang dianggap kritis bagi keberhasilan suatu organisasi. Menurut teori ini, organisasi harus mengidentifikasi dan memprioritaskan sumber daya serta upaya pada sektor-sektor yang paling vital untuk mencapai tujuan strategis, alih-alih mencoba mengejar semua peluang yang ada. Melalui pendekatan ini, organisasi dapat mengalokasikan sumber daya secara efektif, meningkatkan efisiensi, dan memaksimalkan dampak dari inisiatif-inisiatif strategis. Pada akhirnya, Prioritas Strategis membantu organisasi untuk fokus pada apa yang paling penting, menghindari pemborosan, dan mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di pasar yang semakin kompetitif.

**d. Teori Optimalisasi oleh John R. Boyd.**

John R. Boyd, seorang perwira Angkatan Udara Amerika Serikat dan ahli teori pertempuran udara, menekankan pentingnya siklus OODA (Observation, Orientation, Decision, Action). Boyd berpendapat bahwa dalam pertempuran, kecepatan dalam mengamati, mengorientasikan diri terhadap situasi, mengambil keputusan, dan bertindak merupakan kunci keunggulan. Siklus OODA memungkinkan para pemimpin militer untuk merespons dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi di medan pertempuran, mengubah dinamika konflik sesuai kebutuhan mereka. Menurut teori ini, pengambilan keputusan cepat dan adaptasi terhadap perubahan sangat penting.

Boyd juga menggambarkan bahwa kesuksesan dalam pertempuran tidak hanya bergantung pada teknologi atau kekuatan militer semata, tetapi juga pada kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal dan efisien dalam situasi yang berubah dengan cepat. Dengan demikian, teori optimalisasi Boyd memberikan landasan penting bagi strategi adaptasi dan keunggulan kompetitif di berbagai bidang.

**e. Teori Pencegahan (*Deterrence*) oleh Thomas C. Schelling.**

Schelling adalah seorang ekonom dan ilmuwan politik Amerika yang terkenal atas kontribusinya dalam studi strategi perang dan keamanan internasional. Ia mengemukakan bahwa pencegahan konflik dapat dicapai dengan mengkomunikasikan ancaman yang jelas kepada pihak lawan, sehingga mencegah mereka untuk melakukan agresi. Pada dasarnya, teori ini menekankan pada upaya untuk mencegah suatu negara atau entitas untuk melakukan tindakan agresif atau pelanggaran terhadap pihak lain dengan cara mengancam akan memberikan konsekuensi yang tidak diinginkan jika tindakan tersebut tetap dilakukan. Prinsip utama dari teori ini adalah menciptakan semacam "keseimbangan rasa takut" di antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga masing-masing pihak akan berpikir berkali-kali sebelum memutuskan untuk melakukan tindakan yang dapat memicu eskalasi konflik. Teori ini telah menjadi landasan bagi berbagai strategi pertahanan dan keamanan, baik pada level global maupun regional, serta sering kali diterapkan dalam upaya-upaya mencegah terjadinya perang atau konflik bersenjata.

**11. Lingkungan Strategis.**

Lingkungan strategis (lingstra) adalah konsep yang digunakan dalam pengelolaan kekuatan nasional. Konsep ini mencakup berbagai aspek, seperti; kekayaan alam, pengelolaan sumber daya, serta kekuatan politik, ekonomi, dan militer. Lingstra ini memiliki pengaruh yang besar dan menentukan ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang kuat, tangguh, dan memiliki potensi untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mencari solusi

terhadap berbagai ancaman yang dapat membahayakan integritas, identitas, dan kelangsungan hidup bangsa.

Perkembangan Lingstra perlu diantisipasi baik dalam lingkup nasional, regional, maupun global. Lingstra ini bergerak secara dinamis dan kompleks, dan memunculkan berbagai macam ancaman, baik yang bersifat militer, nonmiliter, maupun hibrida. Untuk mengimplementasikan konsep Lingstra, pemerintah perlu melakukan kajian, pemetaan standar resiliensi, dan meningkatkan kapasitas resiliensi nasional. Kementerian Pertahanan (Kemhan) juga selalu mengikuti perkembangan dinamika Lingstra dengan menerapkan *strategy map*. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan menyiapkan prajurit TNI yang unggul serta memiliki alat utama sistem persenjataan (alutsista) modern dan mandiri.

**a. Lingkup Global.**

Dinamika global dalam aspek pertahanan dan keamanan merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk menjadi atensi dalam konteks hubungan internasional saat ini. Perubahan-perubahan yang terjadi di berbagai negara maupun di tingkat internasional dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap keamanan global secara keseluruhan. Adapun beberapa aspek penting dalam dinamika global dari segi pertahanan dan keamanan sebagai berikut:

Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa dinamika global dalam aspek pertahanan dan keamanan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor politik dan militer semata. Faktor ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi juga turut berperan penting dalam membentuk keamanan global. Misalnya, ketegangan antara negara-negara dalam persaingan ekonomi dapat memicu konflik politik yang berujung pada ketegangan militer. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat mempengaruhi keamanan global melalui serangan *cyber* atau propaganda yang merugikan suatu negara.

Kedua, dinamika global dalam aspek pertahanan dan keamanan juga dipengaruhi oleh perubahan dalam tatanan politik dunia. Perubahan rezim politik, konflik antar negara, atau pergeseran kekuatan politik di tingkat internasional dapat memberikan dampak

yang signifikan terhadap keamanan global. Sebagai contoh, konflik di Timur Tengah dapat memicu ketegangan antara negara-negara besar di dunia, seperti Amerika Serikat dan Rusia, yang dapat berujung pada konflik militer yang lebih luas.

Selain itu, dinamika global dalam aspek pertahanan dan keamanan juga dipengaruhi oleh isu-isu keamanan non-tradisional, seperti terorisme, perdagangan narkoba, dan perubahan iklim. Isu-isu ini tidak hanya mempengaruhi keamanan suatu negara secara langsung, tetapi juga dapat memiliki dampak yang lebih luas dan kompleks terhadap keamanan global. Misalnya, penyebaran terorisme internasional dapat mengancam stabilitas politik dan ekonomi suatu negara, serta mempengaruhi hubungan antar negara dalam skala yang lebih luas.

Dengan demikian, dinamika global dalam aspek pertahanan dan keamanan merupakan hal yang sangat kompleks dan memerlukan perhatian yang serius dari semua pihak. Perubahan-perubahan yang terjadi di berbagai negara maupun di tingkat internasional dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap keamanan global secara keseluruhan. Oleh karena itu, kerjasama internasional dan koordinasi antar negara sangat penting dalam menghadapi tantangan keamanan global yang semakin kompleks dan beragam.

**b. Lingkup Regional.**

Dinamika regional di LCS merupakan salah satu isu yang sangat kompleks dan menarik untuk dianalisis, terutama dalam konteks pertahanan dan keamanan. Pertama-tama, perlu dipahami bahwa LCS merupakan jalur perdagangan yang sangat penting bagi negara-negara di Asia Tenggara dan juga bagi negara-negara di luar wilayah tersebut. Laut China Selatan memiliki cadangan sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak dan gas alam, serta menjadi jalur perdagangan utama bagi ekspor dan impor barang. Oleh karena itu, keamanan dan stabilitas di wilayah ini sangat penting untuk menjaga kelangsungan ekonomi global. Di sisi lain, keamanan di LCS juga terancam oleh aktivitas ilegal seperti pencurian ikan, perompakan, dan

perdagangan manusia. Kelompok-kelompok bersenjata yang beroperasi di wilayah tersebut juga menjadi ancaman serius bagi keamanan regional. Oleh karena itu, kerjasama antara negara-negara di wilayah LCS sangat penting untuk mengatasi tantangan keamanan yang ada.

Namun, dinamika regional di LCS juga dipenuhi dengan ketegangan dan konflik antara negara-negara yang memiliki klaim terhadap wilayah tersebut. China, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan merupakan negara-negara yang saling bersaing untuk mengklaim sebagian wilayah LCS. Sengketa teritorial antara negara-negara ini sering kali memunculkan ketegangan dan konfrontasi, yang dapat mengancam perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. Dalam konteks pertahanan, ketegangan di LCS juga memicu perlombaan persenjataan antara negara-negara yang terlibat. China, sebagai negara dengan kekuatan militer terbesar di wilayah tersebut, terus meningkatkan kehadiran militer dan infrastruktur pertahanannya di LCS. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi negara-negara tetangga, yang merasa terancam oleh kekuatan militer China yang semakin berkembang pesat. (Lihat Lampiran 9).<sup>41</sup>

Pertahanan dan keamanan di LCS juga melibatkan peran besar dari negara-negara besar di luar kawasan, seperti Amerika Serikat dan Jepang, yang memiliki kepentingan strategis di kawasan Asia Pasifik. Keterlibatan negara-negara besar ini dapat memperkuat posisi negara-negara ASEAN dalam menangani isu LCS. Suatu hal penting bagi negara-negara di kawasan tersebut untuk memperkuat kerjasama regional dan meningkatkan kapasitas pertahanan dan keamanan mereka, di samping jalan dialog dan diplomasi dalam menyelesaikan konflik yang ada, sambil tetap memperhatikan kepentingan dan kedaulatan masing-masing negara.

**c. Lingkup Nasional.**

Perkembangan lingkungan strategis merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam konteks pembangunan suatu negara.

---

<sup>41</sup> <https://japannews.yomiuri.co.jp/world/asia-pacific/20211012-30525>

Lingkungan strategis dapat diartikan sebagai kondisi lingkungan yang memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan hidup suatu negara, baik dari segi politik, ekonomi, maupun sosial. Dalam konteks nasional, perkembangan lingkungan strategis menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan suatu negara.

Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan lingkungan strategis di tingkat nasional telah mengalami berbagai perubahan yang signifikan. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah globalisasi, yang telah membawa dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Globalisasi telah membuka pintu bagi masuknya investasi asing, teknologi baru, dan ide-ide baru yang dapat membawa perubahan besar dalam struktur ekonomi dan sosial suatu negara. Selain globalisasi, perkembangan teknologi juga menjadi faktor penting dalam perkembangan lingkungan strategis di tingkat nasional. Teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam cara kerja dan interaksi antarindividu, organisasi, maupun pemerintah. Dengan adanya teknologi ini, informasi dapat dengan mudah tersebar dan diakses oleh siapa saja, sehingga memungkinkan terjadinya perubahan yang cepat dan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Perkembangan lingkungan strategis di tingkat nasional juga dipengaruhi oleh faktor-faktor politik dan sosial. Perubahan rezim politik, konflik sosial, dan perubahan demografi merupakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan lingkungan strategis suatu negara. Perubahan-perubahan ini dapat membawa dampak besar terhadap stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis di tingkat nasional, pemerintah memiliki peran yang sangat penting. Pemerintah harus mampu melakukan analisis yang mendalam terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi lingkungan strategis, serta merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat untuk menghadapi tantangan-

tantangan yang ada. Pemerintah juga perlu bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, baik dari sektor swasta maupun masyarakat sipil, untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Melalui kerjasama yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, diharapkan dapat tercipta lingkungan strategis yang kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.



### BAB III PEMBAHASAN

#### 12. Umum.

Perkembangan geopolitik dunia telah mengalami banyak perubahan yang sangat dinamis. Kebijakan AS untuk lebih memperhatikan kawasan Asia-Pasifik (*pivot to Asia*) ditujukan untuk menjaga kepentingannya di kawasan dalam bentuk geopolitik dan geostrategi. Langkah ini telah mendorong China untuk meningkatkan kekuatannya di LCS guna mengamankan wilayah yang diklaimnya. Hal ini dianggap sebagai langkah China untuk mewujudkan ambisinya menjadi kekuatan terbesar kedua di dunia dalam bidang ekonomi dan militer setelah AS.

Menyikapi kondisi di LCS yang dinamis dan penuh dinamika, maka Indonesia perlu mempertimbangkan skenario-skenario terburuk yang mungkin terjadi sebagai dampak eskalasi konflik di LCS, baik di tingkat global, regional, maupun nasional. Selanjutnya, sebagai konsekuensi letak geografis Indonesia yang strategis maupun posisinya di ASEAN yang dianggap relatif netral dalam konflik di LCS, maka Indonesia sangat berpotensi menjadi penengah pihak-pihak yang bertikai. Meskipun demikian, kebijakan penguatan dan optimalisasi pertahanan negara tetap perlu ditempuh Indonesia sebagai langkah antisipasi dampak *spillover* yang tak terhindarkan jika terjadi eskalasi konflik di LCS.

Berkaca pada kondisi pertahanan negara saat ini, dari aspek sistem, strategi, postur, dan pembangunan postur pertahanan negara, maka masih ditemukan beberapa permasalahan yang mesti dicermati, antara lain; belum tersusunnya doktrin pertahanan negara yang tepat dan belum optimalnya sinergi antar komponen pertahanan. Demikian halnya dengan adanya hambatan dalam upaya memperkuat pertahanan negara sebagai upaya mengantisipasi eskalasi konflik di LCS yaitu, hingga saat ini Indonesia belum memiliki nasional *situasional awareness* tentang isu LCS maupun *contingency planning* apabila terjadi eskalasi konflik terbuka di LCS. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi yakni; keterbatasan anggaran dan keterbatasan sumber daya untuk memperkuat pertahanan negara.

Dengan memahami konteks pertahanan negara secara komprehensif yang didasarkan pada kondisi saat ini, kondisi pertahanan negara yang diharapkan, berikut hambatan dan tantangan yang ada, maka akan dapat dirumuskan kebijakan *softpower*, *hardpower*, dan *smartpower* sebagai upaya de-eskalasi konflik di LCS. Meski bukan pihak yang bersengketa secara langsung, namun sangat mungkin Indonesia dapat turut terseret dalam konflik LCS. Oleh sebab itu, sangat diperlukan langkah-langkah konkret sebagai strategi untuk mengoptimalkan pertahanan negara dalam mengantisipasi eskalasi konflik di LCS.

### **13. Posisi Strategis Indonesia dalam Konflik di LCS dan Skenario Terburuk yang Mungkin Terjadi Akibat Eskalasi Konflik di LCS.**

#### **a. Posisi Strategis Indonesia dalam Konflik di LCS.**

Posisi Indonesia dalam konflik LCS merupakan isu yang cukup kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam mengenai berbagai faktor geopolitik yang ada di kawasan tersebut. Sebagai negara maritim yang memiliki perairan luas di sekitarnya, Indonesia secara langsung terkait dengan konflik yang terjadi di LCS yang melibatkan sejumlah negara di Asia Tenggara.

Saat ini, perselisihan LCS terkait dengan kepemilikan fitur-fitur di LCS dan belum membahas isu delimitasi batas maritim. Oleh karena itu, sengketa di LCS ini melibatkan negara-negara yang saling mengklaim dan Indonesia tidak terlibat dalam perselisihan tersebut. Satu-satunya hal yang terkait dengan kepentingan Indonesia adalah adanya salah satu garis putus RRC yang diyakini berada di dalam 200 mil klaim ZEE Indonesia. Namun, posisi garis ini sulit dipastikan karena tidak ada data koordinat yang jelas menunjukkan lokasi garis tersebut. Adapun posisi Indonesia terhadap garis ini adalah sebagai berikut:

1) Indonesia bersama dengan negara-negara lain telah memprotes dan tidak mengakui eksistensi *ten dash line* dalam peta pemerintah China karena penarikan garis ini tidak sesuai dengan hukum internasional dan hukum laut internasional. Dalam konteks LCS, Indonesia melihat garis ini sebagai persoalan semua negara khususnya

para pihak pada UNCLOS dan bukan semata-mata persoalan bilateral Indonesia-China.

2) Pada perairan Natuna, Indonesia telah membuat garis perbatasan landas kontinen dengan Malaysia pada tahun 1969 dan telah didaftarkan ke PBB. Indonesia juga telah mengeluarkan Deklarasi ZEE pada tanggal 21 Maret 1980 (dan mendaftarkannya ke PBB) yang menggambarkan zona maritim selebar 200 mil laut dari garis pangkal di Natuna. Kedua instrumen ini tidak pernah diprotes oleh China. (Lihat Lampiran 10)<sup>42</sup>

3) Konsep *ten dash line* dianggap ambigu dan istilah yang digunakan pun bervariasi, seperti *relevant waters*, *historical rights*, *maritime rights*, dan *traditional fishing ground*. Selain itu, China sendiri sangat tidak konsisten dalam menjelaskan klaim ini.

4) Mengingat ketidakjelasan makna *ten dash line* ini, maka tidak mungkin terjadi tumpang tindih ZEE/landas kontinen antara Indonesia dengan China di perairan tersebut. Posisi ini juga didasarkan pada alasan-alasan berikut: pertama, *ten dash line* tidak dapat dianggap sebagai garis klaim untuk keperluan delimitasi karena penarikannya melanggar prinsip-prinsip hukum internasional dan hukum laut (*land generates maritime zones*). Kedua, dalam penetapan delimitasi batas maritim berdasarkan UNCLOS 82, negara pantai yang menggunakan prinsip garis yang ditarik dari garis pangkal bukanlah garis. Ketiga, *ten dash line* merupakan subjek gugatan yang telah diputuskan oleh Arbitral Tribunal dan dianggap melanggar UNCLOS 82.

5) Meskipun tidak ada penjelasan resmi dari China, penafsiran yang umum diterima oleh publik mengenai garis ini adalah sebagai garis alokasi yang menunjukkan bahwa pulau/karang di dalamnya diklaim oleh China. Terkait klaim China tersebut, Indonesia telah dan akan tetap netral selama klaim tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional tentang perolehan teritori (*modes of territorial acquisition*).

---

<sup>42</sup> <https://maritimnews.com/2016/12/the-power-of-map/>

Indonesia, sebagai negara yang bertetangga dengan *claimant states* dalam konflik tersebut, memiliki posisi yang strategis dalam menangani dan memediasi konflik LCS. Sebagai mediator, Indonesia memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara, sekaligus melindungi kepentingan nasional dan kedaulatan wilayahnya. Pelibatan Indonesia sebagai mediator dalam konflik LCS merupakan bentuk kontribusi nyata Indonesia dalam upaya menjaga perdamaian dunia sesuai amanat UUD NRI 1945. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip diplomasi multilateral dan kerja sama regional, Indonesia memainkan peran yang penting dalam upaya menyelesaikan konflik LCS dengan damai dan adil bagi semua pihak yang terlibat, dengan mengusung konsep ASEAN Way dan *Code of Conduct (CoC) of Parties on the South China Sea* dalam menyelesaikan persengketaan tersebut. ASEAN Way merupakan prinsip-prinsip diplomasi ASEAN yang mementingkan konsensus, dialog, dan diplomasi untuk menyelesaikan konflik tanpa melibatkan kekerasan<sup>43</sup>. Dengan demikian, Indonesia berperan sebagai mediator yang netral dan obyektif dalam menyelesaikan konflik antara negara-negara yang terlibat.

**b. Skenario Terburuk yang Mungkin Terjadi Akibat Eskalasi Konflik di LCS.**

Eskalasi konflik di LCS memiliki potensi untuk menimbulkan berbagai skenario terburuk yang berdampak pada berbagai aspek, terutama aspek pertahanan. Berikut adalah beberapa skenario tersebut:

- 1) **Tingkat global.**
  - a) **Destabilisasi global .**

Konflik di LCS memiliki potensi untuk mengganggu stabilitas global. Ketegangan antara China dan beberapa negara *claimant state* di ASEAN, serta keterlibatan kekuatan besar seperti Jepang, Australia, Prancis, dan AS, dapat memicu konflik berskala lebih besar. Amerika Serikat, yang

<sup>43</sup> <https://moderndiplomacy.eu/2022/06/22/the-use-of-the-asean-way-in-resolving-disputes/>

memiliki kepentingan strategis di kawasan, melaksanakan operasi militer mengatasnamakan kebebasan bernavigasi seolah untuk menantang klaim China atas LCS. Hal ini bisa menyebabkan eskalasi militer antara China dengan AS, dengan melibatkan sekutu-sekutu mereka dan berujung pada konflik regional. Ketidakstabilan ini dapat menciptakan ketegangan global yang berdampak pada perdamaian dunia.

b) **Gejolak ekonomi.**

Laut China Selatan adalah jalur pelayaran utama yang menghubungkan negara-negara di Asia Timur dengan pasar global. Setiap tahun, triliunan dolar barang melewati wilayah ini. Konflik yang berkepanjangan atau eskalasi militer di LCS akan mempengaruhi rantai pasokan global, perdagangan internasional, dan perekonomian global karena jalur perdagangan yang vital melalui LCS dapat terganggu. Sektor energi juga akan terpengaruh, karena wilayah ini memiliki cadangan minyak dan gas yang signifikan. Gangguan pada eksplorasi dan produksi energi di LCS dapat menyebabkan fluktuasi harga energi global, yang berdampak pada gejolak ekonomi dunia.

c) **Gangguan keamanan maritim.**

Keamanan maritim menjadi salah satu isu utama seandainya terjadi eskalasi konflik di LCS. Semenjak China mendeklarasikan LCS sebagai wilayah mereka, wilayah ini sering menjadi lokasi insiden antara nelayan, *coast guard*, kapal perang, bahkan pesawat militer dari negara-negara yang terlibat dalam klaim teritorial. Ketegangan ini dapat mengakibatkan insiden yang lebih serius, seperti bentrokan atau konfrontasi bersenjata. Jika eskalasi konflik meningkat maka dapat dipastikan kehadiran kekuatan militer maupun non militer akan meningkat, sehingga akan berpotensi terjadinya gangguan bernavigasi, ancaman keamanan, atau

insiden dengan kapal-kapal dagang ataupun pesawat komersial yang melintasi di wilayah tersebut.

2) **Tingkat regional.**

a) **Destabilisasi regional.**

Konflik di LCS bisa menyebabkan destabilisasi politik dan keamanan di seluruh kawasan Asia Tenggara. Negara-negara di kawasan ini mungkin merasa terancam dan akan meningkatkan anggaran pertahanan mereka, yang bisa memicu perlombaan senjata dan meningkatkan risiko konflik lebih lanjut. Sebagai gambaran perimbangan kekuatan militer (personel) negara-negara di kawasan Asia dapat dilihat pada Lampiran 11.

b) **Peningkatan provokasi dan insiden militer.**

Insiden seperti tabrakan kapal, penembakan, atau penahanan nelayan bisa meningkat menjadi konfrontasi militer yang lebih besar. Provokasi dan insiden ini bisa terjadi karena kesalahpahaman, kurangnya komunikasi, atau tindakan provokatif yang disengaja, dan dapat memicu respons aksi militer dari negara-negara yang terlibat.

c) **Peningkatan militerisasi pulau-pulau buatan.**

China dan negara-negara lain yang membuat pulau-pulau buatan di LCS akan meningkatkan militerisasi di pulau-pulau tersebut, antara lain dengan pembangunan infrastruktur militer, penempatan rudal, kapal perang, pesawat tempur, dan sistem radar. Pada tahun 2016, Taiwan mengumumkan bahwa pos militer China di Pulau Woody dipersenjatai dengan rudal permukaan-ke-udara, yang merupakan penemuan pertama dari beberapa peralatan militer di kepulauan Paracel yang disengketakan banyak pihak.<sup>44</sup> Laporan AMTI menyatakan bahwa Vietnam telah secara signifikan mempercepat ekspansi pos-posnya di

---

<sup>44</sup> <https://www.popularmechanics.com/military/navy-ships/a44880553/could-south-china-sea-disputes-trigger-wwiii/>

Kepulauan Spratly selama enam bulan terakhir. Percepatan ini bukan hanya bukti ambisi strategis Vietnam tetapi juga indikator jelas dari persaingan yang meningkat dan potensi konflik di LCS. Ekspansi agresif Vietnam, ditandai dengan pengembangan infrastruktur militer yang signifikan<sup>45</sup>. Selain China dan Vietnam, beberapa negara di kawasan LCS yang turut berkontestasi dalam penguasaan area kepulauan Spratly, berpotensi untuk militerisasi (mempersenjatai) pulau seiring dengan eskalasi konflik di LCS (lihat Lampiran 12).

d) **Blokade atau kontrol jalur perdagangan.**

Demi menjaga kepentingan mereka, negara yang menguasai pulau-pulau buatan dapat memberlakukan blokade atau kontrol ketat terhadap jalur perdagangan yang mendekati atau melewati daerah yang di klaim. Kondisi ini akan mempengaruhi keamanan maritim dan mengganggu aliran perdagangan internasional, yang bisa memicu tindakan militer dari negara-negara yang terganggu oleh blokade tersebut.

e) **Konfrontasi militer terbatas (China dengan AS).**

Amerika Serikat memiliki kepentingan strategis di kawasan ini dan perjanjian pertahanan dengan beberapa negara ASEAN. Jika ketegangan meningkat, AS mungkin akan melakukan intervensi militer untuk mendukung sekutu-sekutunya, yang bisa mengakibatkan terjadinya konfrontasi langsung dengan China meskipun bersifat terbatas. Ini dapat menyebabkan eskalasi konflik menjadi konfrontasi antara dua kekuatan militer besar, dengan potensi meluas menjadi konflik global. Sebagai langkah antisipasi dinamika di Asia, termasuk pecahnya kemungkinan konflik di LCS, AS telah menghadirkan kekuatannya di beberapa negara kawasan LCS, serta di wilayahnya yaitu Guam, Hawaii,

<sup>45</sup> <https://www.firstpost.com/explainers/how-vietnam-is-growing-bigger-by-building-islands-in-south-china-sea-13781327.html>

Alaska, yang bersiaga jika eskalasi konflik di LCS benar-benar terjadi (lihat Lampiran 13). Berikut adalah 3 (tiga) hal utama pemicu ketegangan antara militer AS dan China<sup>46</sup>:

- (1) China berambisi memiliki militer terbesar dan terkuat.
- (2) AS mengusung kebebasan navigasi.
- (3) Saling provokasi.<sup>47</sup>

f) **Perang regional (konflik terbuka).**

Konflik di LCS bisa meningkat menjadi perang terbuka yang melibatkan *claimant state*. Filipina memiliki perjanjian pertahanan dengan AS, dimana jika salah satu negara tersebut diserang negara lain, maka pihak lainnya akan turut membantu<sup>48</sup>. Ketika konflik bersenjata antara China dengan satu atau lebih *claimant state* pecah, AS beserta sekutu dekatnya yaitu Inggris, Australia, dan Kanada, kemungkinan akan terlibat untuk membantu dengan dalih menegakkan kebebasan bernavigasi atau demi mempertahankan LCS sebagai wilayah internasional<sup>49</sup>. Di sisi lain, negara-negara anti AS tentu tidak akan tinggal diam. Rusia, Korea Utara, dan Iran kemungkinan akan turut terlibat dalam konflik meskipun tidak secara langsung, misalnya dengan mensuplai senjata untuk China atau melarang negara-negara sekutu AS melintasi wilayah mereka.

g) **Kerusakan ekologis.**

Konflik militer di LCS bisa menyebabkan kerusakan ekosistem dan ekologis yang signifikan, seperti pencemaran laut akibat tumpahan minyak dari kapal yang rusak atau hancur. Puing-puing senjata yang tidak meledak dapat

<sup>46</sup> <https://international.sindonews.com/read/1118993/45/6-pemicu-konfrontasi-militer-as-dan-china-semuanya-berakar-pada-perbedaan-kepentingan-1686035196> diakses Selasa, 06 Juni 2023 - 15:04 WIB

<sup>47</sup> <https://www.marineinsight.com/shipping-news/china-releases-video-showing-provocative-move-by-u-s-ship-uss-ralph-johnson-in-south-china-sea/>

<sup>48</sup> Mutual Defense Treaty Between the United States and the Republic of the Philippines; August 30, 1951 (Artikel IV, V)

<sup>49</sup> <https://ssi.armywarcollege.edu/SSI-Media/Recent-Publications/Display/Article/3738629/war-with-china-a-view-from-early-2024/>

meninggalkan bahan kimia berbahaya di air dan mempengaruhi kehidupan liar, menyebabkan hilangnya habitat dan penurunan biodiversitas. Dampak perang terhadap lingkungan dapat berlangsung lama dan memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap kesehatan manusia dan hewan, serta ekosistem secara keseluruhan.

3) **Tingkat nasional.**

Indonesia diyakini akan terdampak oleh *spillover* konflik yang terjadi di LCS. Dengan posisi geografis yang strategis, Indonesia akan merasakan dampak politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan serta keamanan akibat dari eskalasi konflik yang terjadi di wilayah tersebut.

a) **Dampak politik.**

Konflik di LCS dapat mempengaruhi dinamika politik di Indonesia. Sebagai negara dengan posisi strategis di Asia Tenggara, Indonesia akan dihadapkan pada tekanan untuk mengambil sikap dalam sengketa ini. Di satu sisi, Indonesia harus mempertahankan sikap politik luar negerinya yang netral, tidak berpihak, serta menjaga hubungan baik dengan China dan AS sebagai salah satu mitra dagang maupun mitra pertahanan yang utama. Di sisi lain, Indonesia juga harus menunjukkan solidaritas kepada negara-negara ASEAN lainnya yang terlibat dalam sengketa dengan China. Sikap yang salah dalam merespons konflik ini dapat mempengaruhi hubungan diplomatik Indonesia baik dengan China, AS, ataupun dengan negara-negara ASEAN. Selain itu, tekanan domestik dari masyarakat dan aktor politik dalam negeri juga dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia terkait LCS.

b) **Dampak ekonomi.**

LCS adalah jalur pelayaran utama bagi perdagangan internasional, termasuk bagi Indonesia. Setiap tahun, triliunan

dolar barang melewati wilayah ini.<sup>50</sup> Konflik berkepanjangan atau eskalasi militer di LCS dapat mengganggu jalur perdagangan tersebut, mengakibatkan peningkatan biaya pengiriman dan mempengaruhi rantai pasokan global. Indonesia, sebagai negara dengan perekonomian yang tergantung pada perdagangan internasional, akan merasakan dampaknya secara signifikan. Gangguan pada jalur pelayaran dapat menyebabkan penurunan ekspor dan impor, yang pada gilirannya berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, ketidakstabilan di wilayah perairan dapat mengurangi minat investasi asing dan merusak sektor pariwisata yang bergantung pada keamanan dan stabilitas regional.

c) **Dampak sosial.** Dampak *spillover* dari konflik LCS juga akan dirasakan pada aspek sosial di Indonesia. Ketegangan yang meningkat dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan, terutama di Kepulauan Natuna. Masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut untuk mata pencaharian mereka dapat mengalami kesulitan jika perairan mereka menjadi zona konflik. Selain itu, ketidakstabilan di wilayah perbatasan dapat menimbulkan ketakutan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat lokal.

d) **Dampak pertahanan dan keamanan.** Salah satu dampak langsung dari konflik LCS terhadap Indonesia adalah ancaman terhadap kepentingan nasional. Jika ketegangan di LCS meningkat, frekuensi dan intensitas insiden berpotensi meningkat pula, sehingga memaksa Indonesia untuk meningkatkan patroli militer dan memperkuat kehadiran TNI di kawasan tersebut. Konflik LCS juga dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi stabilitas politik dalam negeri.

---

<sup>50</sup> U.S. Energy Information Administration. *Regional analysis Brief: South China Sea.*

Adapun ancaman/kerawanan yang mungkin timbul dari aspek pertahanan dan keamanan antara lain :

**(1) Penggunaan wilayah udara dan laut Indonesia untuk kepentingan operasi militer.**

Ketika eskalasi konflik di LCS meningkat, wilayah Indonesia otomatis akan digunakan sebagai jalur lalu lintas militer tidak hanya bagi negara-negara yang bertikai, namun juga bagi negara yang tidak terlibat. Negara-negara tersebut mungkin akan turut menghadirkan kekuatan militernya guna mengawal kapal-kapal dagang/cargo mereka. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Indonesia dalam mengelola kedaulatan, pertahanan, dan keamanan nasional, serta dapat menimbulkan berbagai implikasi, baik dari segi keamanan, politik, maupun ekonomi.

**(2) Meningkatnya penerbangan militer di wilayah udara Indonesia.**

Pesawat militer dari negara-negara yang terlibat dalam sengketa kemungkinan besar akan menggunakan wilayah udara Indonesia sebagai jalur transit atau bahkan sebagai bagian dari rute operasi militer. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko pelanggaran wilayah udara Indonesia dan menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional. Selain itu, aktivitas militer yang meningkat di wilayah udara dapat mengganggu penerbangan komersial, menyebabkan penundaan, dan potensi bahaya bagi penerbangan sipil karena dengan alasan kerahasiaan mereka kemungkinan besar tidak akan melalui rute penerbangan yang telah ditentukan dan tidak melakukan komunikasi radio dengan otoritas keudaraan (*air traffic controller*) Indonesia.

**(3) Meningkatnya pelayaran militer di wilayah laut Indonesia.**

Wilayah laut Indonesia, yang mencakup beberapa selat strategis seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat

Lombok, serta jalur ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia), merupakan rute penting bagi pelayaran. Dalam situasi konflik, kapal perang dari berbagai negara yang bertikai pasti akan melintasi area ini untuk operasi militer mereka. Hal ini berakibat peningkatan aktivitas militer di perairan Indonesia, yang berpotensi mengganggu lalu lintas maritim yang sangat vital bagi ekonomi Indonesia, menimbulkan risiko keamanan, meningkatkan risiko insiden laut, dan merusak lingkungan laut. Selain itu, kehadiran kapal-kapal militer asing dapat menimbulkan ketegangan dengan angkatan laut Indonesia dan memicu insiden yang tidak diinginkan.

**(4) Wilayah udara dan laut Indonesia menjadi “palagan” negara-negara yang berkonflik.**

Wilayah udara dan laut Indonesia, terutama di sekitar Kepulauan Natuna, berbatasan langsung dengan LCS. Kedekatan geografis ini menempatkan Indonesia dalam posisi rentan terhadap dampak eskalasi konflik yang terjadi di LCS. Ketika ketegangan meningkat, kapal dan pesawat militer dari negara-negara yang bersengketa dapat memasuki wilayah Indonesia, menciptakan potensi pertempuran di perairan dan udara Indonesia. Dengan kemajuan teknologi militer saat ini, pertempuran tidak mesti terjadi di lokus yang disengketakan dan tidak berhadapan selayaknya perang konvensional. Kecanggihan peluru kendali (rudal) jarak jauh dengan berbagai tipe mampu menjejak dan menghancurkan pesawat atau kapal perang musuh dari jarak ribuan kilometer. Artinya, ketika pesawat dan kapal perang dalam perjalanan menuju palagan atau ketika berada/melintasi wilayah Indonesia, mereka telah dihadang dan dihancurkan oleh rudal-rudal yang diluncurkan oleh salah satu pihak. Permasalahan serius yang dapat berimplikasi ke Indonesia adalah, manakala terjadi pertempuran terjadi di wilayah perairan Indonesia yang

melibatkan kapal selam AUKUS ataupun China yang bertenaga nuklir, dan diantaranya mengalami kerusakan atau hancur, maka potensi bencana yang terjadi adalah radiasi nuklir di wilayah Indonesia.

#### **14. Kondisi Pertahanan Indonesia Dihadapkan Kepada Eskalasi Konflik di LCS.**

Dihadapkan dengan posisi strategis Indonesia dalam konflik di LCS dan skenario-skenario terburuk yang mungkin terjadi akibat eskalasi konflik di LCS, maka kondisi pertahanan negara saat ini berikut kondisi pertahanan negara yang diharapkan adalah sebagai berikut :

##### **a. Kondisi Pertahanan Negara Saat Ini.**

##### **1) Sistem pertahanan negara saat ini.**

Pembangunan sistem pertahanan negara harus dilakukan secara terencana dan terstruktur sesuai dengan program pemerintah yang berlaku secara nasional. Tujuannya adalah untuk menciptakan daya tahan yang kuat dengan menutup setiap celah yang dapat dimanfaatkan sebagai titik lemah. Dalam menghadapi ancaman militer, pertahanan militer dan non-militer akan digabungkan dalam struktur Komponen Utama Pertahanan, yaitu TNI. Seluruh komponen pertahanan negara, termasuk Komponen Utama, Komponen Cadangan (Komcad), dan Komponen Pendukung (Komduk), akan dilibatkan dalam memperkuat sistem pertahanan negara. Komcad sendiri merupakan SDN yang siap dipanggil melalui mobilisasi untuk memperkuat kekuatan dan kemampuan TNI. Komduk merupakan SDN yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komcad. Komduk terdiri atas warga negara, sumber daya alam (SDA), sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang meliputi darat, laut, udara, siber, antariksa, dan lainnya.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Peraturan Pemerintah RI No 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara

2) **Strategi pertahanan negara saat ini.**

Strategi Pertahanan Negara Republik Indonesia didasarkan pada prinsip defensif aktif, yang menekankan bahwa pertahanan negara tidak ditujukan untuk menyerang negara lain, melainkan untuk secara proaktif melawan, mencegah, dan mengatasi segala ancaman terhadap kedaulatan negara, wilayah, dan keselamatan bangsa. Adapun strategi pertahanan negara yang dilaksanakan sebagai berikut:

a) **Strategi pertahanan berlapis.**

Adalah pendekatan yang menggabungkan pertahanan militer dan pertahanan non-militer sebagai satu kesatuan pertahanan negara yang utuh. Strategi ini ditandai dengan integrasi antara lapisan pertahanan militer dan non-militer yang saling mendukung dalam menghadapi berbagai ancaman. Lapisan pertahanan militer merupakan pilar utama yang disiapkan untuk menghadapi ancaman militer, terdiri dari komponen utama, cadangan, dan pendukung.

b) **Strategi penangkalan.**

Adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan daya tangkal bangsa dan negara. Strategi pertahanan berlapis dalam konteks penangkalan dilaksanakan dengan memanfaatkan semua SDN secara optimal, baik dalam bidang pertahanan militer maupun nirmiliter sebagai satu kesatuan yang utuh. Bagian dari strategi ini adalah memperkuat pertahanan militer dengan SDM dan Alutsista yang profesional guna mencapai standar kekuatan yang diperlukan dalam konteks penangkalan. Sementara itu, lapisan pertahanan nirmiliter dibangun dan dikembangkan untuk mencapai standar ketahanan nasional dalam berbagai aspek seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, psikologi, dan teknologi.

### 3) **Postur pertahanan negara saat ini.**

Postur pertahanan memiliki tiga aspek utama, yaitu kekuatan, kemampuan, dan penggelaran. Kekuatan terdiri dari elemen-elemen tempur dari struktur pertahanan, kemampuan adalah sumber daya yang memberi kebiasaan sebuah negara untuk menjalankan tindakan militer tertentu, dan penggelaran adalah strategi penangkalan guna terwujudnya efektivitas penyelenggaraan OMP dan OMSP dalam menghadapi ancaman. Pertahanan negara dikembangkan dari postur pertahanan yang ada saat ini yang terdiri dari:

#### a) **Kekuatan pertahanan negara.**

- (1) Kekuatan Militer. Yaitu TNI sebagai Komponen Utama, yang terdiri dari TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.
- (2) Kekuatan Nirmiliter. Terdiri dari Komponen Cadangan (Komcad) dan Komponen Pendukung (Komduk).

#### b) **Kemampuan pertahanan negara.**

- (1) Kemampuan Komponen Utama. Saat ini TNI menerapkan kebijakan pembangunan kemampuan TNI di bidang pertahanan yang berfokus pada pencapaian kekuatan pokok.
- (2) Kemampuan Komcad dan Komduk. Membantu meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida, baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### c) **Penggelaran kekuatan pertahanan negara.**

- (1) Gelar kekuatan TNI AD.

Gelar kekuatan TNI AD mencakup gelar kekuatan terpusat terdiri dari gelar Kostrad dan gelar Kopasus, gelar kekuatan kewilyahan bertumpu pada penambahan gelar komando kewilayahan setingkat Kodam khusus akan dibentuk di Ibu Kota Nusantara ditambah dengan peningkatan status 22 Korem Tipe A menjadi Kodam sehingga terdapat 1 Kodam dalam 1

Provinsi<sup>52</sup>, serta penambahan gelar kekuatan kewilayahan lainnya diarahkan untuk memperkuat gelar kekuatan yang sudah ada di daerah rawan dan perbatasan darat/pulau kecil terluar, sedangkan gelar kekuatan satuan pendukung bertumpu pada gelar pusat kecabangan fungsi (Puscabfung)<sup>53</sup>.

(2) Gelar kekuatan TNI AL.

Gelar Kekuatan TNI AL diselenggarakan dalam kerangka Strategi Pertahanan untuk menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI yang mampu menjangkau seluruh wilayah perairan NKRI, sekaligus mengintegrasikan Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) yang terdiri dari KRI, pesawat udara, pangkalan dan pasukan marinir dengan Komando gabungan wilayah, sehingga menjadi kekuatan yang disegani kawan dan lawan. Implementasi gelar kekuatan TNI AL bertujuan untuk memberikan efek penangkalan yang efektif dalam pengawalan dan perlindungan wilayah NKRI sesuai dengan Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN). Penggelaran kekuatan ini mencakup gelar permanen yang fokus pada penegakan hukum di laut dan persiapan kemampuan untuk memberikan dukungan operasional saat terjadi krisis. Gelar penindakan merupakan bagian dari upaya penegakan kedaulatan negara yang diatur di bawah komando Panglima TNI.

(3) Gelar kekuatan TNI AU.

Gelar Kekuatan TNI AU diadakan dalam rangka Strategi Pertahanan Udara Indonesia dengan konsep strategi untuk memberikan efek *deterrence* dan mengamankan wilayah udara Indonesia hingga ZEE

<sup>52</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/07/19261031/tni-ad-ingin-bangun-22-kodam-baru-ksad-sebut-agar-imbang-dengan-polda?page=all>.

<sup>53</sup> Konsep Postur TNI Angkatan Darat Tahun 2025-2044.

Indonesia. Fungsi yang diemban dalam penempatan kekuatan TNI AU diarahkan untuk memberikan perlindungan udara yang melindungi kekuatan TNI dalam pelaksanaan operasi gabungan, baik di laut maupun di darat yang dikembangkan dalam kerangka Tri Matra terpadu.

(4) Gelar Komcad dan Komduk.

Diharapkan dapat dijadikan sebagai kekuatan pengganda bagi Komponen Utama apabila terjadi konflik.

4) **Pembangunan postur pertahanan negara saat ini.**

Pembangunan postur pertahanan negara memiliki dua aspek utama, yaitu pembangunan postur pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Fokus utama dari pembangunan postur pertahanan negara adalah pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan pencapaian interoperabilitas melalui koordinasi, kerjasama, kolaborasi, serta integrasi antara pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter dalam konteks Sishankamrata. Kebijakan pelaksanaan pembangunan postur pertahanan militer difokuskan pada tiga hal: pertama, pembangunan kekuatan yang terdiri dari kekuatan darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan yang utuh, yang diperkuat dengan Komcad dan Komduk. Pembangunan gelar ini bertujuan untuk mendukung strategi defensif aktif dengan kekuatan yang dapat diproyeksikan hingga ke luar wilayah yurisdiksi Indonesia.

**b. Kondisi Pertahanan Negara yang Diharapkan.**

1) **Sistem pertahanan negara yang diharapkan.**

Sistem pertahanan negara yang diharapkan adalah sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh elemen masyarakat Indonesia, wilayah, dan semua SDN yang diorganisir secara menyeluruh, terarah, dan berkelanjutan yang mampu menggabungkan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter yang saling mendukung untuk menjaga kedaulatan negara, melindungi

keselamatan seluruh rakyat dan negara, serta mempertahankan integritas wilayah NKRI dari berbagai ancaman. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem pertahanan yang kuat yang mampu menutup setiap celah yang dapat dimanfaatkan sebagai titik lemah saat menghadapi ancaman nyata.

Sistem Pertahanan Negara harus mampu mengintegrasikan pertahanan militer dan nirmiliter melalui Komponen Utama, Komcad, dan Komduk. Komcad terdiri dari SDN yang disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperkuat kekuatan TNI. Sementara itu, Komduk terdiri dari SDN lainnya yang dapat meningkatkan kekuatan Komponen Utama dan Komcad. Komduk terdiri dari Garda Bangsa, tenaga ahli, warga negara lainnya, industri nasional, sarana dan prasarana, serta sumber daya alam dan buatan yang dapat digunakan untuk kepentingan pertahanan. Oleh sebab itu, perlu adanya inventarisasi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing Komduk terkait sehingga pada saat dibutuhkan sebagai pendukung Komponen Utama data dan SDN tersebut telah tersedia dan dapat dimanfaatkan secara optimal. Sebagai contoh, inventarisasi jumlah dan kemampuan sebenarnya dari kapal-kapal angkut yang dimiliki oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), armada pesawat angkut penumpang/barang yang dimiliki dan dioperasikan oleh maskapai pemerintah maupun swasta, atau inventarisasi tenaga ahli konstruksi bangunan, guna mengantisipasi kebutuhan SDM pendukung Komponen Utama dalam perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pertahanan negara.

2) **Strategi pertahanan negara yang diharapkan.**

Dalam merumuskan strategi pertahanan negara yang efektif, penting untuk dapat menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu apa yang akan dipertahankan (*ends*), bagaimana cara mempertahankannya (*means*), dan strategi apa yang akan digunakan untuk mempertahankannya (*ways*). *Ends* dalam strategi pertahanan negara mencakup kedaulatan negara,

keutuhan wilayah, serta keselamatan dan kehormatan bangsa. Sementara itu, *means* yang digunakan adalah gabungan antara pertahanan militer dan nirmiliter yang terintegrasi dalam postur pertahanan negara. Terakhir, *ways* yang diterapkan adalah strategi pertahanan berlapis dan penangkalan guna memastikan keamanan negara dari berbagai ancaman yang mungkin timbul.

Strategi pertahanan negara diharapkan mampu mensinergikan kinerja antar Komponen Militer dan Komponen Nirmiliter dalam rangka menjaga, melindungi dan memelihara kepentingan nasional Indonesia. Dalam menyikapi perkembangan lingkungan strategis dibutuhkan konsepsi strategi pertahanan negara yang mampu mengantisipasi setiap dampak konflik di berbagai wilayah.

3) **Postur pertahanan negara yang diharapkan.**

Perkembangan lingkungan strategis senantiasa membawa perubahan kompleksitas ancaman terhadap pertahanan negara, yang dapat dilihat dari sifat, sumber, dimensi dan spektrum ancaman. Persengketaan batas maritim dan klaim wilayah antara Cina dengan *claimant states* menjadi sumber konflik nyata yang dalam dekade terakhir ini mengalami eskalasi yang mencemaskan. Untuk mengatasi perkembangan lingkungan strategis dikawasan Indo-Pasifik, khususnya di LCS, diperlukan adanya suatu Postur Pertahanan Negara yang dapat menghadapi setiap kemungkinan datangnya ancaman yang mengancam keutuhan NKRI, dengan mewujudkan postur pertahanan yang memiliki kapabilitas yang memadai yang mencakup pengembangan alat utama sistem senjata (Alutsista), penataan ruang kawasan pertahanan, pembangunan kekuatan pertahanan, dan penataan struktur organisasi, serta penggelaran kekuatan baik yang bersifat gelar permanen maupun gelar penindakan pada masa damai maupun pada masa krisis.

#### 4) **Pembangunan postur pertahanan yang diharapkan.**

Pembangunan postur pertahanan yang mencakup pembangunan kemampuan di bidang pertahanan pada tingkat kebijakan maupun tingkat operasional, diharapkan dapat mewujudkan postur TNI yang mempunyai kemampuan daya tangkal strategis dan mobilitas tinggi untuk diproyeksikan di dalam dan luar wilayah yurisdiksi NKRI dalam rangka melindungi kepentingan nasional. Sebagai upaya antisipasi terhadap potensi konflik di kawasan LCS yang semakin meningkat, diharapkan pembangunan kekuatan pertahanan negara pada tingkat kebijakan maupun tingkat operasional difokuskan disekitar perairan Natuna (mendekati LCS). Pembangunan kekuatan pertahanan pada tingkat kebijakan berupa peningkatan kemampuan birokrasi pemerintah (Departemen Pertahanan dan Departemen/Instansi lain yang terkait) dalam merumuskan keputusan politik yang terkait dengan pengelolaan pertahanan negara. Sedangkan pada tingkat Operasional berupa pembangunan kekuatan Komponen Pertahanan, yang terdiri dari Komponen Utama (TNI), Komcad, dan Komduk. Pembangunan Komponen Pertahanan diprioritaskan pada pembangunan TNI, sedangkan penyiapan Komcad dan Komduk dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan sumber daya yang tersedia.

Saat ini, pembangunan Komponen Utama masih didasarkan pada konsep pertahanan berbasis anggaran (*budget-based defence*) dikarenakan keterbatasan anggaran negara yang dialokasikan untuk keperluan pertahanan negara. Guna menyikapi dinamika di LCS dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya eskalasi konflik di LCS, diharapkan pembangunan kekuatan TNI kedepan berdasarkan pada faktor ancaman nyata yang dihadapi (*threat based*) dan kemampuan kekuatan untuk menghadapi ancaman tersebut (*capability based*). Pelaksanaan pembangunan pertahanan negara pada tahap awal dapat diarahkan pada percepatan pencapaian Kekuatan Pokok TNI pada Matra Laut dan Udara. Sedangkan penambahan pengadaan Alutsista dan peralatan lain diprioritaskan untuk

menambah kekuatan pokok, modernisasi, dan/atau mengganti Alutsista/alat peralatan yang sudah tidak layak pakai.

**c. Hambatan dan Tantangan yang Dihadapi dalam Memperkuat Pertahanan negara Sebagai Upaya Mengantisipasi Eskalasi Konflik di LCS.**

1) **Hambatan.**

a) **Belum adanya *situational awareness* nasional terkait masalah di LCS.**

Hingga saat ini Indonesia belum menunjukkan adanya *situational awareness* terkait perkembangan situasi di LCS. Dalam konteks LCS, hal ini mencakup pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika geopolitik, isu-isu keamanan maritim, serta potensi dampak yang dapat timbul bagi kepentingan nasional Indonesia.

Salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya *situational awareness* nasional adalah kurangnya koordinasi dan integrasi antar lembaga pemerintah terkait. Isu LCS yang semestinya membutuhkan atensi berbagai pihak (Kementerian/Lembaga), kenyataan di lapangan seringkali ditangani secara parsial oleh kementerian dan lembaga yang berbeda-beda. Hal ini mengakibatkan tidak adanya perspektif holistik dan pemahaman yang utuh mengenai kompleksitas permasalahan LCS. Selain itu, adanya pandangan bahwa posisi Indonesia saat ini bukan salah satu *claimant state* yang tidak akan terlibat langsung dalam konflik, memunculkan sikap kurang peduli dengan dinamika eskalasi konflik yang sedang atau mungkin akan terjadi di LCS.

b) **Belum memiliki rencana kontijensi seandainya terjadi konflik terbuka (perang) di LCS.**

Menyikapi kemungkinan dinamika eskalasi konflik di LCS, Indonesia saat ini belum memiliki rencana kontijensi atau *contingency planning* yang jelas dan komprehensif. Hal

ini akan memunculkan ketidakpastian dan ketidaksiapan dalam menghadapi situasi yang mungkin terjadi di masa depan. Sebagai negara yang bersinggungan langsung dengan LCS, Indonesia sangat rentan terdampak (*spillover effect*) jika terjadi eskalasi konflik di LCS dalam bentuk konflik terbatas ataupun terbuka. Dengan berbagai akibat yang ditimbulkan/dampak di berbagai sektor dan dapat mengganggu kepentingan nasional Indonesia, maka perkembangan potensi eskalasi konflik bersenjata di LCS tidak bisa diabaikan.

Indonesia semestinya memiliki rencana kontijensi manakala eskalasi konflik di LCS benar-benar terjadi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa negara memiliki strategi yang jelas dan terkoordinasi dalam menghadapi situasi darurat. Rencana kontijensi juga akan membantu Indonesia untuk mengidentifikasi risiko dan potensi ancaman yang mungkin muncul, serta menentukan langkah-langkah yang harus diambil dalam mengatasi situasi tersebut. Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman akan kepentingan strategis di kawasan tersebut, kurangnya sumber daya dan kemampuan untuk merumuskan rencana darurat, atau adanya konflik kepentingan antar kementerian atau lembaga terkait.

## 2) Tantangan<sup>54,55</sup>

### a) Keterbatasan anggaran.

Keterbatasan anggaran merupakan masalah klasik yang dihadapi berbagai negara. Di dalam pengalokasian dan pengelolaan anggaran pertahanan di Indonesia menjadi tantangan tersendiri. Dengan anggaran yang terbatas, Kemenhan maupun ke-3 Matra TNI harus benar-benar

<sup>54</sup>

<https://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasiona/article/download/1313/127>

<sup>6</sup>

<sup>55</sup> <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/download/4398/4857>

merencanakan kebutuhan dan penggunaannya berdasarkan skala prioritas. Dengan kondisi yang dihadapi sebagai berikut<sup>56</sup>:

(1) **Anggaran pertahanan relatif kecil.**

Meskipun anggaran pertahanan mengalami kenaikan yang cukup signifikan beberapa tahun terakhir, namun dengan pengalokasian rata-rata sebesar 0,7%-08% pertahun dari *Gross Domestic Product* (GDP), alokasi anggaran untuk sektor pertahanan dalam APBN masih relatif kecil dibandingkan sektor lain. Alhasil kondisi ini membatasi kemampuan Kemhan/TNI untuk melakukan penambahan alutsista baru ataupun peningkatan kualitas sumber daya pertahanan, dan lebih pada upaya modernisasi (*upgrading*) serta pemeliharaan/perawatan alutsista.

(2) **Didominasi belanja pegawai.**

Realisasi anggaran Kementerian Pertahanan (termasuk TNI) selama 2020 – 2024 didominasi oleh belanja pegawai, dengan rata-rata 34% dari total pagu anggaran. Kondisi ini telah membatasi porsi anggaran untuk belanja barang dan modal yang dibutuhkan untuk pengadaan/penambahan dan modernisasi alutsista. Data rekap perkembangan anggaran Kemhan dan TNI lihat di Lampiran 3.

(3) **Kesulitan memenuhi postur ideal TNI.**

Jumlah personel maupun alutsista TNI dari ketiga Matra (Darat, Laut, Udara) masih jauh dari komposisi ideal sesuai perencanaan kebutuhan. Keterbatasan anggaran membatasi kemampuan untuk merekrut dan melatih personel baru ataupun pengadaan alutsista modern dalam jumlah yang dibutuhkan, sehingga TNI

<sup>56</sup> <https://opac.lib.idu.ac.id/repo-perpus/index.php?bid=11555&fid=8968&p=fstream-pdf>

masih mengoperasikan alutsista tua berusia 25-40 tahun yang terus dirawat dan diperbaiki<sup>57</sup>.

b) **Doktrin pertahanan negara belum tersusun dengan baik.**

Meskipun telah mengalami berbagai perubahan dalam kebijakan pertahanan sejak kemerdekaannya, masih terlihat bahwa doktrin pertahanan negara belum tersusun dengan baik. Hal ini menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius mengingat kompleksitas geopolitik dan dinamika ancaman keamanan di kawasan Asia Tenggara, khususnya terkait LCS. Doktrin pertahanan adalah landasan strategis yang menentukan cara negara menjaga keamanan dan kedaulatan teritorialnya. Proses pembentukan doktrin pertahanan mengalami berbagai tantangan, diantaranya adalah masalah koordinasi antarlembaga, perbedaan pandangan di tingkat kebijakan, dan kurangnya konsistensi dalam implementasi strategi pertahanan negara. Salah satu hambatan utama dalam pembentukan doktrin pertahanan yang efektif adalah kompleksitas geografis Indonesia. Dengan ribuan pulau yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara, Indonesia dihadapkan pada tantangan yang besar dalam mengkoordinasikan kekuatan pertahanan secara efisien, holistik, dan terpadu. Diantaranya adalah tantangan distribusi logistik, penggelaran komunikasi yang terintegrasi, dan keberadaan ALKI yang seolah membelah wilayah Indonesia menjadi 3 (tiga) bagian. Selain itu, aspek politik juga memainkan peran penting dalam pembentukan doktrin pertahanan. Perubahan pemerintahan, pergeseran prioritas kebijakan nasional, pergantian pejabat Kementerian Pertahanan, pucuk Pimpinan TNI, dan Kepala Staf Angkatan, dapat mengganggu kontinuitas dalam strategi pertahanan yang konsisten. Kurangnya konsensus di antara para pembuat kebijakan mengenai ancaman utama yang

---

<sup>57</sup> <https://transformasiglobal.ub.ac.id/index.php/trans/article/download/19/18>

dihadapi Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri dalam menyusun doktrin pertahanan yang efektif.

c) **Sinergi antar komponen utama pertahanan belum optimal.**

Ego sektoral merupakan isu yang sangat krusial, di mana mayoritas pemangku kepentingan Komponen Utama pertahanan negara hingga saat ini masih lebih memprioritaskan kepentingan instansi/Matra dan cenderung abai kepentingan bersama dalam Tri-Matra. Hal ini menyebabkan berbagai masalah terkait pertahanan negara tidak dapat diselesaikan secara menyeluruh dan komprehensif. Kondisi ini juga menyebabkan setiap pemangku kepentingan Komponen Utama dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas masih mengabaikan aspek pertahanan negara. Dalam praktiknya, sistem peralatan dan fasilitas infrastruktur yang ada belum terintegrasi dengan baik, meskipun secara teknologi memungkinkan untuk diintegrasikan. Sebagai contoh, peralatan komunikasi yang dimiliki oleh Mabes TNI, TNI AL, TNI AD, TNI AU berasal dari berbagai merk dan memiliki spesifikasi teknis yang berbeda-beda, sehingga saat digunakan dalam operasi gabungan, komando dan pengendalian (kodal) dari tingkat strategis hingga taktis tidak dapat berjalan dengan lancar.

d) **Belum adanya strategi pertahanan udara nasional yang konkret dan terintegrasi.**

Pasca validasi organisasi di TNI yaitu perubahan Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) yang semula berada di bawah Mabes TNI menjadi Komando Operasi Udara Nasional (Koopsudnas) di bawah TNI AU, maka saat ini belum ada organisasi di TNI yang berfungsi mengkoordinasikan dan mengkomandoi sistem pertahanan udara di wilayah Indonesia. Hal ini mestinya menjadi atensi utama karena di dalam doktrin

pertahanan udara diperlukan adanya kesatuan komando yang terintegrasi dalam menghadapi ancaman udara, tidak dapat dilakukan secara sektoral oleh satu Matra saja karena masing-masing Matra baik Darat, Laut, maupun Udara memiliki sistem pertahanan udara dengan kemampuan dan penggelaran yang berbeda-beda. Kondisi ini akan menyulitkan kendali untuk menghadapi ancaman yang datang karena apabila terjadi eskalasi konflik di LCS, ancaman yang paling dominan adalah dari aspek udara dan laut.

### **15. Langkah-Langkah Konkret yang Dapat Diambil Sebagai Strategi untuk Mengoptimalkan Pertahanan Negara Guna Menjaga Menjaga Kepentingan Nasional.**

Dalam menyikapi setiap kontijensi yang timbul dalam wilayah yang bersinggungan dengan kepentingan internasional, maka Pemerintah Republik Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan luar negeri atau diplomasi saja, tapi harus secara bersamaan menjalankan diplomasi politik dan diplomasi militer (*gunboat diplomacy*),<sup>58</sup> yaitu upaya diplomasi melalui dialog yang diiringi dengan pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI yang tangguh. Untuk mengoptimalkan pertahanan negara guna mengantisipasi dampak eskalasi konflik LCS, perlu dirumuskan kebijakan yang mengarahkan langkah-langkah yang perlu dilakukan sehingga tujuan dapat dicapai secara optimal. Selanjutnya kebijakan ini akan ditindaklanjuti dengan penetapan strategi-strategi sebagai berikut:

#### **a. Strategi *softpower*.**

##### **1) Upaya deeskalasi konflik.**

Dari **teori perspektif liberalisme** dalam hubungan internasional, sikap pemerintah tercermin melalui pendekatan yang diambil dalam membantu penyelesaian konflik di LCS. Pemerintah Indonesia mendorong pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk menyelesaikan konflik dengan mengutamakan kerjasama ASEAN dalam menangani masalah di LCS.

<sup>58</sup> <https://www.thoughtco.com/gunboat-diplomacy-4774988>

De-eskalasi konflik di kawasan melalui upaya dialog multilateral merupakan langkah penting untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak terkait. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan peran aktifnya sebagai mediator dan mengajak negara-negara ASEAN untuk bekerja sama dalam menyelesaikan konflik ini secara diplomatis. Selain itu, penyelenggaraan *workshop* tahunan juga menjadi wujud komitmen Indonesia dalam mencegah eskalasi konflik di LCS. Penyelenggaraan *workshop* merupakan bagian dari diplomasi pencegahan (*preventive diplomacy*) agar tercipta kepercayaan antara negara-negara yang terlibat dalam konflik, dan mencegah konflik agar tidak terjadi secara berkelanjutan. Tujuan utama dari *workshop/lokakarya* ini adalah mengelola potensi konflik melalui kerjasama, memajukan *confidence building measures* untuk meningkatkan rasa saling percaya antara negara-negara yang terlibat sengketa, dan mendorong pertukaran pandangan terkait program dan proyek kerjasama pemanfaatan potensi di LCS. *Workshop* ini diadakan untuk mengikuti perkembangan yang terjadi di wilayah LCS. Penyelenggaraan *workshop* mengenai penanganan konflik juga merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan nasional Indonesia dari sudut pandang **teori perspektif realisme**, dengan tujuan untuk memperoleh *prestige*, wibawa, dan pengaruh politik yang menguntungkan Indonesia. Selain itu, *workshop* ini juga merupakan wujud nyata dari peran Indonesia sebagai fasilitator dalam upaya terciptanya perdamaian dan stabilitas di kawasan.

2) **Meningkatkan sinergi antar komponen pertahanan negara.**

Guna mengantisipasi dan menghadapi skenario maupun dampak akibat eskalasi konflik di LCS, diperlukan kolaborasi sistem pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan negara yang saling sinergi antar kekuatan komponen bangsa seperti dalam **teori sinergi strategis**. Sinergi dan kolaborasi antara kementerian, lembaga negara, dan TNI memainkan peran krusial

dalam memperkuat pertahanan negara. Integrasi berbagai sumber daya dan keahlian dari masing-masing institusi dapat menciptakan strategi yang lebih efektif dan responsif terhadap tantangan keamanan yang terus berkembang. Dengan bekerja sama, mereka dapat memperkuat komunikasi, koordinasi, dan respons terhadap ancaman, sekaligus memaksimalkan pemanfaatan anggaran dan sumber daya yang tersedia. Prinsip kolaboratif ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga membangun ketahanan nasional yang lebih solid dalam menghadapi berbagai potensi risiko, baik internal maupun eksternal. Tujuan dari strategi ini adalah untuk mengesampingkan kepentingan ego sektoral dan menumbuhkan kesadaran antar komponen pertahanan negara dalam mencapai hasil yang optimal demi tetap terjaganya keutuhan NKRI.

3) **Prioritasi pengalokasian anggaran belanja pertahanan negara.**

Sejalan dengan **teori prioritas strategis**, tujuan dari strategi ketiga adalah untuk memprioritaskan anggaran pertahanan negara melalui sistem perencanaan pembangunan di bidang pertahanan negara yang tepat dan terukur sesuai dengan kebutuhan pertahanan negara yang disesuaikan dengan kemampuan negara sebagaimana tertuang dalam rencana program pembangunan nasional. Upaya untuk mewujudkan sistem anggaran pertahanan negara disesuaikan dengan perencanaan APBN yang tepat dan terukur, diharapkan dukungan anggaran pertahanan negara dapat mencukupi sesuai kebutuhan secara proporsional melalui perencanaan, penyaluran dan aloksi yang tepat.

Konflik di LCS apabila terjadi akan melibatkan negara-negara yang memiliki kekuatan dan kemampuan militer yang maju dan modern. Oleh sebab itu, dengan alokasi anggaran yang terbatas mesti disiasati dalam penggunaannya yaitu dengan memprioritaskan (menitikberatkan) pada pengembangan dan

penguatan matra udara dan matra laut yang mana kedua matra tersebut mengoperasikan alutsista yang sarat dengan teknologi. Optimalisasi dapat dilakukan antara lain dengan tahapan perencanaan dalam menghadapi ancaman nyata maupun yang berpotensi nyata, misalnya konflik terbuka di LCS, yaitu dengan mendasarkan pada *capability based planning* dan *threat based planning*, selanjutnya diikuti dengan peningkatan belanja modal di angkatan. Dalam hal ini, kebijakan penambahan kekuatan pasukan baik untuk Komponen Utama ataupun Komcad perlu ditinjau kembali karena akan berdampak pada peningkatan belanja pegawai, juga belum menjadi suatu prioritas, sehingga alokasi anggaran dapat lebih difokuskan untuk modernisasi/*upgrading* alutsista yang dimiliki dan pembangunan kemampuan SDM Komponen Utama melalui program-program pelatihan (perorangan maupun gabungan), guna menghasilkan personel-personel TNI yang lebih profesional dan mumpuni.

4) **Menyusun doktrin pertahanan negara yang tepat.**

Tujuan dari strategi keempat ini adalah untuk merumuskan Doktrin Pertahanan Negara yang memiliki makna penting sebagai panduan dalam pengelolaan sistem dan pelaksanaan pertahanan negara. Pada tingkat strategis, Doktrin Pertahanan Negara berperan dalam mewujudkan sistem pertahanan yang bersifat komprehensif, baik dalam situasi damai maupun dalam keadaan perang. Dalam konteks pelaksanaan pertahanan negara, inti dari Doktrin Pertahanan Negara adalah sebagai pedoman bagi setiap pelaksana pertahanan dalam mengintegrasikan pertahanan militer dan pertahanan non-militer secara menyeluruh, terarah, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan pertahanan. Pada masa damai, Doktrin Pertahanan Negara digunakan sebagai panduan dan acuan bagi pelaksana pertahanan negara dalam mempersiapkan kekuatan dan pertahanan dalam kerangka kekuatan untuk daya tangkal yang mampu mencegah setiap bentuk ancaman serta kesiapsiagaan dalam menanggulangi

ancaman, baik yang berasal dari luar maupun yang timbul di dalam negeri. Pada situasi perang, Doktrin Pertahanan Negara memberikan tuntutan dan pedoman dalam memobilisasi seluruh kekuatan nasional dalam upaya pertahanan untuk melindungi negara dan bangsa dari ancaman. Oleh karena itu, diperlukan penyelarasan dan sinkronisasi pada strata strategis di tingkat tataran nasional (Kebijakan Umum Pertahanan Negara dan Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara) hingga strata teknis yang berada di operasional (Doktrin Matra/Angkatan) untuk menghasilkan doktrin yang berkesinambungan.

5) **Kebijakan pertahanan negara yang berkelanjutan.**

Salah satu faktor penting dalam upaya mengoptimalkan pertahanan negara adalah adanya komitmen yang kuat dari para Pemimpin bangsa. Seringkali kebijakan-kebijakan pertahanan yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam berbagai Perundang-undangan dan Postur Angkatan tidak dapat dijalankan dengan optimal karena adanya pergantian kepemimpinan. Adapun pentingnya Kebijakan Pertahanan yang berkelanjutan adalah agar ada kontinuitas dalam perencanaan dan strategi pertahanan negara, terlepas dari pergantian kepemimpinan. Dengan adanya kebijakan yang berkelanjutan, lembaga pertahanan dapat menjaga fokus pada tujuan strategis jangka panjang, meminimalkan gangguan dalam pelaksanaan kebijakan, dan memperkuat stabilitas pertahanan negara.

b. **Strategi *Hardpower*.**

1) **Meningkatkan pertahanan negara yang berorientasi pada kemampuan (*capability orientation*).**

Menurut **teori optimalisasi dan teori pencegahan**, upaya untuk meningkatkan pertahanan negara dengan mendasarkan pada kemampuan, bukan berdasarkan pada orientasi jumlah/kekuatan semata, dalam konteks LCS adalah optimalisasi dinamis yang mana kebijakan yang diambil sekarang akan mempengaruhi keputusan berikutnya. Maka, Pembinaan

kemampuan pertahanan militer bertujuan untuk memperkuat TNI sebagai penangkal dan penindak yang profesional dan handal melalui pola Tri-Matra Terpadu yang saling mengisi dan saling memperkuat. Salah satu kemampuan pertahanan yang dikembangkan adalah kemampuan pertahanan udara nasional yang mampu membentengi wilayah NKRI, termasuk kemampuan pertahanan udara area, pertahanan udara terminal, dan pertahanan udara titik. Hal ini hanya dapat terwujud jika matra udara dilengkapi dengan jumlah radar penjejak (*ground control interception* (GCI)) yang mampu men-cover seluruh wilayah Indonesia, pesawat tempur yang memiliki kemampuan *air superiority* sehingga didapatkan *air supremacy* guna mendukung operasi, serta rudal-rudal *medium* dan *long range* baik untuk pesawat tempur maupun *ground base station*. Kedua, kemampuan pertahanan udara nasional juga dapat memberikan dukungan bagi matra laut dan darat dalam merencanakan strategi pertempuran melalui penggunaan payung udara dan bantuan tembakan yang efektif. ketiga, kemampuan pemukul strategis yang mengintegrasikan pertahanan udara, laut, dan darat dapat menghancurkan atau menggagalkan upaya negara lain yang ingin melakukan intrusi ke wilayah NKRI, terutama di ZEE Indonesia. keempat, kemampuan perlawanan teknologi dan elektronika strategis yang sangat penting untuk mengamankan sistem komunikasi dan elektronika sendiri, mengacaukan sistem komunikasi dan elektronika lawan, serta mengintegrasikan jaringan sistem Tri-Matra terpadu (tiga matra secara terpusat) dalam rangka meningkatkan interoperabilitas operasi antara kekuatan laut, udara, darat, dan siber.<sup>59</sup>

2) **Penguatan posisi-posisi strategis (titik kunci) pertahanan.**

Berdasarkan **teori optimalisasi** dan **teori pencegahan**, diperlukan pengamatan secara *real time* terhadap situasi di LCS,

---

<sup>59</sup> Permenhan RI No 12 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2020-2024

*chokepoints*, maupun jalur ALKI, sehingga memungkinkan para pemimpin militer untuk merespons dengan cepat dinamika yang terjadi jika terjadi eskalasi konflik. Di samping itu, untuk mencegah suatu negara atau entitas berniat melakukan tindakan agresif/pelanggaran/penerobosan wilayah atau kedaulatan Indonesia, maka upaya-upaya penguatan secara fisik pada posisi-posisi strategis perlu dilakukan, sebagai berikut:

a) **Pulau Natuna.**

Meskipun memiliki posisi strategis yang penting, upaya penguatan Pulau Natuna menghadapi sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung peran Pulau Natuna secara optimal sebagai garda terdepan dalam menghadapi eskalasi konflik di LCS. Posisi strategis Kepulauan Natuna menjadi semakin penting, khususnya jika terjadi eskalasi konflik di LCS.

Dalam kondisi konflik di LCS, Pulau Natuna dapat berperan sebagai basis operasi militer Indonesia untuk memonitor, mengawasi, serta melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan guna melindungi kepentingan nasional. Pangkalan Udara Tentara Nasional Indonesia (TNI AU) serta Pangkalan Angkatan Laut TNI AL di Natuna merupakan aset vital yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mengendalikan situasi di sekitar wilayah tersebut. Selain itu, infrastruktur lain seperti Pusat Komando Operasi Angkatan Laut (Puskodal) dan Pusat Komando Pertahanan Udara Nasional (Puskodau) juga perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kemampuan pengawasan dan respons cepat Indonesia di LCS. Strategi penguatan Pulau Natuna secara umum sejatinya telah tertuang dalam upaya penebalan sarana dan prasarana militer di pulau-pulau strategis, yaitu

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, Peraturan Panglima TNI Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tugas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan), dan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1312/XII/2018 Tanggal 10 Desember 2018, tentang Pembangunan Prioritas Pulau Terluar Tertentu dan Daerah Yang Bersifat Strategis. Namun sampai kini lemah dalam implementasi sehingga tidak secara nyata tertuang dalam Postur TNI maupun Postur Angkatan. Sebagai bentuk *deterrent effect* dan garda terdepan yang berbatasan langsung dengan LCS, semestinya STT Natuna diperkuat dengan rudal jarak sedang dan jarak jauh, radar-radar berkemampuan GCI, pesawat tempur berkemampuan *Electronic Counter Measure* (ECM) dan AW (*Air Warfare*) sekelas Rafale dan F-16 enhanced Mid Life Upgrade (e-MLU), atau F-15 EX terbaru. (lihat Lampiran 14).

b) **Chokepoint (titik corong).**

*Chokepoints* di wilayah Indonesia perlu dijaga dan diawasi dengan ketat karena mereka merupakan jalur strategis yang vital bagi arus pelayaran baik di dalam negeri maupun internasional. *Chokepoint* sering menjadi titik rawan terhadap ancaman keamanan, termasuk potensi serangan terorisme, kejahatan lintas negara, atau gangguan terhadap jalur logistik penting. *Chokepoints* seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok merupakan jalur utama bagi perdagangan dan transportasi laut di wilayah Asia Tenggara. Gangguan atau ketidakstabilan di *chokepoints* tersebut dapat berdampak negatif pada perekonomian regional dan global. Apabila terjadi eskalasi konflik di LCS, maka *chokepoints* tersebut akan menjadi gerbang/pinta utama bagi jalur

pelayaran bagi kapal-kapal perang dan kapal selam negara-negara yang berkonflik maupun yang berkepentingan. Sehingga, pengawasan *chokepoints* menjadi sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara terhadap wilayah perairan dan jalur strategis yang menjadi bagian integral dari negara Indonesia. Dengan kondisi keterbatasan alutsista yang dimiliki TNI AL saat ini, tugas pengawasan dan penjagaan lokasi-lokasi *chokepoint* tersebut belum dapat dilaksanakan dengan optimal oleh gugus tugas TNI AL.<sup>60</sup> Oleh sebab itu, untuk melindungi *chokepoints* titik corong di Indonesia, beberapa strategi yang dapat diterapkan sebagai upaya optimalisasi antara lain: (Lihat Lampiran 15)

(1) **Pertahanan *land attack missile (coastal defense)*.**

Strategi ini berupa penempatan baterai rudal darat ke permukaan dan darat ke udara di wilayah pesisir laut yang berkemampuan jarak sedang dan jarak jauh yang mampu menjangkau sasaran pada jarak puluhan hingga ratusan kilometer. Langkah ini dapat sebagai *gap filling* tugas pengamanan laut di *chokepoint* yang dilakukan oleh kapal perang TNI AL. Saat ini Batalyon Arteleri Pertahanan Udara Korps Marinir (Yon Arhanudmar) hanya mengoperasikan meriam anti serangan pesawat udara jenis AA Type 90 35mm Twin Gun Norinco dan rudal *manpads* strela yang jarak tembaknya hanya berkisar 3-4 km saja.

(2) **Pengadaan *coastal surveillance*.**

*Coastal surveillance* (pengawasan pantai) adalah komponen vital dari strategi pertahanan negara, yang berfungsi untuk melindungi kedaulatan, keamanan, dan kepentingan nasional di wilayah perairan. Peranti keras ini memainkan peran penting dalam menjaga

---

<sup>60</sup> Ceramah BS. Hankam, "Kebijakan Pembinaan Kekuatan TNI AL" oleh Wakasal, di Lemhannas RI kepada PPRA 66 tanggal 2 Juli 2024.

pertahanan negara karena beberapa alasan berikut; Deteksi dini ancaman, dimana Sistem pengawasan pantai memungkinkan deteksi dini terhadap ancaman potensial dari laut, seperti kapal asing yang mencurigakan, penyelundupan senjata, dan infiltrasi oleh kelompok teroris. Dengan deteksi dini, respons cepat dapat diambil untuk mencegah ancaman tersebut masuk ke wilayah negara. Penegakan kedaulatan; dengan pengawasan pantai yang efektif, negara dapat menegakkan kedaulatannya atas perairan teritorial dan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Dukungan operasi militer; Pengawasan pantai memberikan data intelijen dan situasional yang penting bagi operasi militer. membantu memonitor dan mengawasi wilayah perbatasan laut untuk mencegah pelanggaran kedaulatan oleh negara lain atau aktivitas ilegal lainnya. Data-data dan informasi penting ini selanjutnya dapat digunakan oleh Pimpinan untuk koordinasi respon yang cepat dan efektif dalam membantu pengambilan keputusan penindakan di *chokepoints*.

(3) **Pelibatan masyarakat sebagai agen maritim.**

Untuk peningkatan intelijen dan pengawasan di LCS, perlu dibangun kerjasama (kolaborasi) dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat ataupun sektor swasta sebagai Pomponen Pendukung, dalam mengoptimalkan deteksi dini sebagai upaya meningkatkan pemahaman bersama tentang potensi ancaman yang mungkin timbul akibat eskalasi konflik di LCS. Masyarakat yang tinggal di sekitar *chokepoints* atau jalur laut yang sempit dan penting dapat menjadi mata dan telinga tambahan bagi otoritas maritim. Dengan cara memberikan informasi real-time tentang

aktivitas mencurigakan atau kejadian yang memerlukan perhatian segera.

c) **Jalur ALKI.**

Sebagai Negara kepulauan, berdasarkan UNCLOS 1982 maka Indonesia harus menyediakan jalur lintas damai dan jalur lintas alur laut kepulauan, yaitu pelaksanaan hak pelayaran dan penerbangan dengan normal mode yang hanya dapat digunakan untuk lintas yang terus menerus, langsung, dan tidak terhalang dari satu bagian ZEE dan laut bebas kebagian lain dari ZEE dan laut bebas (UNCLOS 1982 Pasal 53 ayat 3). Melalui Peraturan Pemerintah Nomer 37 tahun 2002, Indonesia telah mengatur dan menetapkan 3 ALKI. Jalur ALKI merupakan jalur strategis yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pengamanan jalur ini perlu diperkuat jika terjadi konflik di LCS karena beberapa alasan penting:

(1) Keamanan Nasional. Jalur ALKI seolah membelah keutuhan wilayah NKRI. Meskipun ketentuan Hak Lintas Damai telah diatur dalam UNCLOS 82, salah satunya adalah saat berlayar/bernavigasi di ALKI dilakukan dengan damai, namun-negara yang berkonflik dapat saja tidak mentaati ketentuan yang ada dengan dalih kepentingan militer mereka, misalnya berlayar/bernavigasi tidak sesuai dengan rute yang telah ditentukan/diijinkan. Sehingga pengamanan yang kuat diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional.

(2) Perlindungan Ekonomi. Jalur ALKI merupakan rute penting bagi perdagangan internasional dan domestik. Gangguan di jalur ini dapat mengganggu arus barang dan jasa, yang pada akhirnya akan berdampak negatif pada perekonomian Indonesia. Pengamanan yang kuat memastikan kelancaran perdagangan dan perlindungan ekonomi.

(3) Stabilitas Nasional dan Regional. Peningkatan pengamanan, pengawasan, dan pelarangan jalur ALKI akan mencegah penggunaan jalur ALKI untuk kepentingan militer negara-negara yang terlibat konflik di LCS, sehingga akan membantu mencegah eskalasi konflik serta menjaga stabilitas nasional maupun regional.

3) **Penerapan *Air Defence Identification Zone (ADIZ)* secara terbatas.**

Dalam konteks LCS, untuk menangani situasi keamanan udara yang kompleks dan mencegah insiden yang tidak diinginkan akibat dampak dari *spillover* eskalasi konflik, maka perlu adanya penerapan zona identifikasi pertahanan udara meskipun dilakukan secara terbatas di wilayah-wilayah/ lokasi tertentu dengan pertimbangan keterbatasan alutsista yang dimiliki maupun anggaran yang tersedia untuk pengadaan alutsista baru. Hal ini juga dapat menjadi bagian dari strategi negara untuk menegaskan klaim teritorialnya di wilayah tersebut. Namun, penetapan ADIZ perlu dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari eskalasi konflik yang lebih besar. Dalam hal ini, penerapan ADIZ perlu diterapkan di daerah Kepulauan Natuna, daerah/pulau-pulau penting disepanjang koridor jalur ALKI dan masih dalam jangkauan pesawat tempur sergap(*interceptor*) TNI AU yang berpangkalan di Lanud Pontianak, Pekanbaru, Madiun, dan Hasannudin. (lihat Lampiran 16). Sebagai contoh, beberapa negara di wilayah Laut China Timur telah menerapkan ADIZ ini.<sup>61</sup> (Lihat Lampiran 17)

4) **Penerapan *Anti Acces/Area Denial* secara terbatas.**

Penerapan *Anti-Access/Area Denial (A2/AD)* diperlukan dalam konteks konflik di LCS karena dapat membantu Indonesia dalam memperkuat pertahanan negara dan mengurangi niat musuh/pihak yang tidak dikehendaki untuk beroperasi di wilayah yang telah ditetapkan sebagai wilayah A2/AD. Misalnya, China

<sup>61</sup> <https://www.businessinsider.com/tensions-in-the-south-china-sea-explained-in-18-maps-2014-11>

telah mengimplementasikan strategi A2/AD di LCS dengan pemasangan rudal-rudal anti-kapal dan sistem pertahanan udara canggih di pulau-pulau buatanya. Sebagai contoh, Rusia telah menerapkan A2/AD di Krimea dan Siria<sup>62</sup>. (Lihat Lampiran 18).

Dengan menerapkan strategi A2/AD, Indonesia dapat menghalangi atau mempersulit akses pihak-pihak yang terlibat konflik di LCS, untuk masuk ke wilayah Indonesia, sehingga dapat meningkatkan tingkat keamanan dan kedaulatan wilayah mereka. Strategi ini juga dapat digunakan untuk merespons ancaman atau agresi dari pihak lain, sehingga dapat pula menjadi *deterrent* efektif. Adapun metode yang digunakan untuk melaksanakan A2/AD dapat bervariasi, antara lain:

- a) Senjata anti-pesawat seperti rudal anti-pesawat dan sistem pertahanan udara.
- b) Senjata anti-kapal seperti rudal anti-kapal dan sistem pertahanan kapal.
- c) Sistem pertahanan darat seperti rudal anti-udara, rudal anti-kapal. dan sistem pertahanan darat lainnya.
- d) Sistem pertahanan udara seperti rudal anti-pesawat dan sistem pertahanan udara lainnya.
- e) Sistem pertahanan laut seperti rudal anti-kapal dan sistem pertahanan laut lainnya.

Agar dapat optimal, strategi A2/AD hendaknya diterapkan kolaboratif antara 3 Matra, terutama oleh TNI AL dan TNI AU untuk pengamanan di laut dan udara, sedangkan TNI AD dalam bentuk perkuatan di daerah pesisir atau obyek vital di darat, bersinergi dengan *coastal defense* Yon Arhanudmar TNI AL. Dalam implementasinya, unsur Udara dapat melibatkan Skadron Udara yang berada di Pekanbaru, Pontianak, Madiun, Hasanuddin, ataupun penempatan sementara pesawat tempur di Natuna. Unsur Laut, fokus melaksanakan penggelaran SSAT di

---

<sup>62</sup> [https://www.researchgate.net/figure/Estimated-ranges-of-selected-Russian-missile-systems-located-in-Crimea-A2-AD-The-Author\\_fig3\\_357207810](https://www.researchgate.net/figure/Estimated-ranges-of-selected-Russian-missile-systems-located-in-Crimea-A2-AD-The-Author_fig3_357207810)

Natuna, area *chokepoints*, jalur ALKI, dan perkuatan pertahanan pesisir. (lihat Lampiran 19).

c. **Strategi *Smartpower*.**

*Smartpower* adalah pendekatan yang berfokus pada kombinasi antara kekuatan militer dan diplomasi, guna mencapai tujuan politik yang diinginkan. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh Joseph Nye, seorang akademisi yang menggarisbawahi pentingnya kedua pendekatan tersebut dalam rangka menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Dalam konteks Indonesia, penerapan smart power melibatkan upaya untuk memperkuat posisi militer agar dapat mempertahankan kedaulatan, sambil tetap mendorong dialog dan kerjasama dengan negara-negara lain di kawasan.

Dalam memposisikan diri dalam konflik LCS, Indonesia menerapkan konsep strategi "*smartpower*" yang menggabungkan dua elemen kekuatan, yaitu kekuatan keras (*hardpower*) dan kekuatan lunak (*softpower*). Konsep ini diharapkan dapat mengoptimalkan posisi Indonesia dalam mencapai tujuan strategis nasionalnya sambil mempertahankan stabilitas regional.

Strategi *smartpower* Indonesia dalam menghadapi konflik di Laut China Selatan harus tercermin dari kebijakan penguatan angkatan udara, angkatan laut, dan pengawasan wilayah perairan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia terus meningkatkan kapasitas pertahanan maritim melalui modernisasi alutsista, pelatihan manpower, serta peningkatan patroli di kawasan yang konflik. Salah satu langkah signifikan adalah penambahan jumlah kapal perang dan pesawat patroli maritim, yang bertujuan untuk menjaga penguasaan di perairan Laut Natuna Utara. Selain itu, perlunya peningkatan pengawasan dengan menggunakan teknologi canggih, seperti penggunaan drone dan sistem radar, juga menjadi bagian dari strategi penguatan ini. Dengan kekuatan militer yang tangguh, ini merupakan suatu upaya penangkalan (*deterrence*) untuk menunjukkan ketegasan Indonesia terhadap area-area strategis pertahanan.

Tidak dipungkiri, pendekatan diplomatik sebagai softpower sangat penting untuk menciptakan stabilitas dan mengurangi ketegangan di Laut China Selatan. Indonesia memanfaatkan posisi strategisnya sebagai negara ASEAN untuk mendorong kerjasama multilateral dan dialog antar negara dalam menghadapi konflik tersebut. Melalui forum-forum seperti ASEAN Regional Forum (ARF) dan East Asia Summit (EAS), Indonesia aktif berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam mencari solusi damai atas konflik yang ada. Salah satu contoh konkret dari penggunaan softpower ini adalah dicanangkannya *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*, yang menekankan kerja sama ekonomi, keamanan, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan. Melalui pendekatan ini, Indonesia menawarkan sebuah kerangka kerja yang melibatkan semua pihak untuk berdialog dan menciptakan suasana yang kondusif dalam penyelesaian sengketa di Laut China Selatan.

Di sisi lain, peningkatan kekuatan militer seharusnya tidak dikesampingkan dari aspek diplomasi. Indonesia harus tetap dapat menunjukkan kepada negara lain bahwa kekuatan militer yang meningkat tidak dimaksudkan untuk menimbulkan ketegangan, melainkan sebagai langkah untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan wilayah. Dengan demikian, upaya ini dapat memberikan pesan jelas kepada pihak mana pun bahwa Indonesia, sebagai bagian dari komunitas internasional, tetap berkomitmen untuk menyelesaikan konflik melalui cara yang damai, tetapi dengan tetap menyiapkan diri untuk mempertahankan kedaulatan apabila diperlukan.

Di samping strategi yang telah disusun di atas, dalam konteks sengketa di LCS, Indonesia harus mampu membaca peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya mengantisipasi eskalasi konflik, terutama di tengah dinamika geopolitik yang selalu berubah.

1) **Peluang dalam menghadapi eskalasi konflik.**

a) Penguatan kerja sama multilateral.

Salah satu peluang utama yang dapat dioptimalkan oleh Indonesia adalah penguatan kerja sama multilateral.

Organisasi seperti ASEAN memiliki potensi besar untuk menjadi platform efektif dalam mediasi dan penyelesaian sengketa. Sebagai negara yang dituakan di ASEAN, Indonesia harus terus memelopori upaya mediasi/dialog tersebut.

b) Penguatan diplomasi regional.

Diplomasi menjadi senjata penting dalam menghadapi ketegangan. Negara-negara mitra, seperti AS, Jepang, dan Australia, memiliki kepentingan strategis di LCS dan dapat memberikan dukungan diplomatik yang signifikan. Indonesia terus mendorong upaya pendekatan diplomatik guna memberi peluang bagi negara-negara yang terlibat sengketa untuk menggalang solidaritas dan menciptakan tekanan internasional terhadap perilaku agresif yang dapat memicu konflik.

c) Investasi dalam pertahanan.

Situasi keamanan yang tidak menentu di LCS mengharuskan Indonesia untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara. Dengan investasi dalam teknologi militer dan alutsista modern, Indonesia tidak hanya dapat melindungi kedaulatan wilayahnya, tetapi juga menunjukkan ketegasan dalam menjaga kepentingan nasional. Hal ini juga dapat berfungsi sebagai *deterrent* terhadap tindakan-tindakan yang dapat memicu konflik.

d) Pengembangan bersama sumber daya energi alternatif.

Kekayaan SKA di LCS, terutama potensi minyak dan gas, menjadi sorotan banyak negara. Oleh sebab itu, investasi bersama dalam pengembangan sumber daya energi alternatif dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang diperebutkan, sehingga mengurangi intensitas konflik yang mungkin muncul. Inisiatif untuk mencari dan mengembangkan sumber daya energi terbarukan menjadi langkah progresif yang patut diambil.

## 2) **Kendala dalam menghadapi eskalasi konflik.**

### a) Sikap agresif China.

Kendala utama yang dihadapi oleh negara-negara di kawasan LCS adalah sikap agresif China dalam mempertahankan klaimnya yang luas atas wilayah tersebut. Tindakan seperti pembangunan pulau buatan dan penempatan fasilitas militer di area sengketa menambah ketegangan yang ada. Hal ini menciptakan tantangan besar bagi negara-negara lain dalam merespons tanpa memicu konflik yang lebih besar.

### b) Ketidakpastian politik global.

Lingkungan geopolitik global yang tidak menentu, terutama terkait dengan kebijakan luar negeri negara besar seperti AS dan Rusia, mempengaruhi stabilitas di kawasan ini. Ketidakpastian dalam komitmen negara-negara besar terhadap aliansi dan perjanjian internasional membuat negara-negara kecil di kawasan Asia merasa tidak memiliki sandaran yang kuat dalam menghadapi tekanan dari China.

### c) Kurangnya solidaritas antarnegara ASEAN.

Meskipun ASEAN memiliki potensi sebagai platform untuk menyelesaikan sengketa, kurangnya solidaritas di antara negara-negara anggota sering kali menjadi penghalang. Perbedaan pandangan, kepentingan nasional yang beragam, serta ketergantungan ekonomi pada China membuat beberapa negara ragu untuk mengambil sikap yang lebih tegas dalam menghadapi agresi. Hal ini mengakibatkan terhambatnya upaya kolektif dalam menyelesaikan konflik.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **16. Simpulan.**

Laut China Selatan memiliki nilai strategis yang sangat tinggi bagi Indonesia, terutama dalam konteks ekonomi dan keamanan. Ketersediaan sumber daya alam, jalur pelayaran internasional, serta kepentingan ekonomi lainnya membuat kawasan ini sangat penting bagi Indonesia. Ancaman yang dihadapi Indonesia di LCS meliputi potensi eskalasi konflik antar negara yang memiliki klaim teritorial, serta pelanggaran wilayah udara dan laut. Dinamika yang terus berkembang dengan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi akibat eskalasi konflik di LCS perlu dicermati.

Optimalisasi pertahanan negara Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain penambahan dan modernisasi kekuatan militer, penguatan diplomasi pertahanan, serta peningkatan kerjasama internasional. Dalam aspek modernisasi kekuatan militer, Indonesia telah melakukan berbagai langkah untuk memperkuat angkatan bersenjata, termasuk pembelian alutsista baru dan peningkatan kemampuan personel. Penguatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki kapasitas yang memadai dalam menghadapi setiap ancaman di LCS. Bukan hanya dari sisi kekuatan militer saja, tetapi aspek diplomasi juga menjadi sangat penting dalam mengantisipasi eskalasi konflik. Indonesia aktif berpartisipasi dalam forum-forum regional dan internasional, seperti ASEAN, dalam menjaga dialog damai di antara para pemangku kepentingan. Melalui pendekatan diplomatik yang proaktif, Indonesia dapat berperan sebagai mediator dan menciptakan iklim kepercayaan antar negara yang terlibat, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya konflik bersenjata.

Salah satu pengaruh/dampak utama dari strategi optimalisasi pertahanan Indonesia adalah peningkatan stabilitas di kawasan LCS. Dengan memperkuat posisi pertahanannya, Indonesia tidak hanya melindungi kedaulatan wilayah, tetapi juga memberikan sinyal kepada negara-negara lain bahwa Indonesia berkomitmen untuk menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah tersebut. Langkah ini dapat

mengurangi kemungkinan penggunaan kekuatan militer oleh negara-negara yang mengklaim wilayah yang sama dan mendorong mereka untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui dialog.

Di sisi lain, ketegasan Indonesia dalam menegakkan hukum di wilayah perairannya, termasuk penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal di ZEE Indonesia, juga mendukung stabilitas regional. Hal ini menunjukkan kepada negara-negara yang memiliki klaim tumpang tindih bahwa Indonesia akan menanggapi setiap pelanggaran dengan tegas, tanpa memperdulikan tekanan politik yang mungkin timbul.

Meskipun strategi optimalisasi pertahanan menunjukkan hasil yang positif, Indonesia juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan anggaran pertahanan yang sering kali menghambat modernisasi alutsista. Selain itu, kesenjangan teknologi juga menjadi perhatian utama, terutama dalam menghadapi negara-negara yang memiliki kekuatan militer lebih besar. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa strategi pertahanan Indonesia dapat terus berkembang sesuai dengan dinamika yang ada.

Prospek ke depan menunjukkan pentingnya Indonesia untuk terus memperkuat sinergi antara kekuatan militer, diplomasi, dan kerjasama internasional. Dalam konteks LCS yang terus berkembang, pendekatan yang holistik dan adaptif akan memungkinkan Indonesia untuk mengelola risiko secara efektif, menjaga kedaulatan wilayah, dan berkontribusi pada stabilitas kawasan secara keseluruhan.

#### **17. Rekomendasi.**

Guna langkah-langkah strategi yang telah disusun dalam pembahasan sebelumnya dapat terimplementasikan dengan baik, efektif, dan efisien, maka untuk pelaksanaannya secara bertahap, yang terbagi dalam 3 (tiga) rekomendasi yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, dengan rincian sebagai berikut:

**a. Rekomendasi Jangka Pendek****1) Peningkatan kapabilitas intelijen dan pengawasan.**

a) **Kementerian Pertahanan** (Kemenhan): memfasilitasi pengadaan alutsista berteknologi canggih seperti drone, satelit, dan radar untuk memantau aktivitas di LCS.

b) **Badan Intelijen Negara** (BIN): mengumpulkan dan menganalisis data intelijen terkait aktivitas di wilayah LCS.

c) **TNI AL dan TNI AU**: meningkatkan patroli dan pengawasan di wilayah Laut Natuna Utara sampai dengan batas terluar ZEE Indonesia.

d) **Badan Keamanan Laut** (Bakamla): Melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia

**2) Latihan militer bersama**

a) **Kemenhan**: mengkoordinasikan latihan dan memastikan keterlibatan berbagai elemen militer.

b) **TNI**: menyelenggarakan latihan militer bersama (Latma) dengan negara-negara sahabat seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, Rusia, dan China dengan tetap mengedepankan politik netralitas dan tidak bertujuan membentuk suatu aliansi. Misalnya dalam bentuk latma penanggulangan bencana atau misi kemanusiaan.

**3) Penguatan kehadiran militer**

a) **Kemenhan**: mengalokasikan sumber daya untuk mendukung peningkatan kehadiran militer.

b) **TNI AL dan TNI AU**: meningkatkan kehadiran kapal perang, dan pesawat patroli di sekitar Kepulauan Natuna.

**4) Diplomasi proaktif**

a) **Kementerian Luar Negeri** (Kemenlu): mengintensifkan diplomasi melalui ASEAN dan forum internasional lainnya.

b) **Kemenhan**: mendukung upaya diplomasi Kemenlu dengan informasi dan analisis strategis.

5) **Kerjasama Penegakan Hukum**

a) **Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)**: mengatasi penangkapan ikan ilegal melalui patroli bersama dengan TNI AL.

b) **Polri**: menangani penyelundupan dan kejahatan lainnya di laut.

b. **Rekomendasi Jangka Menengah.**

1) **Pengembangan Kapabilitas Militer.**

a) **Kemenhan**: modernisasi alutsista dan peningkatan kemampuan tempur.

b) **TNI**: meningkatkan kapasitas personel militer melalui pelatihan dan pendidikan.

2) **Penguatan Infrastruktur Pertahanan.**

a) **Kemenhan**: membangun dan memperkuat pangkalan militer di wilayah strategis.

b) **Kementerian PUPR**: mendukung pembangunan infrastruktur pertahanan.

3) **Pengembangan Teknologi Pertahanan.**

a) **Kemenhan**: Investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi pertahanan.

b) **Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)**: mengembangkan teknologi maritim dan sistem senjata.

4) **Peningkatan Kerjasama Regional.**

a) **Kemenlu**: membangun aliansi strategis dengan negara-negara ASEAN dan lainnya.

b) **Kemenhan**: menyelenggarakan pertemuan dan latihan bersama.

5) **Penguatan Basis Hukum dan Regulasi.**

a) **Kementerian Hukum dan HAM**: memperkuat regulasi yang mengatur pertahanan dan keamanan.

b) **DPR RI**: mendukung legislasi terkait pertahanan.

**c. Rekomendasi Jangka Panjang.**

**1) Peningkatan Anggaran Pertahanan.**

- a) **Kemenhan:** apabila kondisi perekonomian nasional mendukung, agar menyediakan anggaran yang memadai untuk pengembangan kapabilitas militer dan infrastruktur.
- b) **Kementerian Keuangan (Kemenkeu):** mendukung alokasi anggaran pertahanan.

**2) Pengembangan Sumber Daya Manusia.**

- a) **Kemenhan:** mengembangkan program pelatihan dan pendidikan untuk personel militer.
- b) **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud):** mendukung pendidikan pertahanan.

**3) Pendidikan dan Kesadaran Publik.**

- a) **Kemenhan:** meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya pertahanan dan keamanan nasional.
- b) **Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo):** mendukung kampanye kesadaran publik.

**4) Pengembangan Diplomasi Pertahanan.**

- a) **Kemenlu dan Kemenhan:** mengembangkan strategi diplomasi pertahanan jangka panjang.
- b) **TNI:** menjalin kerjasama militer dengan negara-negara sahabat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku.

- \_\_\_\_\_. ( August 30, 1951). *Mutual Defense Treaty Between the United States and the Republic of the Philippines*. Artikel IV, V.
- Creswell, JW.(2014). *Research Design:Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Singapore (SG): Sage Publication.
- Lembaga Ketahanan Nasional RI. (2024). Bidang Studi: Pertahanan dan Keamanan.
- Lembaga Ketahanan Nasional RI. (2024). Bidang Studi: Strategi.
- Lembaga Ketahanan Nasional RI. (2024). Bidang Studi: Hubungan Internasional.
- Sanusi A. (2012). "Metode Penelitian Bisnis". Jakarta (ID): Salemba Empat.
- U.S. Energy Information Administration. *Regional analysis Brief:South China Sea*.

### Jurnal.

- Fakhrian M,Rifqi.(2023). "Analisis Geopolitik Abad 21 Di Indo-Pasifik Dan Persiapan Indonesia Dalam Menyikapi Konflik Di Laut Cina Selatan". *Jurnal Lemhannas*, Vol 11 No 3.  
Sumber:<https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/479>
- Kiyono, Ken. *A Study of The Concept of The National Interest of Hans J.Morgenthau as The Standard of America Foreign Policy*. *Journal of Business and Academic Nagasaki University*, Volume 49 No.3.
- Maksum, Ali.(2017). "Regionalisme dan Kompleksitas Laut China Selatan". *Jurnal Sospol*, Vol.3 No.1 (Januari-Juni 2017), Hlm 1-25. Sumber:  
<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/download/4398/4857>
- Sudira, I Nyoman."Konflik Laut China Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa". *Jurnal Unpar*. Sumber:  
<https://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasiona/article/download/1313/1276>

### Peraturan Perundang-undangan.

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.

Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024.

Peraturan Pemerintah RI No 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

Permenhan RI No 19 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Penyelarasan MEF Komponen Utama.

Permenhan RI No 12 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2020-2024.

Dephan RI. "Doktrin Hanneg". Jakarta.(2007).Hal 19.

Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1312/XII/2018 Tanggal 10 Desember 2018 Tentang Pembangunan Prioritas Pulau Terluar Tertentu dan Daerah yang Bersifat Strategis.

Konsep Postur TNI Angkatan Darat Tahun 2025-2044.

International Civil Aviation Organization (ICAO) Regulation, Annex 4.

### Sumber Lain.

\_\_\_\_.Linnaeus University.(2022). *ASEAN Policy towards the South China Sea:A Neoclassical Realism and Two-Level Games Analysis*, sumber: <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1668175/FULLTEXT01.pdf>, diakses pada tanggal 12 Maret 2024.

\_\_\_\_.(2020)." Kenali UNCLOS, Dasar Hukum Internasional untuk Kedaulatan Indonesia di Natuna", sumber: <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-unclos--dasar-hukum-internasional-untuk-kedaulatan-indonesia-di-natuna-1t5e16f5b67589c/>, diakses pada tanggal 15 Maret 2024.

\_\_\_\_.(2023). *U.S. Navy Destroyer Conducts Freedom of Navigation Operation in the South China Sea*, sumber: <https://www.navy.mil/Press-Office/News-Stories/Article/3578783/us-navy-destroyer-conducts-freedom-of-navigation-operation-in-the-south-china-s/>, diakses pada tanggal 19 Maret 2024.

- \_\_\_\_\_.(2024). *What Does China Really Spend on its Military?*, sumber: <https://chinapower.csis.org/military-spending/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2024.
- \_\_\_\_\_.(2024).” Heboh Anggaran Kemenhan Rp700 T, Pernah Dipangkas Saat Covid”, sumber: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240108065321-4-503598/heboh-anggaran-kemenhan-rp700-t-pernah-dipangkas-saat-covid>, diakses pada tanggal 20 Maret 2024.
- \_\_\_\_\_.(2024). *Philippines, US to hold military drills in islands facing South China Sea, Taiwan*, sumber: <https://www.rappler.com/philippines/united-states-hold-military-drills-islands-facing-south-china-sea-taiwan/>, diakses pada tanggal 1 April 2024.
- \_\_\_\_\_.(2023). *US, allies hold naval exercise in South China Sea*, sumber: <https://www.rfa.org/english/news/southchinasea/scs-naval-exercise-10252023033045.html>, diakses pada tanggal 1 April 2024.
- \_\_\_\_\_.(2024). *China holds ‘combat patrol’ in South China Sea amid US-led war games*, sumber: <https://www.aljazeera.com/news/2024/4/7/china-holds-combat-patrol-in-south-china-sea-amid-us-led-war-games>, diakses pada tanggal 8 April 2024.
- \_\_\_\_\_.(2020). *Are Maritime Law Enforcement Forces Destabilizing Asia?*, sumber: <https://csis-ilab.github.io/cpower-viz/csis-china-sea/>, diakses pada tanggal 9 April 2024.
- \_\_\_\_\_.(2023). *US accuses China’s Air Force of ‘risky’ behaviour in skies above Pacific*, sumber: <https://www.aljazeera.com/news/2023/10/18/us-accuses-chinas-air-force-of-risky-behaviour-in-skies-above-pacific>, diakses pada tanggal 9 April 2024.
- \_\_\_\_\_.(2023). *Fact Sheet: U.S.-Philippines Bilateral Defense Guidelines*, sumber: <https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3383607/fact-sheet-us-philippines-bilateral-defense-guidelines/>, diakses pada tanggal 20 April 2024.
- \_\_\_\_\_.(2023). *Vietnam Ramps Up Spratly Island Dredging*, sumber: <https://amti.csis.org/vietnam-ramps-up-spratly-island-dredging/>, diakses pada tanggal 20 April 2024.
- \_\_\_\_\_.(2017). “China Bangun Fasilitas Militer Baru di Laut China Selatan”, sumber: <https://internasional.kompas.com/read/2017/06/30/09252721/china.bangun.fasilitas.militer.baru.di.laut.china.selatan?page=all>, diakses pada tanggal 16 Juni 2024.

\_\_\_\_.(2022). "AS Tuduh China Sulap 3 Pulau di Laut China Selatan Jadi Basis Militer", sumber: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220321130801-113-774170/as-tuduh-china-sulap-3-pulau-di-laut-china-selatan-jadi-basis-militer>, diakses pada tanggal 17 Juni 2024.

\_\_\_\_.( 2014). *Tensions In The South China Sea Explained In 18 Maps*, sumber: <https://www.businessinsider.com/tensions-in-the-south-china-sea-explained-in-18-maps-2014-11>, diakses pada tanggal 2 Juli 2024.

Ahdiat, Adi.(2024). "Ini Perbandingan Anggaran Pertahanan Era SBY dan Jokowi", sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/04/ini-perbandingan-anggaran-pertahanan-era-sby-dan-jokowi>, diakses pada tanggal 20 Maret 2024.

Bintang P.,Ananda.(2024). "Ramai Dibahas saat Debat, Ini Rincian Anggaran Kementerian Pertahanan dari 2020-2024", sumber: <https://nasional.tempo.co/read/1819408/ramai-dibahas-saat-debat-ini-rincian-anggaran-kementerian-pertahanan-dari-2020-2024>, diakses pada tanggal 20 Maret 2024.

Cordesman, Anthony H.(2023). *China's Emergence as a Superpower:A Graphic Comparison of the United States, Russia, China, and Other Major Powers*, sumber: <https://www.csis.org/analysis/chinas-emergence-superpower>, diakses pada tanggal 15 Maret 2024.

Dirgantara, Adhyasta.(2024). "TNI AD Ingin Bangun 22 Kodam Baru, KSAD Sebut Agar Imbang dengan Polda", sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/07/19261031/tni-ad-ingin-bangun-22-kodam-baru-ksad-sebut-agar-imbang-dengan-polda?page=all>, diakses pada tanggal 21 Juni 2024.

Dobija, Konrad.(2021). *The Political and Military Aspects of Creating Anti-Access/Area-Denial Systems (A2/AD): The Example Of China and Russia*, sumber: [https://www.researchgate.net/publication/357207810\\_The\\_Political\\_and\\_Military\\_Aspects\\_of\\_Creating\\_Anti-AccessArea-Denial\\_Systems\\_A2AD\\_The\\_Example\\_Of\\_China\\_and\\_Russia](https://www.researchgate.net/publication/357207810_The_Political_and_Military_Aspects_of_Creating_Anti-AccessArea-Denial_Systems_A2AD_The_Example_Of_China_and_Russia), diakses pada tanggal 2 Juli 2024.

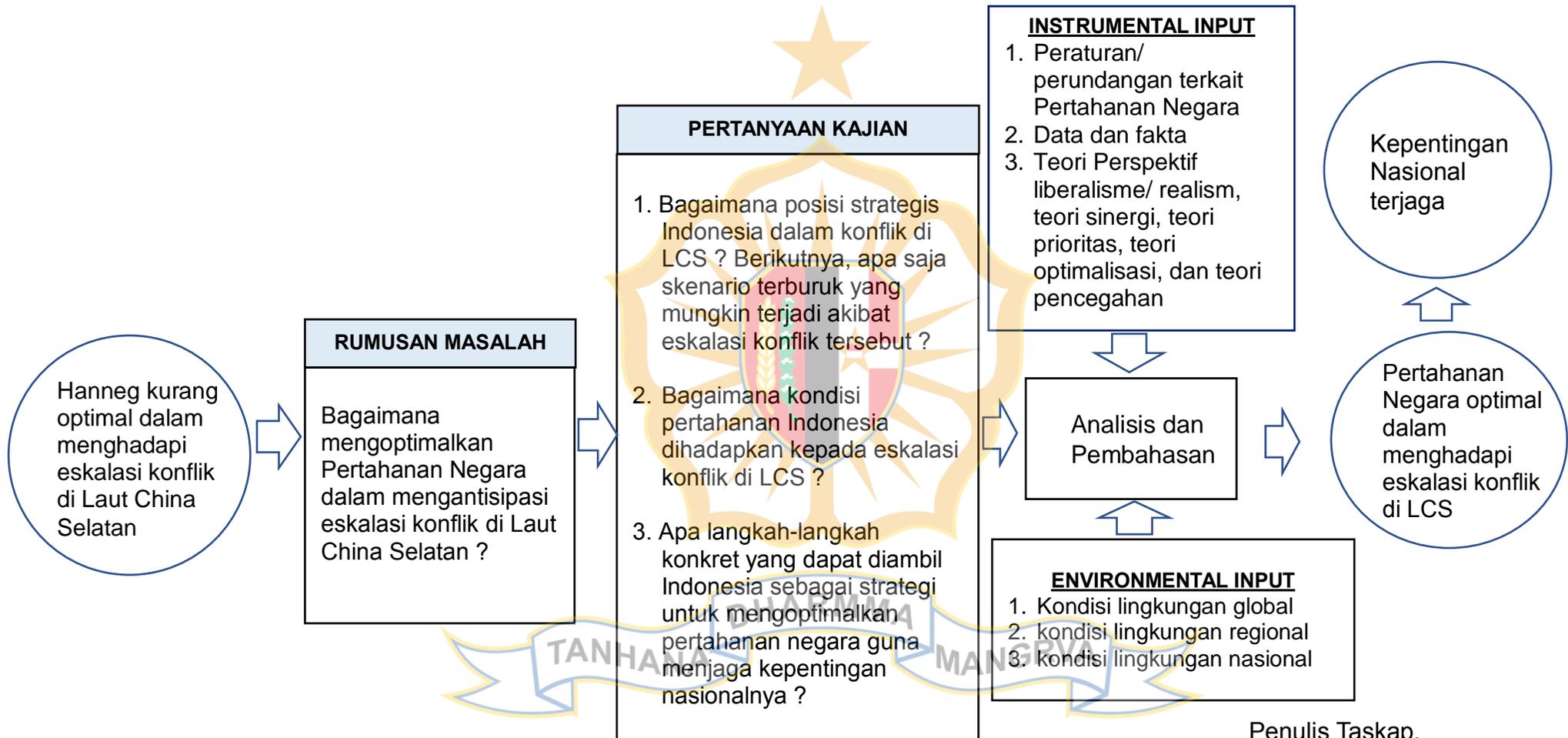
Fanell, James E.(2019). *The Trump Maritime Strategy*, sumber: <https://www.gisreportsonline.com/r/u-s-navy/>, diakses pada tanggal 12 Maret 2024.

Gomez, Jim.(2024). *US, Japan, Australia and the Philippines to Stage Military Drills in Disputed South China Sea*, sumber: <https://www.military.com/daily-news/2024/04/06/us-japan-australia-and-philippines-stage-military-drills-disputed-south-china-sea.html>, diakses pada tanggal 2 April 2024.

- Hurst, Daniel.(2022). *A dangerous act': how a Chinese fighter jet intercepted an RAAF aircraft and what happens next*, sumber: <https://www.theguardian.com/australia-news/2022/jun/07/a-dangerous-act-how-a-chinese-fighter-jet-intercepted-an-raaf-aircraft-and-what-happens-next>, diakses pada tanggal 10 April 2024.
- Jakhar, Pratik.(2021). *Whatever happened to the South China Sea ruling?*, sumber: <https://www.lowyinstitute.org/the-interpretor/whatever-happened-south-china-sea-ruling>, diakses pada tanggal 19 Maret 2024.
- Kahn, Lauren.(2023). *AUKUS Explained: How Will the Trilateral Pact Shape Indo-Pacific Security?*, sumber: <https://www.cfr.org/in-brief/aukus-explained-how-will-trilateral-pact-shape-indo-pacific-security>, diakses pada tanggal 28 Maret 2024.
- Lyons, Marco J.(2024). *War with China: A View from Early 2024*, sumber: <https://ssi.armywarcollege.edu/SSI-Media/Recent-Publications/Display/Article/3738629/war-with-china-a-view-from-early-2024/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2024.
- Longley, Robert.(2022). *Gunboat Diplomacy: Teddy Roosevelt's 'Big Stick' Policy*, sumber: <https://www.thoughtco.com/gunboat-diplomacy-4774988>, diakses pada tanggal 23 Juni 2024.
- Mahadzir, Dzirham.(2023). *U.S., Australia, Japan Drill with the Philippines in South China Sea; China Flies Military Drone Near Taiwan*, sumber: <https://news.usni.org/2023/08/27/u-s-australia-japan-drill-with-the-philippines-in-south-china-sea-china-flies-military-drone-near-taiwan>, diakses pada tanggal 2 April 2024.
- Mahaseth, Harsh.(2022). *The Use of The ASEAN Way In Resolving Disputes*, sumber: <https://moderndiplomacy.eu/2022/06/22/the-use-of-the-asean-way-in-resolving-disputes/>, diakses pada tanggal 5 Juni 2024.
- Mizokami, Kyle.(2023). *Why the South China Sea Could Be the Flashpoint That Starts World War III*, sumber: <https://www.popularmechanics.com/military/navy-ships/a44880553/could-south-china-sea-disputes-trigger-wwiii/>, diakses pada tanggal 6 Juni 2024.
- Meiliana G., Sarah.(2022). "China Militerisasi Tiga Pulau Buatan di Laut China Selatan, Dipasang Rudal hingga Jet Tempur", sumber: <https://rmol.id/dunia/read/2022/03/21/527572/china-militerisasi-tiga-pulau-buatan-di-laut-china-selatan-dipasang-rudal-hingga-jet-tempur>, diakses pada tanggal 6 Juni 2024.
- Mori, Hiroshi.(2023). *China's New 'Ten-Dash Line' Map Infuriates Asian Neighbors*, sumber: <https://japan-forward.com/chinas-new-ten-dash-line-map-infuriates-asian-neighbors/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2024.

- Munro, Andre.(2023). *Taiwan Strait crises*, sumber: <https://www.britannica.com/event/Taiwan-Strait-crisis>, diakses pada tanggal 20 Maret 2024.
- Ott, Haley.(2024). *As Philippines sailor hurt in South China Sea incident, U.S. cites risk of "much more violent" confrontation*, sumber: <https://www.cbsnews.com/news/south-china-sea-philippines-us-condemns-china-warns-violent-confrontation/>, diakses pada tanggal 25 Juni 2024.
- Pribady, Muhammad L.(2023). "Pemerintah Diminta Tunda Kenaikan Anggaran di Kemenhan untuk 2024", sumber: <https://news.detik.com/berita/d-7068918/pemerintah-diminta-tunda-kenaikan-anggaran-di-kemenhan-untuk-2024>, diakses pada tanggal 20 Maret 2024.
- Rosmi A.,Jenni.(2024)." Ini Fakta Lengkap Anggaran Alutsista Indonesia dari Tahun ke Tahun", sumber: <https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-pemilu/2792950/ini-fakta-lengkap-anggaran-alutsista-indonesia-dari-tahun-ke-tahun>, diakses pada tanggal 27 Maret 2024.
- Santika, Erlina F. (2023). "HUT ke-78 TNI, Berapa Anggaran Militer RI Selama 23 Tahun Terakhir?", sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/05/hut-ke-78-tni-berapa-anggaran-militer-ri-selama-23-tahun-terakhir>, diakses pada tanggal 20 Maret 2024.
- Singla, Anmol.(2024). *How Vietnam is growing bigger by building islands in South China Sea*, sumber: <https://www.firstpost.com/explainers/how-vietnam-is-growing-bigger-by-building-islands-in-south-china-sea-13781327.html>, diakses pada tanggal 28 Juni 2024.
- Tajima, Hiroshi.(2021). *Nuclear subs for Australia part of elaborate U.S. strategy to contain China*, sumber: <https://japannews.yomiuri.co.jp/world/asia-pacific/20211012-30525>, diakses pada tanggal 28 Maret 2024.
- Willy Medi Christian Nababan.(2023). "MEF Dinilai Sulit Terpenuhi, Militer Butuh Strategi Baru", sumber: <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/17/mef-dinilai-sulit-terpenuhi-militer-butuh-strategi-baru>,diakses pada tanggal 12 Maret 2024.
- Wiranto SH,Laksda TNI Dr. Surya.(2016). *The Power of Map*, sumber: <https://maritimnews.com/2016/12/the-power-of-map/>, diakses pada tanggal 18 April 2024.

## OPTIMALISASI PERTAHANAN NEGARA DALAM MENGANTISIPASI ESKALASI KONFLIK DI LAUT CHINA SELATAN GUNA MENJAGA KEPENTINGAN NASIONAL



Penulis Taskap,

Purwanto Adi Nugroho  
Kolonel Pnb. NRP 521832

LAMPIRAN 2 TABEL 1  
KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN

**Tabel 1.**

Data-data Kejadian di LCS yang Menunjukkan Konflik Terbatas antara China dengan *Claimant States*, AS, dan Australia.

NO	TAHUN	KEJADIAN	CHINA						KET
			FILIPINA	VETNAM	INDONESIA	MALAYSIA	AMERIKA	AUSTRALIA	
1	2014	7	2	5					
2	2015	15	2	13					
3	2016	14	6	4	3	1			
4	2017	2	1	1					
5	2018	2	1	1					
6	2019	5	1	3		1			
7	2020	1		1					
8	2021	1	1						
9	2022	1						1*	* udara
10	2023	4	3				1*		
11	2024	2	2						

Sumber: data dari tahun 2014 s.d. tahun 2020 bersumber dari *South China Sea Incident Tracker* oleh *China Power* dan *South China Sea Incident Tracker* oleh *Seven Mile Media*. Untuk data tahun 2021 s.d. 2024 dari berbagai sumber di internet.


  
 Penulis Taskap,  
  
 Purwanto Adi Nugroho  
 Kolonel Pnb. NRP 521832

LAMPIRAN 3 TABEL 2  
KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN

**Tabel 2.**

Data Rekap Perkembangan Anggaran Kemhan dan TNI Tahun 2015 s.d. 2024.

(Dalam Rupiah)							
NO.	URAIAN	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019	JUMLAH
1.	BELANJA PEGAWAI	40,369,516,460,000	41,804,750,612,000	41,150,793,073,000	45,460,373,347,000	52,670,494,159,000	221,455,927,651,000
2.	BELANJA BARANG	30,071,118,967,000	29,987,313,256,000	44,986,235,659,000	44,436,324,921,000	37,198,113,387,000	186,679,106,190,000
3.	BELANJA MODAL	38,288,159,370,000	40,610,339,108,000	37,819,967,414,000	23,257,212,327,000	33,895,822,817,000	173,871,501,036,000
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>108,728,794,797,000</b>	<b>112,402,402,976,000</b>	<b>123,956,996,146,000</b>	<b>113,153,910,595,000</b>	<b>123,764,430,363,000</b>	<b>582,006,534,877,000</b>
(Dalam Rupiah)							
NO.	JENIS BELANJA	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024	JUMLAH
1.	BELANJA PEGAWAI	51,397,155,227,000	50,275,443,481,000	51,988,376,323,000	51,465,138,935,000	54,749,620,747,000	259,875,734,713,000
2.	BELANJA BARANG	44,010,039,778,000	42,773,488,907,000	45,026,025,552,000	46,617,460,859,000	45,186,677,240,000	223,613,692,346,000
3.	BELANJA MODAL	48,800,719,330,000	38,234,685,884,000	57,886,781,386,000	80,734,651,956,000	44,693,588,902,000	270,350,427,458,000
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>144,207,914,335,000</b>	<b>131,283,618,272,000</b>	<b>154,901,183,271,000</b>	<b>178,817,251,750,000</b>	<b>144,629,886,889,000</b>	<b>753,839,854,517,000</b>

Sumber: Bagian Perencanaan Pertahanan (Renhan) Kemhan RI

Penulis Taskap,



Purwanto Adi Nugroho  
Kolonel Pnb. NRP 521832



**Gambar 1**

Peta *Ten Dash Line* atau 10 (Sepuluh) Garis Putus-Putus



©2023The Sankei Shimbun / JAPAN Forward

Sumber: <https://japan-forward.com/chinas-new-ten-dash-line-map-infuriates-asian-neighbors/>

Penulis Taskap,

Purwanto Adi Nugroho  
Kolonel Pnb. NRP 521832

**Gambar 2**

*Freedom of Operations di LCS oleh AS*



Sumber: <https://www.gisreportsonline.com/r/u-s-navy/>

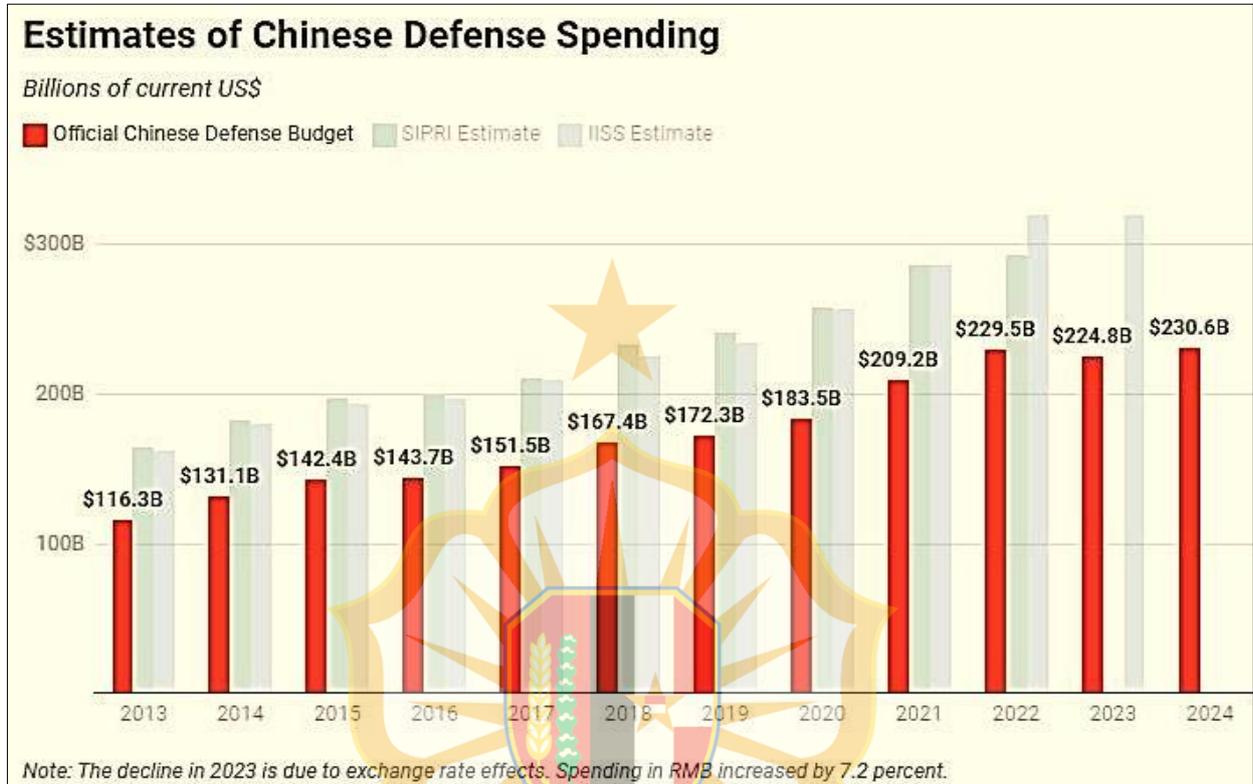


Penulis Taskap,

Purwanto Adi Nugroho  
Kolonel Pnb. NRP 521832

**Gambar 3.**

Perkiraan Anggaran Pertahanan China Tahun 2013 s.d. 2024

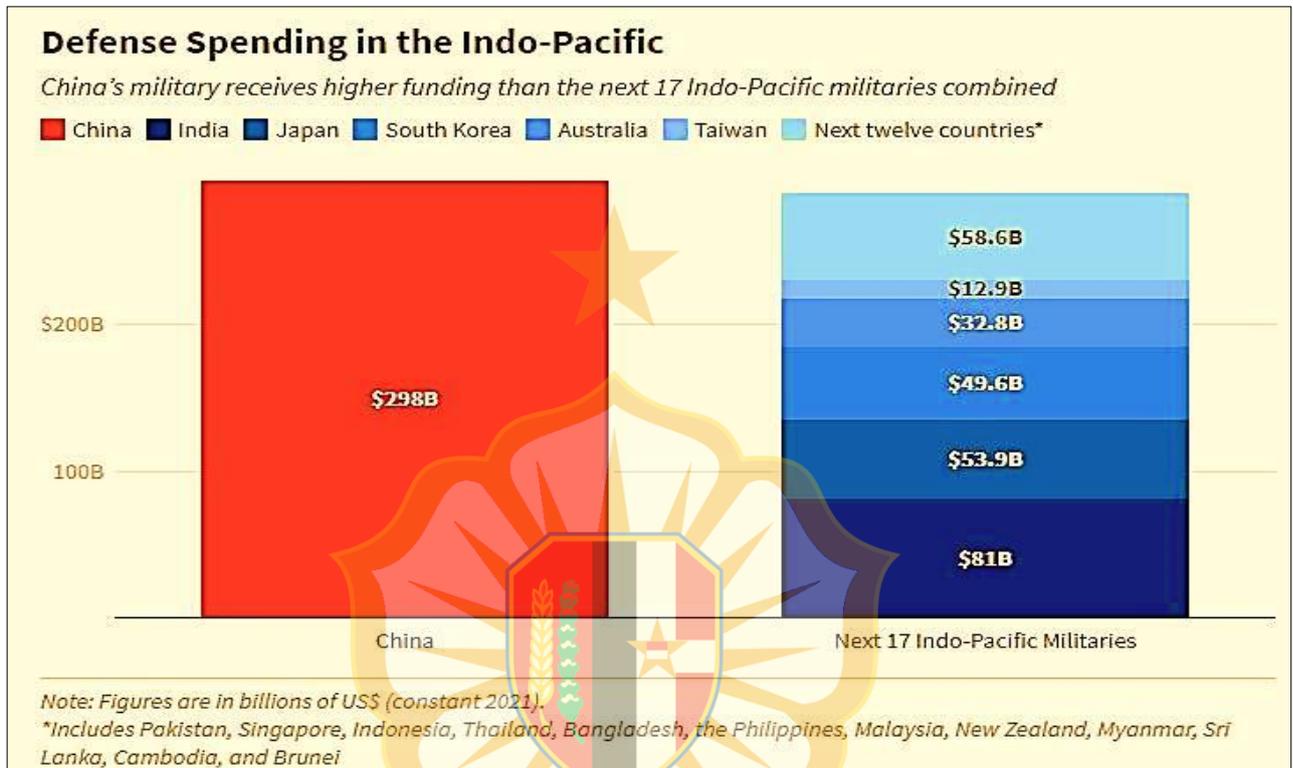


Sumber: CSIS (Centre for Strategic and International Studies) China Power Project, Chinese Central Government, SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute).



Purwanto Adi Nugroho  
Kolonel Pnb. NRP 521832

**Gambar 4.**  
Perbandingan Anggaran Pertahanan China Dibandingkan dengan Beberapa Negara di Kawasan.

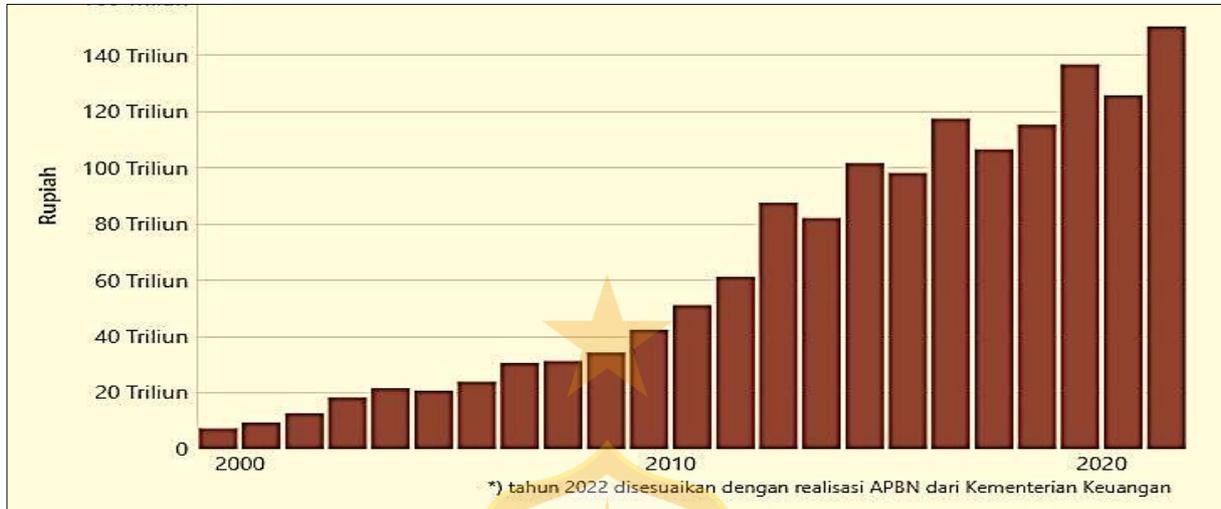


Sumber: CSIS China Power Project, SIPRI

TANHANA DHARMMA MANGRVA  
Penulis Taskap,  
  
Purwanto Adi Nugroho  
Kolonel Pnb. NRP 521832

**Gambar 5.**

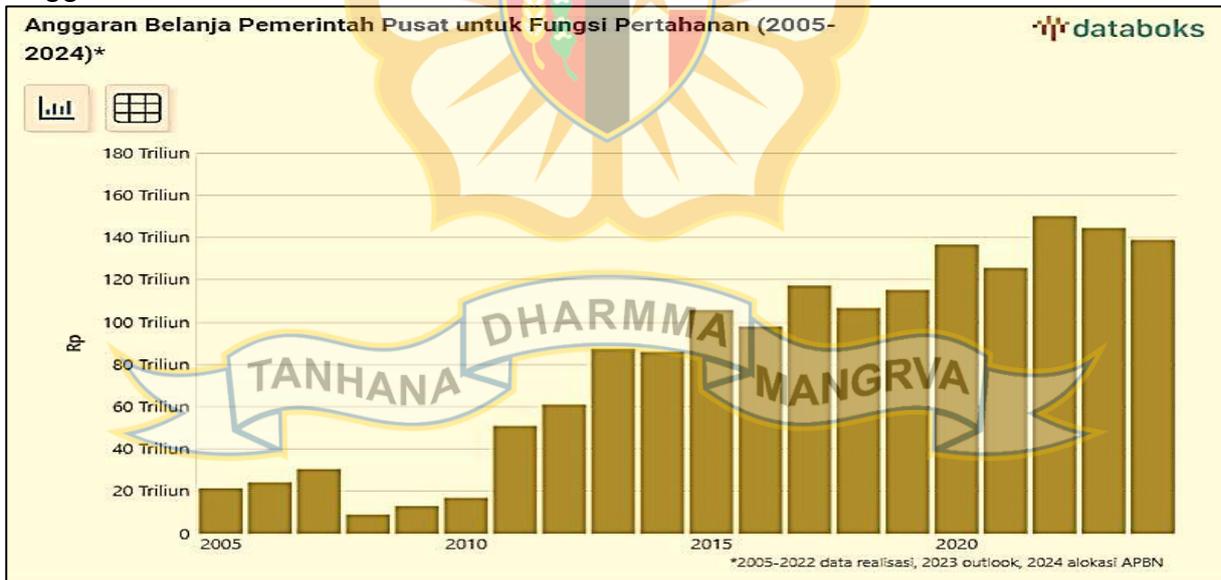
Anggaran Pertahanan Indonesia dari Tahun 2000 – 2022.



Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/05/hut-ke-78-tni-berapa-anggaran-militer-ri-selama-23-tahun-terakhir>

**Gambar 6.**

Anggaran Pertahanan Indonesia dari Tahun 2005 – 2024.



Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/04/ini-perbandingan-anggaran-pertahanan-era-sby-dan-jokowi>

Penulis Taskap,

Purwanto Adi Nugroho  
Kolonel Pnb. NRP 521832

**Gambar 7.**

Peta Situasi di Indo-Pasifik.



Sumber : <https://japannews.yomiuri.co.jp/world/asia-pacific/20211012-30525/>

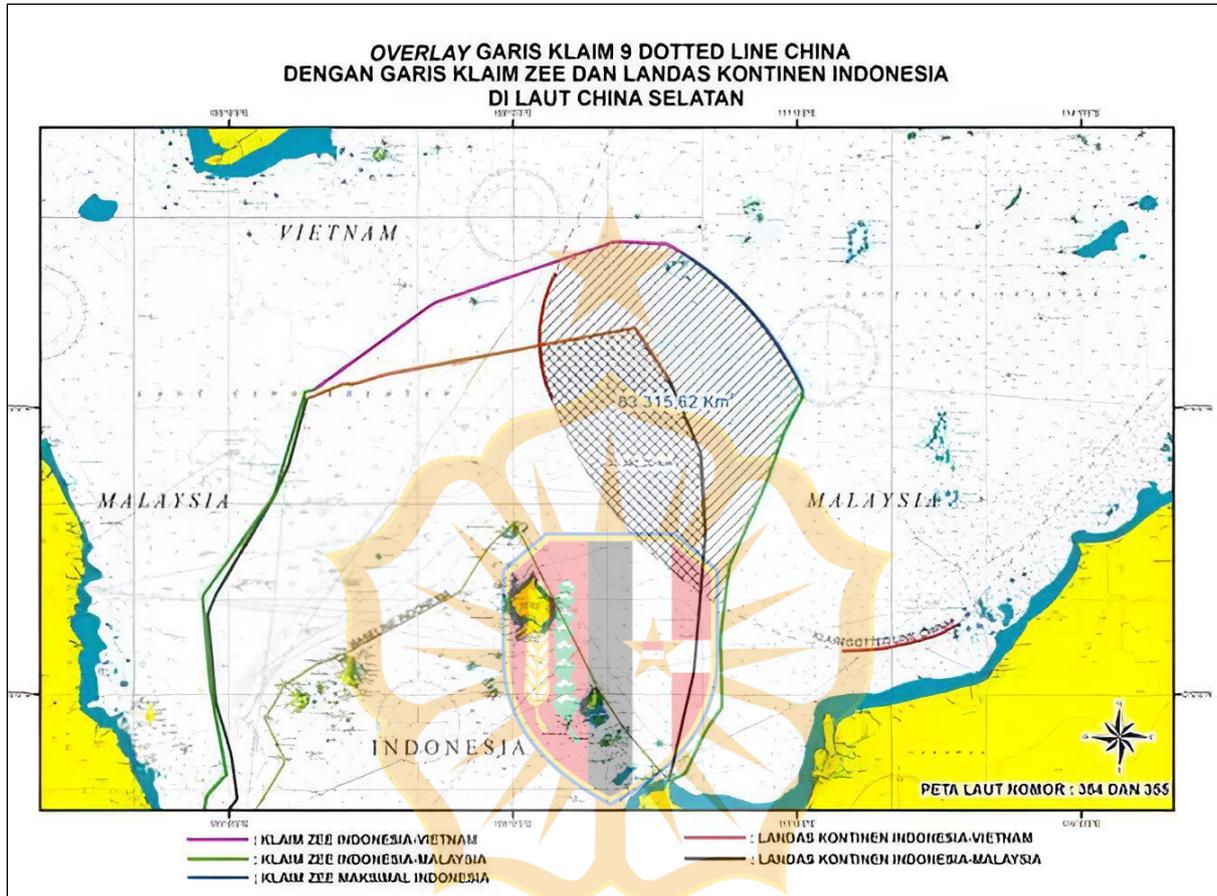


Penulis Taskap,

Purwanto Adi Nugroho  
Kolonel Pnb. NRP 521832

**Gambar 8.**

Peta Overlay Garis Klaim 9 *Dotted* China dengan Garis Klaim ZEE dan Landas Kontinen Indonesia di LCS.



Sumber : <https://maritimnews.com/2016/12/the-power-of-map/>

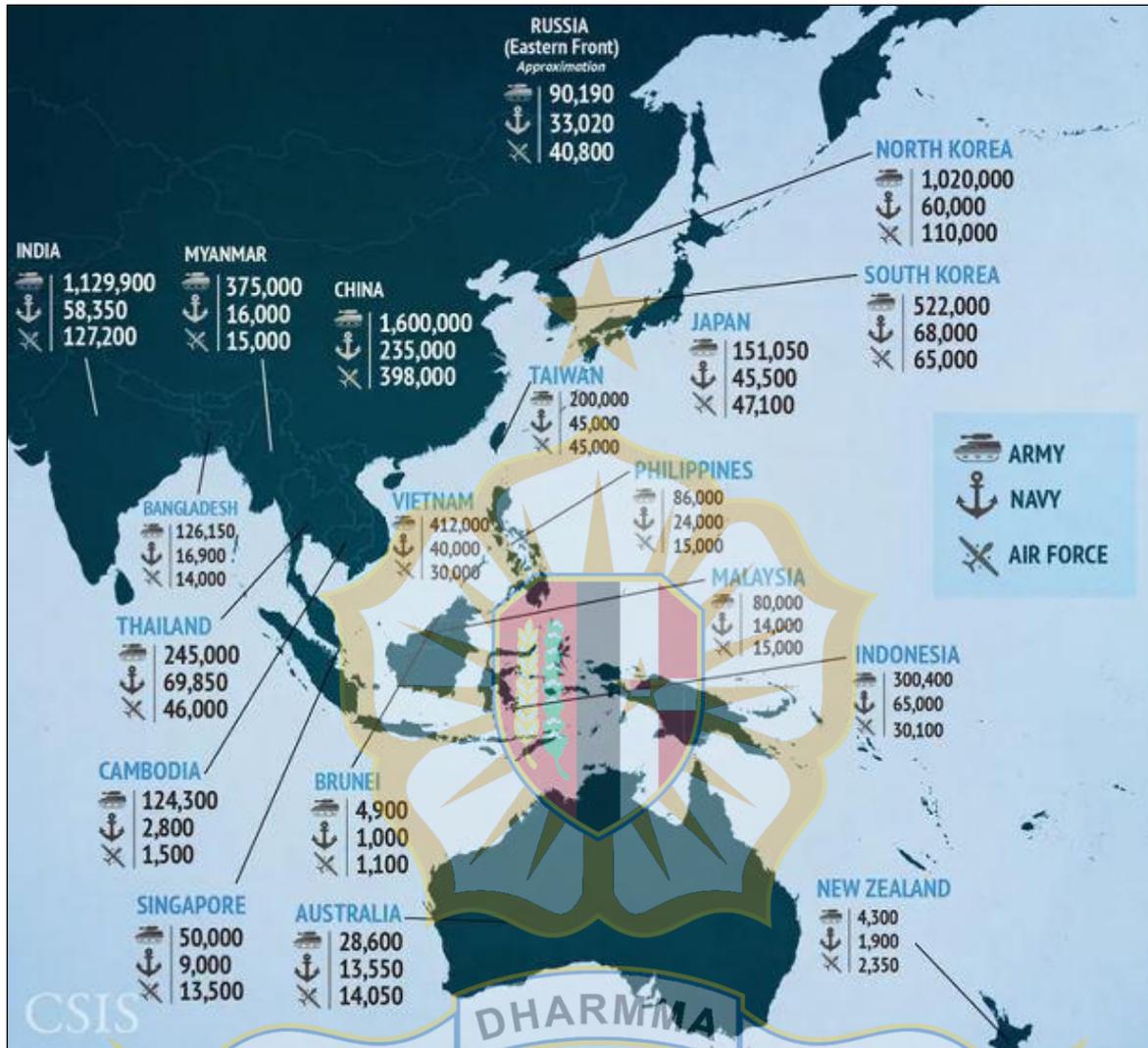


Penulis Taskap,

Purwanto Adi Nugroho  
Kolonel Pnb. NRP 521832

**Gambar 9.**

Peta Kekuatan Militer (Personel) di Kawasan Asia



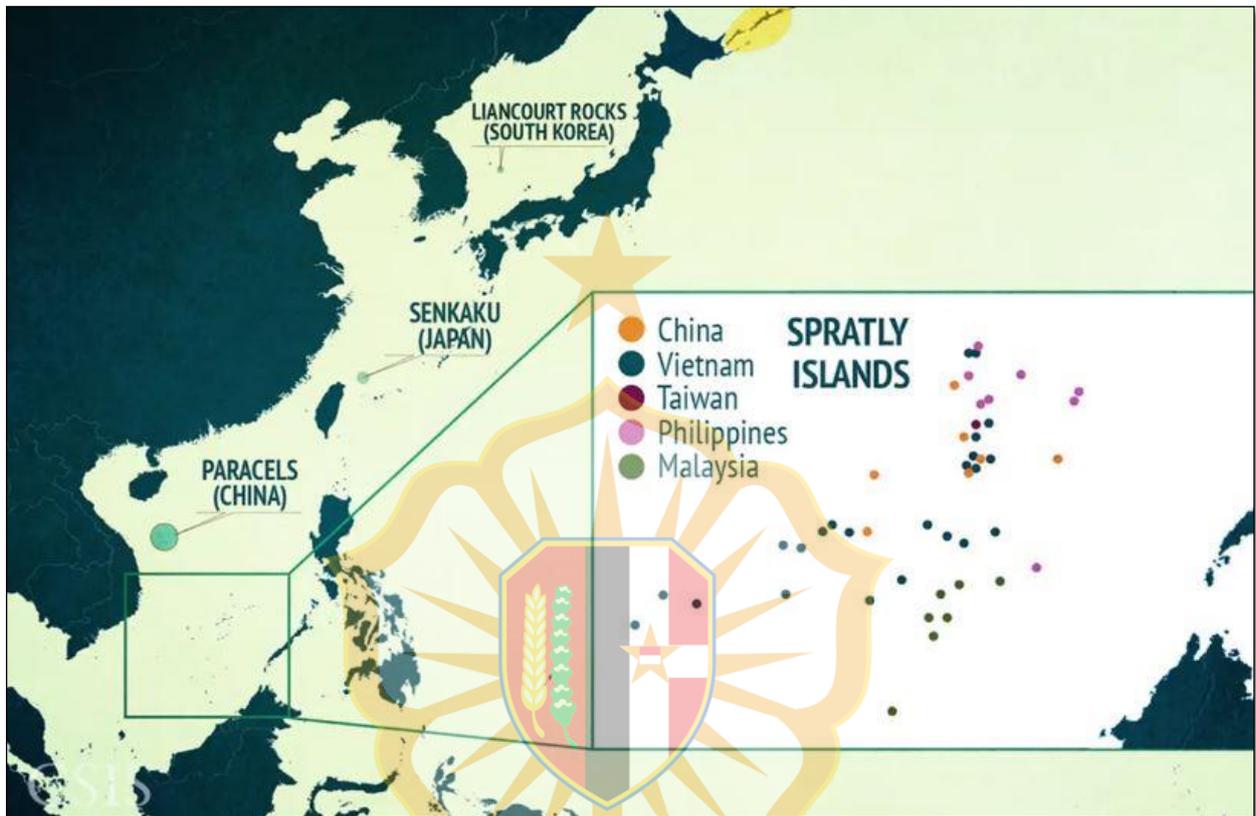
Sumber : the Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI)/ the Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Penulis Taskap,

Purwanto Adi Nugroho  
Kolonel Pnb. NRP 521832

**Gambar 10.**

Kontrol Wilayah oleh *Claimant States* di LCS (Kepulauan Spratly)



Sumber : the Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI)/ the Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

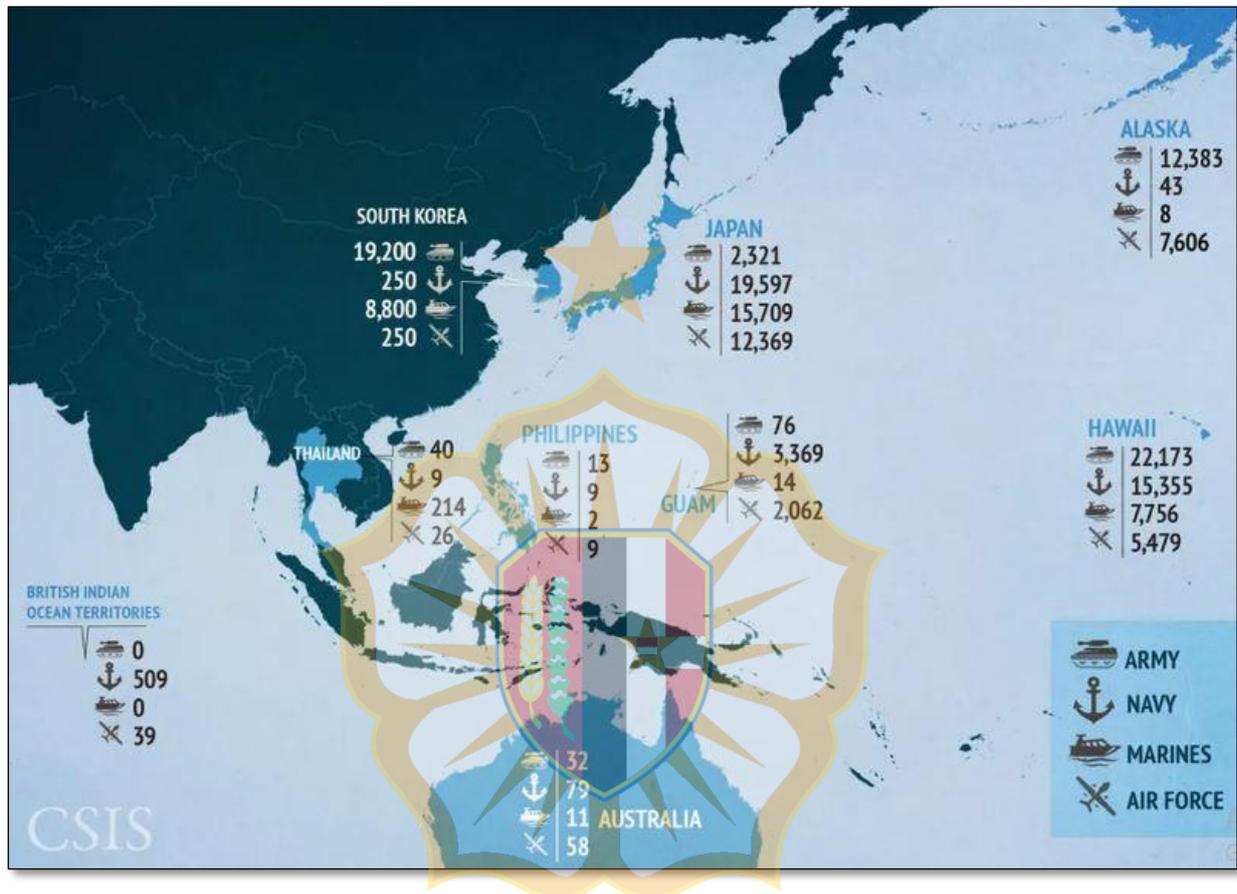


Penulis Taskap,

Purwanto Adi Nugroho  
Kolonel Pnb. NRP 521832

**Gambar 11.**

Kekuatan Militer (Personel) AS di Asia, Australia, Guam, Hawaii, dan Alaska.



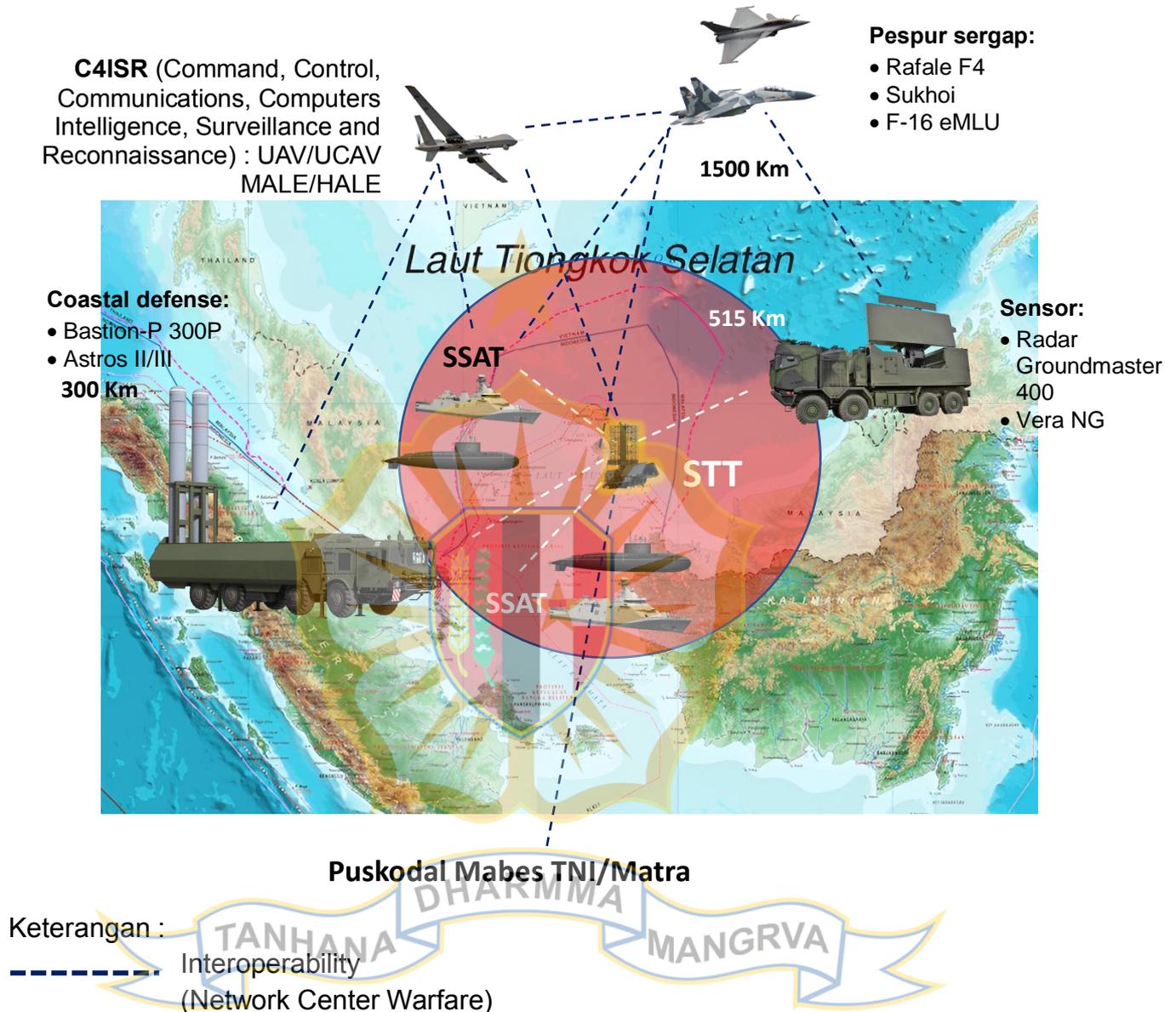
Sumber : the Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI)/ the Centre for Strategic and International Studies (CSIS).



Penulis Taskap,

Purwanto Adi Nugroho  
Kolonel Pnb. NRP 521832

**Gambar 12.**  
Konsep Optimalisasi Pertahanan di Pulau Natuna.

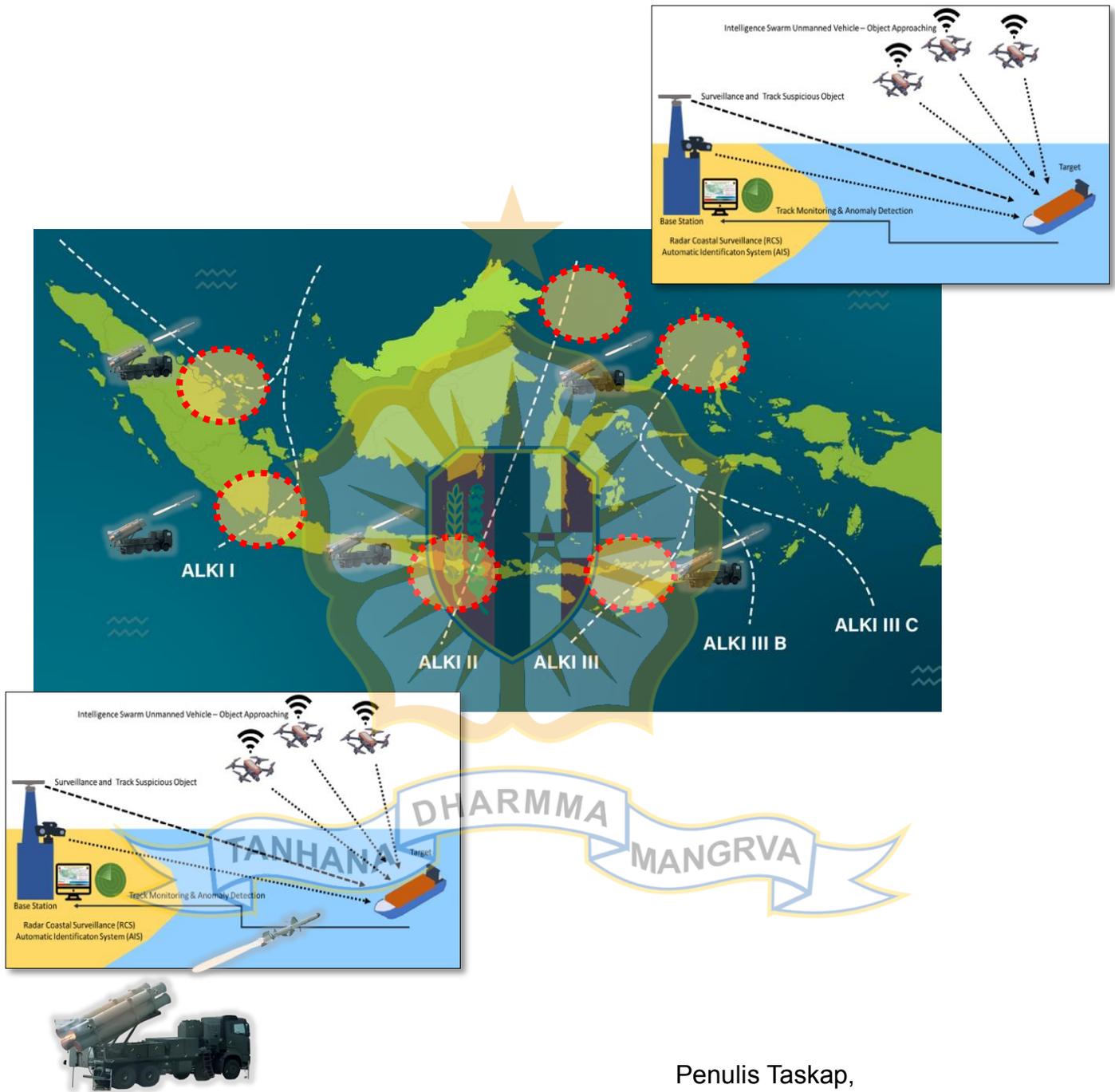


Penulis Taskap,

Purwanto Adi Nugroho  
Kolonel Pnb. NRP 521832

LAMPIRAN 15 GAMBAR 13  
KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN

**Gambar 13.**  
Konsep Optimalisasi Pertahanan di *Chokepoints* dan ALKI.

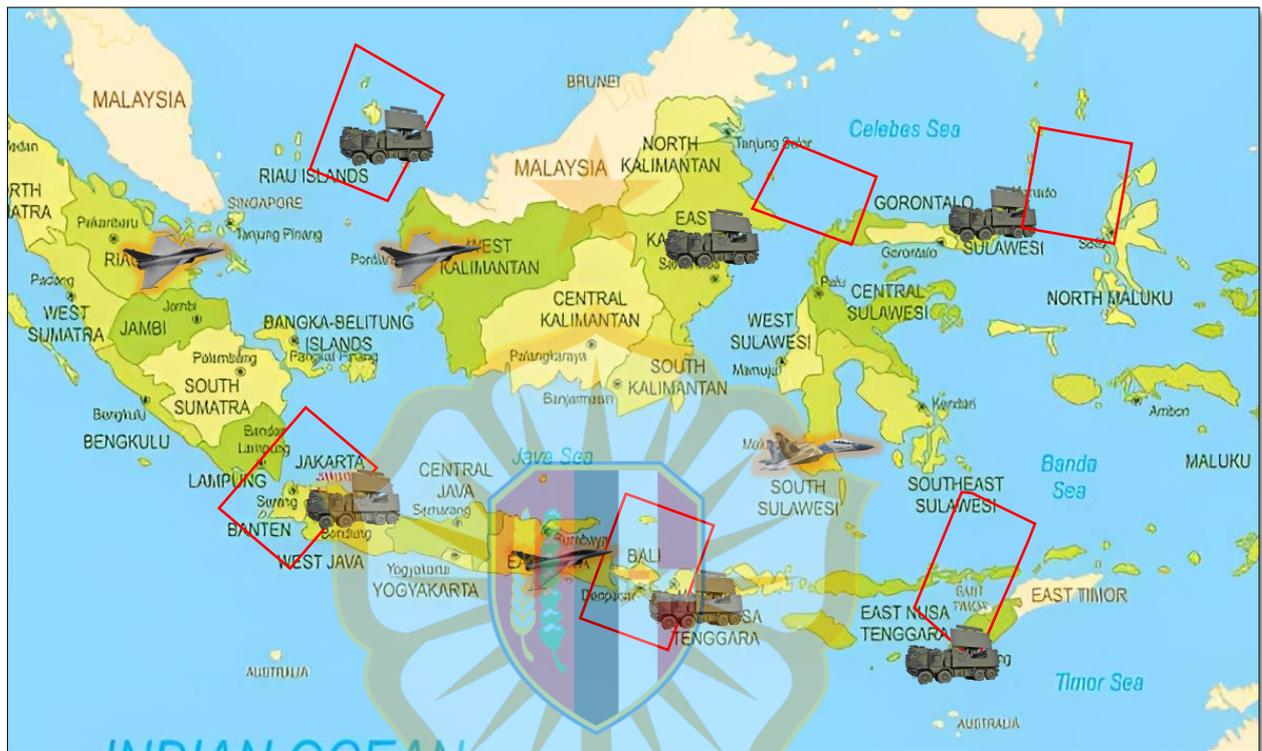


Penulis Taskap,

Purwanto Adi Nugroho  
Kolonel Pnb. NRP 521832

**Gambar 14.**

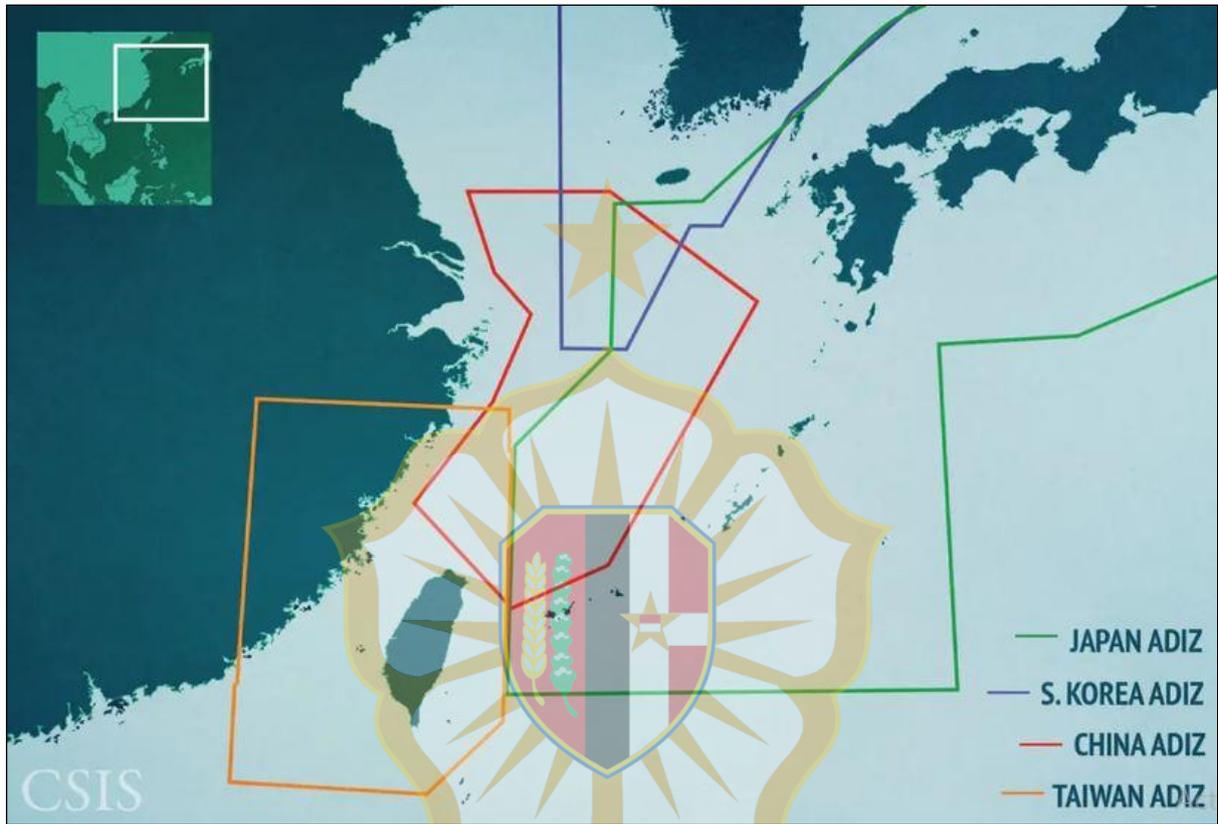
Konsep Optimalisasi Pertahanan ADIZ di Indonesia Secara Terbatas.



Penulis Taskap,

Purwanto Adi Nugroho  
Kolonel Pnb. NRP 521832

**Gambar 15.**  
Penerapan ADIZ di Laut China Timur.



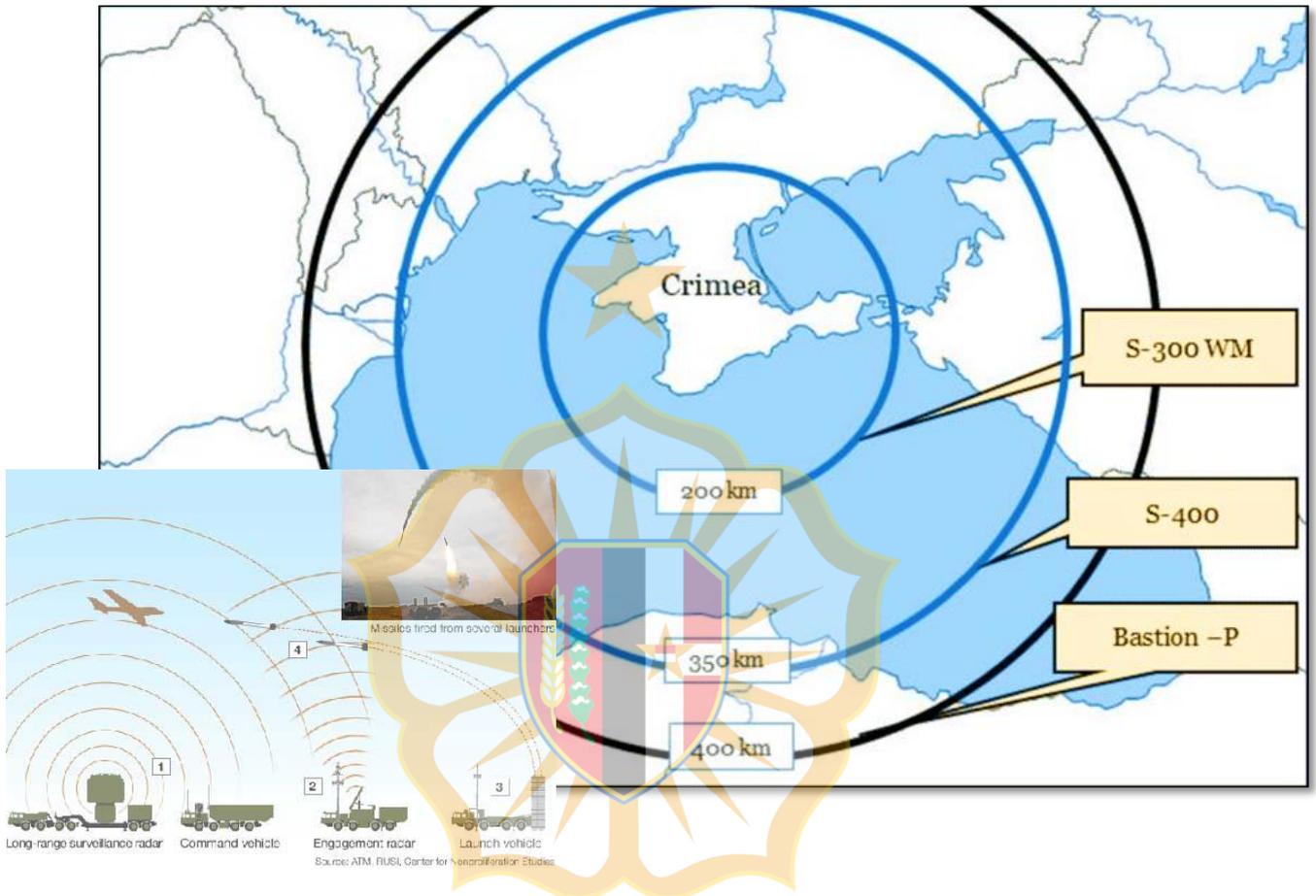
Sumber : the Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI)/ the Centre for Strategic and International Studies (CSIS).



Penulis Taskap,

Purwanto Adi Nugroho  
Kolonel Pnb. NRP 521832

**Gambar 16.**  
Penerapan A2/AD Oleh Rusia di Krimea.



Sumber : [https://www.researchgate.net/figure/Estimated-ranges-of-selected-Russian-missile-systems-located-in-Crimea-A2-AD-The-Author\\_fig3\\_357207810](https://www.researchgate.net/figure/Estimated-ranges-of-selected-Russian-missile-systems-located-in-Crimea-A2-AD-The-Author_fig3_357207810)



Penulis Taskap,

Purwanto Adi Nugroho  
Kolonel Pnb. NRP 521832

**Gambar 17.**  
Konsep Penerapan A2/AD di Indonesia Secara Terbatas



Penulis Taskap,

Purwanto Adi Nugroho  
Kolonel Pnb. NRP 521832

## RIWAYAT HIDUP

### DATA POKOK

NAMA : Purwanto Adi Nugroho  
PANGKAT : Kolonel  
KORP/PROF/SPES : Pnb/Penerbang/Angkut  
NRP : 521832  
JABATAN : Pamen Sopsau  
TMP / TANGGAL LAHIR : Temanggung, 20-03-1974  
AGAMA : Kristen Protestan  
SUKU : Jawa  
GOL. DARAH : O  
TINGGI BADAN : 175 Cm  
BERAT BADAN : 82 Kg  
JENIS KELAMIN : Laki-laki  
STATUS : K-2  
ALAMAT : Jl. Rajawali Baru No. 12, Komplek Rajawali Baru, Halim P.  
KOTA : Jakarta  
TELEPON : -



### PENDIDIKAN UMUM

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 1. SD Kanisius Temanggung | Lulus Tahun 1987 |
| 2. SMPN 2 Temanggung      | Lulus Tahun 1990 |
| 3. SMAN 1 Temanggung      | Lulus Tahun 1993 |

### PENDIDIKAN MILITER (DIKMA/DIKBANGUM KURSUS)

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. AAU  | Lulus Tahun 1996 |
| 2. Dik Aklan  | Lulus Tahun 1997 |
| 3. Sekbang  | Lulus Tahun 1998 |
| 4. Squadron Officers School/SOS USAF (setingkat Sekkau)   | Lulus Tahun 2006 |
| 5. Air Command and Staff College RTAF (setingkat Seskoau) | Lulus Tahun 2011 |
| 6. Sesko TNI  | Lulus Tahun 2020 |

### RIWAYAT PANGKAT

- |               |                         |
|---------------|-------------------------|
| 1. 19-12-1996 | Diangkat sebagai Letda  |
| 2. 01-4-2000  | Diangkat sebagai Lettu  |
| 3. 01-04-2003 | Diangkat sebagai Kapten |
| 4. 01-04-2008 | Diangkat sebagai Mayor  |

5. 01-4-2013 Diangkat sebagai Letkol
6. 01-4-2017 Diangkat sebagai Kolonel

## RIWAYAT JABATAN (PENEMPATAN)

1. 19-12-1996 Jabatan Pa Dp Gub AAU
2. 20-08-1997 Jabatan Pa Dp Lanud Adi Sucipto
3. 08-12-1998 Jabatan Pa Skadud 31 Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma
4. 14-03-2002 Jabatan Kasubsilat Skadud 31 Lanud Halim P.
5. 17-11-2005 Jabatan Kasi Lambangja Disops Skadud 31
6. 10-08-2007 Jabatan Instruktur Penerbang Wingdik Terbang Lanud Adi S.
7. 29-08-2008 Jabatan Danflightlat Skadud 31 Lanud Halim P.
8. 09-11-2009 Jabatan Kasiops Skadud 31 Lanud Halim P.
9. 22-03-2011 Jabatan Kafaslat Wing 1 Lanud Halim P.
10. 31-07-2013 Jabatan Kasi Baseops Disops Lanud Halim P.
11. 17-03-2014 Jabatan Dan Skadud 31 Lanud Halim P.
12. 29-05-2015 Jabatan Pabandyalat Sops Kas Koopsau I
13. 27-09-2016 Jabatan Asops Kosekhanudnas II Makassar
14. 28-03-2018 Jabatan Danlanud Sutan Sjahrir Padang
15. 08-12-2020 Jabatan Paban II Sarval Puslaiklambangjaau
16. 29-03-2022 Jabatan Asren Koopsud III
17. 28-03-2023 Jabatan Paban IV Jianstra Sopsau

## RIWAYAT PENUGASAN

Berbagai penugasan dalam rangka OMSP baik di dalam maupun luar negeri.

## TANDA JASA (KEHORMATAN)

1. Satyalancana Kesetiaan VIII Tahun
2. Satyalancana Kesetiaan XVI Tahun
3. Satyalancana Dwidya Sistha
4. Satyalancana Dharma Nusa
5. Satyalancana Wira Nusa
6. Satyalancana Wira Dharma
7. Satyalancana Wira Karya
8. Satyalancana Kesetiaan XXIV Tahun
9. Satyalancana Narariya

Penulis Taskap,



Purwanto Adi Nugroho  
Kolonel Pnb. NRP 521832